BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perekonomian

Provinsi DKI Jakarta

Agustus 2026

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

Agustus 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

Visi

"Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju"

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :

- Kejujuran dan integritas *(trust and integrity)*
- Profesionalisme *(professionalism)*
- Keunggulan *(excellence)*
- Mengutamakan kepentingan umum *(public interest)*
- Koordinasi dan kerjasama tim *(coordination and teamwork)* yang belandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Visi & Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dan digital terdepan dengan tata kelola kuat dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta berperan aktif dalam forum internasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi Agustus 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, di mana pada edisi Agustus 2026 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan II 2026, triwulan III 2026, dan prospek keseluruhan tahun 2026.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 5,52% (yoy), meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,59% yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga, serta akselerasi investasi dan konsumsi pemerintah. Dari sisi eksternal, kinerja impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, menyebabkan Jakarta mencatatkan net impor pada triwulan II 2026. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Konstruksi. LU utama lainnya, yaitu LU Jasa Keuangan dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy). Meski demikian, ketidakpastian global yang masih tinggi, berlanjutnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta dinamika nilai tukar Rupiah tetap menjadi faktor yang perlu dicermati. Adapun inflasi DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha, narasumber dalam berbagai *Focus Group Discussion*, dan pihak-pihak lainnya atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, Agustus 2026
Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

ttd.

Iwan Setiawan
Direktur

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia III
Kata Pengantar IV
Daftar Isi VI
Daftar Tabel VIII
Daftar Gambar IX
Daftar Grafik X
Ringkasan Eksekutif XIV
Tabel Indikator XVIII
Tim Penyusun 91

Bab I
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah 2
A. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026 3
B. *Tracking* Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2026 12
BOKS 1
Mendorong Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jakarta:
Penguatan Kelembagaan dan Insentif Pengembangan Industri Perfilman 19
BOKS 2
Perkembangan dan Prospek Konsumsi Rumah Tangga Jakarta:
Tetap Tumbuh, Makin Selektif 21

Bab II
Perkembangan Inflasi Daerah 24
A. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan II 2026 25
B. *Tracking* Inflasi Triwulan III 2026 28
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan II 2026 30
BOKS 3
Menjaga Keterjangkauan Harga Beras Bagi Masyarakat Jakarta 35

Bab III
Pembiayaan Daerah 40
A. Perkembangan Kinerja Bank Umum 41
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi 45
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga 50
D. Perkembangan Kinerja Sektor UMKM 53
BOKS 4
Menutup Celah, Membuka Peluang:
Creative Financing untuk Pembiayaan Daerah 57

Bab IV

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 60

a. Kondisi Umum 61

B. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai 61

C. Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai 61

D. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 65

BOKS 5
QRIS Jelajah Indonesia dan Pekan QRIS Nasional: Mendorong Inklusivitas Digitalisasi Pembayaran Ritel di Jakarta 71

Bab V

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 76

A. Ketenagakerjaan 77

B. Kemiskinan 79

C. Upah Tenaga Kerja 82

Bab VI

Prospek Ekonomi Daerah 84

A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional 85

B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 87

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%, yoy) 3

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran 3

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha 4

Tabel 1.4 Realisasi APBN terhadap pagu 6

Tabel 3.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta 41

Tabel 3.2 Kredit Korporasi Menurut Sektor Ekonomi 49

Tabel 4.1 Persebaran KUPVA BB 66

Tabel 4.2 Perkembangan Transaksi PJP LR 68

Tabel 5.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan 77

Tabel 5.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama 78

Tabel 5.3 Profil Kemiskinan DKI Jakarta 80

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy) 85

Tabel 6.2 Proyeksi PDB Nasional 87

Tabel 6.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2026 90

Daftar Gambar

Gambar B3.1 Pola Distribusi Perdagangan Beras DKI Jakarta 36

Gambar B3.1 Pergerakan Harga dan Pasokan Beras Jakarta 36

Gambar B3.2 Pergerakan Harga Gabah dan Pasokan Padi Nasional 36

Gambar B5.1 *Opening Ceremony* QRIS Jelajah Indonesia 2026 Wilayah Jakarta 72

Gambar B5.2 Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia 2026 Wilayah Jakarta 72

Gambar B5.3 *Closing Ceremony* QRIS Jelajah Indonesia 2026 Wilayah Jakarta 73

Gambar B5.4 *Opening Ceremony* Pekan QRIS Nasional 2026 Wilayah Jakarta 73

Gambar B5.5 Kegiatan Pekan QRIS Nasional 2026 Wilayah Jakarta 73

Gambar B5.6 *Closing Ceremony* Pekan QRIS Nasional 2026 Wilayah Jakarta 74

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Inflasi Global 3
Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang 3
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta 4
Grafik 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan II 2026 Sisi Pengeluaran 4
Grafik 1.5 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan II 2026 Sisi Pengeluaran 4
Grafik 1.6 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK 5
Grafik 1.7 Penyaluran Kredit Konsumsi RT 5
Grafik 1.8 Perkembangan Penjualan *E-Commerce* 5
Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi PMA PMDN 6
Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Investasi di Jakarta 6
Grafik 1.11 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta 6
Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Jakarta 6
Grafik 1.13 Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Domestik 7
Grafik 1.14 Pertumbuhan Nilai Impor DKI Jakarta 7
Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama DKI Jakarta 7
Grafik 1.16 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama 7
Grafik 1.17 Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan 7
Grafik 1.18 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan II 2026 8
Grafik 1.19 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha 8
Grafik 1.20 Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta 8
Grafik 1.21 Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen 8
Grafik 1.22 Perkembangan Penjualan *E-Commerce* di Jakarta 8
Grafik 1.23 Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta 9
Grafik 1.24 Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi Jakarta 9
Grafik 1.25 Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Jakarta 9
Grafik 1.26 Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta 9
Grafik 1.27 Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta 10
Grafik 1.28 Perkembangan Impor Bahan Baku DKI Jakarta 10
Grafik 1.29 Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta 10
Grafik 1.30 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta 10
Grafik 1.31 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha DKI Jakarta 11
Grafik 1.32 Perkembangan DPK di Jakarta 11
Grafik 1.33 Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan 11
Grafik 1.34 Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta 11
Grafik 1.35 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran Komponen Makanan dan Minuman 11
Grafik 1.36 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Jasa Perusahaan 11
Grafik 1.37 Perkembangan Jumlah Penumpang Penerbangan dari Jakarta 12
Grafik 1.38 Perkembangan IKK, IEK, IKE Jakarta 12
Grafik 1.39 Penjualan Mobil di Jakarta 12
Grafik 1.40 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran 13
Grafik 1.41 Perkembangan SKDU 13
Grafik 1.42 Nilai Impor Barang Modal 13
Grafik 1.43 Perkembangan Kredit Investasi Jakarta 14
Grafik 1.44 Realisasi Belanja APBD di Jakarta 14
Grafik 1.45 Realisasi APBN DKI Jakarta 14
Grafik 1.46 Ekspor Mobil CBU dan CKD 14
Grafik 1.47 Perkembangan Nilai Ekspor Jakarta 14
Grafik 1.48 Perkembangan Impor Jakarta dan Komponennya 15
Grafik 1.49 Perkembangan Penumpang Penerbangan dari Jakarta 15
Grafik 1.50 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta (Triwulan III 2026) 15
Grafik 1.51 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta (Triwulan III 2026) 15
Grafik 1.52 Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta (Triwulan III 2026) 15
Grafik 1.53 Perkembangan Penyaluran Kredit Jakarta (Triwulan III 2026) 16
Grafik 1.54 Perkembangan DPK di Jakarta (Triwulan III 2026) 16
Grafik 1.55 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Utama Jakarta (Triwulan III 2026) 16
Grafik 1.56 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri DKI Jakarta (Triwulan II 2026) 16

Daftar Grafik

Grafik 1.57	Perkiraan SKDU LU Industri Pengolahan DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	16
Grafik 1.58	Perkembangan Kredit LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	17
Grafik 1.59	Perkiraan SKDU LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan III 2026)	17
Grafik 1.60	Perkembangan Indeks Penjualan *E-Commerce* di Jakarta (Triwulan III 2026)	17
Grafik B2.1	Pertumbuhan Konsumsi RT DKI Jakarta	21
Grafik B2.2	Perkembangan MSI DKI Jakarta	21
Grafik B2.3	Pertumbuhan Komponen Konsumsi RT Provinsi DKI Jakarta	22
Grafik B2.4	Pertumbuhan Konsumsi RT DKI Jakarta	22
Grafik B2.5	Perkembangan MSI DKI Jakarta	22
Grafik B2.6	Perkembangan Pangsa Pekerja Formal DKI Jakarta	22
Grafik 2.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	25
Grafik 2.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (%)	25
Grafik 2.3	Perkembangan Harga Emas Global	25
Grafik 2.4	Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta	25
Grafik 2.5	Perkembangan Harga Avtur	26
Grafik 2.6	Perkembangan Harga Beras	26
Grafik 2.7	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	26
Grafik 2.8	Perkembangan Harga Bawang Putih	27
Grafik 2.9	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	27
Grafik 2.10	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	27
Grafik 2.11	Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Mei-Juli 2026	28
Grafik 2.12	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	28
Grafik 2.13	Perkembangan Harga Bawang Merah	28
Grafik 2.16	Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Juni-Agustus 2026	29
Grafik 2.14	Perkembangan Harga Avtur	29
Grafik 2.15	Inflasi Jakarta dan Nasional	29
Grafik 3.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	41
Grafik 3.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	42
Grafik 3.3	Komposisi DPK Jakarta	42
Grafik 3.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	42
Grafik 3.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	42
Grafik 3.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	42
Grafik 3.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	43
Grafik 3.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	43
Grafik 3.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	43
Grafik 3.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	44
Grafik 3.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	44
Grafik 3.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	44
Grafik 3.13	Sebaran Kredit di Jakarta	44
Grafik 3.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	44
Grafik 3.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	45
Grafik 3.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	45
Grafik 3.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	45
Grafik 3.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	45
Grafik 3.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	46
Grafik 3.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	46
Grafik 3.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	47
Grafik 3.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	47
Grafik 3.23	Penjualan Korporasi DKI Jakarta	47
Grafik 3.24	Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta	48
Grafik 3.25	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	48
Grafik 3.26	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	48
Grafik 3.27	Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta	48
Grafik 3.28	Pertumbuhan kredit Korporasi	49
Grafik 3.29	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	49
Grafik 3.30	NPL pada Sektor Korporasi	49
Grafik 3.31	Perkembangan DPK Korporasi	50
Grafik 3.32	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	50
Grafik 3.33	Komposisi DPK Korporasi	50
Grafik 3.34	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	50

Daftar Grafik

Grafik 3.35 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama 50
Grafik 3.36 Perkembangan Kredit Rumah Tangga 51
Grafik 3.37 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga 51
Grafik 3.38 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga 51
Grafik 3.39 Komposisi Kredit RT dan Non-RT 51
Grafik 3.40 NPL Kredit Rumah Tangga 52
Grafik 3.41 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga 52
Grafik 3.42 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga 52
Grafik 3.43 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga 52
Grafik 3.44 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga 53
Grafik 3.45 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan 53
Grafik 3.46 Komposisi DPK 53
Grafik 3.47 Komposisi DPK Rumah Tangga 53
Grafik 3.48 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta 53
Grafik 3.49 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan 54
Grafik 3.50 UMKM Berdasarkan Skala Usaha 54
Grafik 3.51 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi 54
Grafik 3.52 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama 54
Grafik 3.53 NPL Kredit UMKM 54
Grafik 3.54 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha 55
Grafik 4.1 Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal 61
Grafik 4.2 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya 61
Grafik 4.3 Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS 61
Grafik 4.4 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS 62
Grafik 4.5 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI 62
Grafik 4.6 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI 62
Grafik 4.7 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet 63
Grafik 4.8 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet, ATM dan Mesin ATM 63
Grafik 4.9 Pangsa Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi 63
Grafik 4.10 Pangsa Volume Transaksi Kartu ATM/ Debit Berdasarkan Jenis Transaksi 63
Grafik 4.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik 63
Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik 63
Grafik 4.13 Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik 64
Grafik 4.14 Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta 64
Grafik 4.15 Pangsa merchant QRIS per Wilayah 64
Grafik 4.16 Pangsa merchant QRIS per Jenis Usaha 64
Grafik 4.17 Perkembangan Nilai Transaksi QRIS *Cross Border* 64
Grafik 4.18 Perkembangan Volume Transaksi QRIS *Cross Border* 64
Grafik 4.19 Pangsa Negara Transaksi QRIS Cross Borde 65
Grafik 4.20 Pangsa Pengaduan Konsumen di DKI Jakarta Triwulan II 2026 65
Grafik 4.21 Perkembangan Transaksi KUPVA BB 66
Grafik 4.22 *Market Share* Valuta Asing 66
Grafik 4.23 Perkembangan Transaksi PJP LR 67
Grafik 5.1 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja 77
Grafik 5.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta, Regional Jawa, dan Nasional 77
Grafik 5.3 Presentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja 77
Grafik 5.4 Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal 78
Grafik 5.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 78
Grafik 5.6 Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan 78
Grafik 5.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah) 79
Grafik 5.8 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha 79
Grafik 5.9 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja 79
Grafik 5.10 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional 80
Grafik 5.11 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta 80

Daftar Grafik

Grafik 5.12	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	80
Grafik 5.13	Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan	80
Grafik 5.14	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	80
Grafik 5.15	Komoditas Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan (%)	81
Grafik 5.16	Komoditas Non Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan (%)	81
Grafik 5.17	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	81
Grafik 5.18	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	81
Grafik 5.19	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	81
Grafik 5.20	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	82
Grafik 5.23	UMP Provinsi di Indonesia	82
Grafik 5.21	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	82
Grafik 5.22	Perkembangan UMP DKI Jakarta	82
Grafik 6.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2026	88
Grafik 6.2	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2026	89
Grafik 6.3	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2026	89
Grafik 6.4	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2026	89

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,32% terhadap nasional tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026 sebesar 5,52% (yoy), kendati sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,59% yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga, serta akselerasi investasi dan konsumsi pemerintah. Dari sisi eksternal, kinerja impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor menyebabkan Jakarta mencatatkan net impor pada triwulan II 2026. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Konstruksi. LU utama lainnya, yaitu LU Jasa Keuangan dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Memasuki triwulan III 2026, perekonomian Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat, utamanya didorong oleh terjaganya permintaan domestik seiring maraknya penyelenggaraan event dan promo pada momentum HUT RI serta tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, diprakirakan investasi terakselerasi seiring berlanjutnya proyek infrastruktur strategis pemerintah dan swasta seperti MRT, LRT, TOD, Jalan Tol, proyek pengendalian banjir dan fasilitas publik yang didukung dengan kegiatan promosi investasi. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan dan Konstruksi juga diprakirakan tetap kuat, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT dan Investasi yang diprakirakan tetap tumbuh tinggi.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,78% (yoy). Inflasi triwulan ini tercatat paling rendah di antara semua provinsi di pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,34% (yoy). Capaian ini menunjukkan inflasi Jakarta yang tetap terkendali di tengah berlanjutnya penyesuaian harga sebagai dampak gejolak harga minyak dan energi global. Memasuki triwulan III 2026, inflasi Jakarta pada Agustus 2026 tetap terjaga pada rentang sasaran nasional, sebesar 2,71% (yoy). Capaian ini merupakan yang terendah di antara semua provinsi di Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,88% (yoy). Tekanan inflasi tahunan terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas global, harga energi, serta tarif angkutan udara. Ke depan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran pada tahun 2026 seiring dengan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Ringkasan Eksekutif

Intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang solid dengan profil risiko yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit diimbangi dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ruang ekspansi kredit juga didorong oleh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang tetap akomodatif guna mendukung pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap terjaga, tecermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah dan berada jauh di bawah threshold 5%, serta rasio permodalan yang tetap kuat.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kebutuhan pembiayaan sektor korporasi seiring ekspansi usaha dan perbaikan kinerja penjualan. Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi, real estate, dan perdagangan besar dan eceran. Kemampuan bayar korporasi juga tetap kuat, tecermin dari rasio likuiditas yang terjaga dan tingkat Non-Performing Loans (NPL) korporasi yang rendah.

Kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan perlambatan pada triwulan II 2026. Kendati demikian, perlambatan kinerja kredit konsumsi rumah tangga lebih lanjut tertahan oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat seiring tetap kuatnya optimisme masyarakat yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga pada level 3% meskipun perlu terus dimonitor seiring akselerasi pertumbuhan kredit. Kredit sektor UMKM juga tetap tumbuh positif di tengah kuatnya penyaluran kredit bank umum, didukung oleh peningkatan aktivitas usaha dan berbagai program penguatan kapasitas yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong produktivitas dan daya saing UMKM.

Dalam bidang sistem pembayaran, peredaran uang kartal di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat mengalami net inflow sejalan pola historis setelah periode HBKN Ramadan Idulfitri pada triwulan sebelumnya. Transaksi pembayaran nontunai tetap tumbuh yang didukung perluasan akseptasi QRIS. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) tumbuh sebesar 56,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 30,78% (yoy). Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan permintaan valuta asing masyarakat pada KUPVA BB seiring peningkatan kebutuhan, baik karena faktor musiman maupun antisipasi permintaan ke depan. Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,57% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,44% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh menurunnya transaksi outgoing (di dalam maupun ke luar negeri) di tengah meningkatnya transaksi incoming (dari luar ke dalam negeri) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Mei 2026 relatif stabil pada level 94,21% meningkat dibandingkan Februari 2026 sebesar 93,97%. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Lainnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 3,96% pada Maret 2026, dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,28%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2026 berada pada level 8,07%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.

Secara keseluruhan tahun 2026, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy). Prospek tersebut didukung oleh kinerja perekonomian pada semester I 2026 yang tetap kuat serta berlanjutnya permintaan domestik baik aktivitas konsumsi maupun investasi pemerintah dan swasta. Meski demikian, ketidakpastian global yang masih tinggi, berlanjutnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta dinamika nilai tukar Rupiah tetap menjadi faktor yang perlu dicermati karena dapat memengaruhi permintaan eksternal, biaya input, dan keputusan investasi pelaku usaha.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi pada semester II diprakirakan tetap resilien, didukung oleh mobilitas masyarakat, penyelenggaraan berbagai kegiatan, MICE, konser, dan sportainment, serta momentum HBKN Nataru di akhir tahun. Investasi diprakirakan menguat didukung kelanjutan dan penyelesaian proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multiyears seperti MRT Fase 2A, LRT Jakarta Fase 1B, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), serta proyek infrastruktur perkotaan lainnya. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh kuat didukung belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan realisasi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh program prioritas Pemerintah. Sementara itu, ekspor tetap tumbuh moderat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan permintaan global. Di sisi lain, impor tetap tinggi sejalan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung kegiatan produksi dan investasi, sehingga menahan kontribusi net ekspor.

Ringkasan Eksekutif

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan ditopang oleh LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi. LU Perdagangan tetap kuat ditopang aktivitas konsumsi, perdagangan antarwilayah, serta penyelenggaraan MICE. LU Industri Pengolahan didukung permintaan domestik, sementara LU Konstruksi menguat sejalan berlanjutnya proyek strategis Pemerintah dan swasta. LU Informasi dan Komunikasi tetap tumbuh kuat seiring peningkatan transaksi digital dan kebutuhan layanan data yang terus berkembang. Di sisi lain, LU Jasa Keuangan diprakirakan tumbuh lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Tabel Indikator

INDIKATOR	2023					2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
Ekonomi Makro Regional																	
Produk Domestik Regional Bruto (%, yoy)	**4,95**	**5,13**	**4,93**	**4,85**	**4,96**	**4,78**	**4,90**	**4,93**	**5,01**	**4,90**	**4,95**	**5,18**	**4,96**	**5,71**	**5,21**	**5,59**	**5,52**
Berdasarkan Lapangan Usaha:																	
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19	6,98	5,62	-0,43	5,17	0,57	3,19	0,63	7,28	2,97	-2,25	1,54
2 Pertambangan dan Penggalian	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43	4,52	-6,26	-6,35	-5,27	-3,64	-8,60	-8,14	-11,99	-7,74	-5,97	2,43
3 Industri Pengolahan	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86	-0,53	2,46	1,33	1,35	1,14	1,61	0,98	1,44	2,53	1,65	2,62	4,37
4 Pengadaan Listrik dan Gas	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17	-19,04	-16,57	-13,80	-16,32	-15,24	-19,09	-11,73	-3,29	-12,49	-7,45	7,72
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22	0,59	0,28	-3,84	0,48	-4,93	-3,26	-3,09	-3,10	-3,60	-4,81	5,39
6 Konstruksi	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27	6,55	5,65	9,39	6,99	2,61	3,64	3,17	3,15	3,14	4,98	5,96
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,39	6,87	7,99	7,26	6,87	4,35	5,91	5,15	6,55	5,50	6,71	6,83
8 Transportasi dan Pergudangan	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48	6,15	7,10	8,07	6,96	7,96	9,90	9,06	7,87	8,69	8,31	6,96
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56	7,57	7,31	8,87	8,31	9,64	9,79	9,55	8,40	9,33	10,84	9,52
10 Informasi dan Komunikasi	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,43	4,19	4,27	4,36	4,80	5,93	5,65	6,72	6,58	6,22	6,33	5,97
11 Jasa keuangan dan Asuransi	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02	10,99	6,09	2,60	5,36	5,84	4,71	-0,15	4,78	3,83	3,68	1,71
12 Real Estate	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31	1,35	1,64	1,76	1,51	1,97	2,68	3,48	2,96	2,77	2,52	2,54
13 Jasa Perusahaan	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,57	3,57	3,65	5,05	4,71	6,32	7,62	8,58	8,11	7,66	5,71	5,73
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16	-5,96	0,93	-2,53	1,25	4,64	2,92	5,21	7,71	5,36	4,65	3,98
15 Jasa Pendidikan	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69	0,96	6,97	5,52	4,26	7,19	5,99	7,22	6,94	6,83	6,70	6,62
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09	6,71	3,36	2,79	5,41	4,37	3,72	6,02	6,39	5,12	5,44	5,21
17 Jasa Lainnya	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45	3,87	6,09	8,20	5,42	8,98	8,31	8,29	8,32	8,46	8,37	8,22
Berdasarkan Permintaan:																	
1 Konsumsi																	
a. Pengeluran Konsumsi Rumah Tangga	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25	5,28	5,26	5,14	5,23	5,36	5,13	5,01	5,51	5,25	5,72	5,18
b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84	19,70	9,69	11,99	6,84	11,82	3,45	4,58	2,42	2,03	3,12	5,54	3,20
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86	30,30	-5,62	10,81	5,20	8,72	9,75	5,16	20,06	8,60	10,56	4,22	14,70
3 PMTB	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89	4,36	4,66	4,27	7,54	5,20	2,89	5,50	3,67	6,81	4,77	4,71	6,52
4 Perubahan Inventori	-27,79	37,25	209,14	44,75	-8,82	-75,78	-12,18	38,88	38,67	-51,17	90,39	-284,84	-132,41	-145,07	60,45	-146,52	-37,61
5 Ekspor	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67	3,23	7,06	13,40	14,66	9,64	17,72	17,26	8,57	7,62	12,50	8,98	9,82
6 Impor	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25	6,30	5,32	13,50	14,51	10,09	16,44	16,99	7,92	8,67	12,18	7,21	10,52
Ekspor																	
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986	2,694	2, 856	3,875	4,217	10,786	4,387	3.593	4.570	4.725	12.892	2.980	4.301
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	849	764	809	922	3.344	820	894	1,032	1,119	1.716	1.016	959	1.170	1.118	4.263	0.879	0.997
Impor																	
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936	16,409	16,597	20,637	20,431	74,074	17,522	19.331	19.544	21.031	59.924	17.902	22.702
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479	8,269	8,047	9,541	9,913	35,770	8,226	8.938	9.157	9.939	28.042	8.619	10.721
Indeks Harga Konsumen	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67	104,81	105,10	104,97	105,69	105,69	105,88	105,48	105,85	106,55	106,55	107,57	108,02
Laju Inflasi Tahunan (%, yoy)	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28	2,18	2,23	1,70	1,48	1,48	1,02	2,07	2,40	2,63	2,63	3,37	2,78

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

Tabel Indikator

INDIKATOR	2023					2024					2025					2026	
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II
Perbankan																	
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	**4.211**	**4.234**	**4.235**	**4.461**	**4.461**	**4.539**	**4.560**	**4.505**	**4.596**	**4.596**	**4.742**	**4.994**	**5.253**	**5.602**	**5.602**	**5.664**	**5.681**
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	**2.010**	**2.103**	**2.193**	**2.324**	**2.324**	**2.401**	**2.522**	**2.572**	**2.690**	**2.690**	**2.717**	**2.817**	**2.847**	**3.178**	**3.178**	**3.197**	**3.362**
- Modal Kerja	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315	1.353	1.434	1.461	1.486	1.486	1.469	1.526	**1.526**	**1.658**	**1.658**	1.635	1.762
- Investasi	640	672	703	749	749	783	818	834	915	915	955	995	**1.021**	**1.211**	**1.211**	1.258	1.301
- Konsumsi	240	244	253	260	260	265	270	277	289	289	291	296	**301**	**310**	**310**	304	300
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	**12,7**	**8,0**	**11,6**	**15,83**	**15,8**	**19,41**	**19,90**	**17,30**	**15,76**	**15,76**	**13,16**	**11,69**	**10,69**	**18,16**	**18,16**	**17,67**	**13,50**
- Modal Kerja	14,2	6,9	11,9	17,5	17,50	19,6	20,8	18,2	12,9	12,9	8,7	6,4	**4,5**	**11,6**	**11,6**	11,3	15,4
- Investasi	10,7	9,3	13,2	16,0	16,00	22,3	21,6	18,5	22,1	22,1	22,1	21,6	**22,4**	**32,4**	**32,4**	31,6	30,8
- Konsumsi	11,0	9,2	6.2	7,8	7,80	10,6	10,6	9,7	11,3	11,3	9,8	9,7	**8,4**	**7,1**	**7,1**	4,4	1,2
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	**140**	**144**	**146**	**150**	**150**	**149**	**147**	**150**	**155**	**155**	**150**	**154**	**155**	**159**	**159**	**160**	**157**
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek(%)	**47,75**	**50,18**	**50,46**	**49,68**	**49,68**	**52,90**	**55,31**	**57,10**	**58,52**	**58,52**	**57,30**	**56,41**	**54,20**	**56,73**	**56,73**	**56,45**	**59**
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	**1,37**	**1,41**	**1,45**	**1,33**	**1,33**	**1,34**	**1,22**	**1,20**	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**1,08**	**1,13**	**0,98**	**0,98**	**1,08**	**1,00**
Sistem Pembayaran																	
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88	20,35	21,20	22,79	25,56	25,56	23,99	24,47	**24,25**	**27,39**	**27,39**	25,63	28,10
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20	19,53	19,50	21,55	23,32	23,32	21,15	21,36	**20,79**	**25,31**	**25,31**	23,60	24,79
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16	5,28	5,43	5,62	5,78	5,78	6,04	6,17	**6,38**	**5,60**	**5,60**	5,63	5,40
- Volume Transaksi UE (Juta)	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050	2.513	2.811	2.868	3.309	11.501	4.106	4.676	**5.171**	**5.707**	**19.660**	5.965	6.131
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	103	127	136	151	518	165	190	207	220	782	250	283	**314**	**349**	**1.195**	369	372

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

Bab 1

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,32% terhadap nasional tetap tumbuh kuat pada triwulan II 2026 sebesar 5,52% (yoy), meskipun tidak setinggi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,59% yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga, serta akselerasi investasi dan konsumsi pemerintah. Dari sisi eksternal, kinerja impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, menyebabkan Jakarta mencatatkan net impor pada triwulan II 2026. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Konstruksi. LU utama lainnya, yaitu LU Jasa Keuangan dan LU Industri Pengolahan juga tetap tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Memasuki triwulan III 2026, perekonomian Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat, utamanya didorong oleh terjaganya permintaan domestik seiring maraknya penyelenggaraan event dan promo pada momentum HUT RI serta tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, diprakirakan investasi terakselerasi seiring berlanjutnya proyek infrastruktur strategis pemerintah dan swasta seperti MRT, LRT, TOD, Jalan Tol, proyek pengendalian banjir dan fasilitas publik yang didukung dengan kegiatan promosi investasi. Dari sisi LU utama, sejalan dengan sisi pengeluaran, pertumbuhan LU Perdagangan dan Konstruksi juga diprakirakan tetap kuat, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT dan Investasi yang diprakirakan tetap tumbuh tinggi.

PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA (yoy)

5,59% Triwulan I 2026 → **5,52%** Triwulan II 2026

PERTUMBUHAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (yoy)

5,72% Triwulan I 2026 → **5,18%** Triwulan II 2026

PERTUMBUHAN INVESTASI (yoy)

4,71% Triwulan I 2026 → **6,52%** Triwulan II 2026

PERTUMBUHAN EKSPOR (yoy)

8,98% Triwulan I 2026 → **9,82%** Triwulan II 2026

A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2026

Prospek perekonomian global[1] masih lemah disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya intensitas perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan komoditas dunia lainnya kembali naik. Perkembangan tersebut menyebabkan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia (Tabel 1. 1). Sementara itu, tekanan inflasi global tetap tinggi (Grafik 1. 1) sehingga mendorong kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, termasuk suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR). Imbal hasil (*yield*) US Treasury juga naik. Ketidakpastian di pasar keuangan global berlanjut sehingga menahan preferensi investor global terhadap investasi portofolio di negara *emerging markets* dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY) (Grafik 1. 2). Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 belum kuat yang diprakirakan sekitar 3,0% dan tekanan inflasi global tetap tinggi sekitar 4,5% pada 2026. Suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan naik pada triwulan IV 2026. Imbal hasil (*yield*) US Treasury juga naik dan diprakirakan tetap tinggi seiring menguatnya ekspektasi kenaikan FFR dan defisit anggaran AS yang masih lebar.

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%, yoy)

NEGARA	2022	2023	2024	2025	2026*
Dunia	**3,8**	**3,3**	**3,5**	**3,5**	**3,0**
Negara Maju	**3,1**	**1,7**	**1,9**	**1,9**	**1,7**
Amerika Serikat	2,5	2,9	2,8	2,1	2,3
Kawasan Euro	3,6	0,4	1,0	1,4	0,7
Jepang	1,3	0,7	-0,2	1,1	0,7
Negara Berkembang	**4,1**	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**3,9**
Tiongkok	3,1	5,4	5,0	5,0	4,6
India	6,8	7,7	6,5	7,6	6,7
ASEAN-5	5,5	4,1	4,8	4,5	4,1
Amerika Latin	4,3	2,3	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	0,5	3,6	3,8	2,0	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	6,4	2,6	3,1	3,7	2,2

Sumber: IMF WEO.
*Proyeksi Bank Indonesia

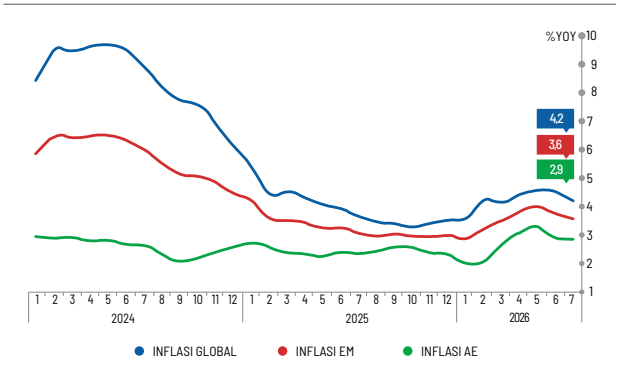

Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Grafik 1.1 Inflasi Global

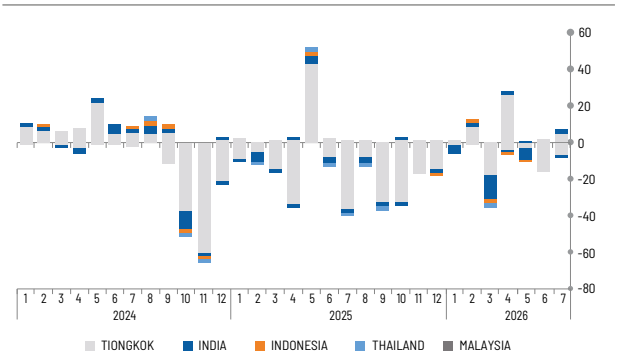

Sumber: IIF, diolah

Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang

Pertumbuhan ekonomi nasional[2] tetap terjaga baik dan perlu terus didorong untuk memperkuat momentum pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,29% (yoy), melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,61% (yoy) (Tabel 1. 2 dan Tabel 1. 3). Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh stimulus fiskal yang berdampak pada peningkatan konsumsi Pemerintah dan investasi Pemerintah. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi bersumber dari peningkatan belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap terjaga meskipun perlu terus ditingkatkan memanfaatkan momentum kuatnya stimulus fiskal.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

KOMODITAS	2024				2024	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,91	4,93	4,91	4,98	4,94	4,95	4,97	4,89	5,11	4,98	5,52	5,06
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	24,29	9,98	11,69	6,06	12,48	3,07	7,82	4,28	5,90	5,13	6,28	6,93
Konsumsi Pemerintah	19,90	1,42	4,62	4,17	6,61	-1,37	-0,33	5,49	4,55	2,50	21,81	15,97
Investasi (PMTDB)	3,79	4,43	5,15	5,03	4,61	2,12	6,99	5,04	6,12	5,09	5,96	6,87
Investasi Bangunan	5,46	5,31	6,02	5,26	5,51	1,35	4,89	3,02	3,74	3,25	5,29	6,61
Investasi Nonbangunan	-0,64	2,08	2,98	4,40	2,23	4,32	12,93	10,34	12,39	10,12	7,85	7,57
Ekspor	0,50	8,28	9,09	7,63	6,51	6,46	10,67	9,91	3,25	7,03	0,90	4,13
Impor	1,77	8,57	11,47	10,36	7,95	4,17	11,65	1,18	3,96	4,77	7,18	8,82
PDB	**5,11**	**5,05**	**4,95**	**5,02**	**5,03**	**4,87**	**5,12**	**5,04**	**5,39**	**5,11**	**5,61**	**5,29**

Sumber: BPS, diolah

1 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2026 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2026

2 Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2026 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2026

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

KOMODITAS	2024				2024	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3,54	3,25	1,69	0,71	0,67	10,52	1,65	4,93	5,14	5.33	4,97	3,80
Pertambangan dan Penggalian	9,31	3,17	3,46	3,95	4,90	-1,23	2,03	-1,98	-1,31	-0,66	-2,14	-1,64
Industri Pengolahan	4,13	3,95	4,72	4,89	4 ,43	4,55	5,68	5,54	5,40	5,30	5,04	4,52
Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11	0,90	2,66	3,55	3,10	-0,99	10,81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	0,84	0,03	1,06	1,56	0,18	0,82	3,32	-0,51	0,94	0,42	0,03
Konstruksi	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18	4,98	4,21	3,89	3,81	5,49	6,68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	4 ,85	4,82	5,19	4,86	5,03	5,37	5,49	6,07	5,49	6,26	6,39
Transportasi dan Pergudangan	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01	8,52	8,62	8,98	8,78	8,04	6,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,34	10,15	8,32	6,61	8,56	5,75	8,04	8,41	7,15	7,41	13,14	10,60
Informasi dan Komunikasi	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72	7,92	9,65	8,09	8,35	7,14	6,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,93	7,90	5,49	1,74	4,74	3,98	3,20	0,77	7,92	3,96	4,68	3,11
Real Estat	2,54	2,16	2,32	2,97	2,50	2,94	3,71	3,95	3,71	3,58	3,54	3,64
Jasa Perusahaan	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27	9,31	9,94	7,90	9,10	4,91	5,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,89	2,81	3,94	1,16	6,40	4,79	4,69	4,33	1,63	3,86	6,45	6,89
Jasa Pendidikan	7,43	2,44	2,56	2,95	3,75	5,04	1,40	10,59	3,43	4,99	5,18	5,92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,65	8,57	7,65	5,20	8,11	5,78	3,80	6,83	5,95	5,99	7,62	6,88
Jasa lainnya	8,92	8,85	9,95	11,36	9,80	9,84	11,31	9,92	8,71	9,93	9,91	6,36
PDB	**5,11**	**5,05**	**4,95**	**5,02**	**5,03**	**4,87**	**5,12**	**5,04**	**5,39**	**5,11**	**5,61**	**5,29**

Sumber: BPS, diolah

Perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,32% terhadap nasional tetap tumbuh kuat sebesar 5,52% (yoy) pada triwulan II 2026, meskipun tidak setinggi capaian pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,59% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Konsumsi Pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama didorong oleh LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Konstruksi. Capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan II 2026 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,29% (yoy).

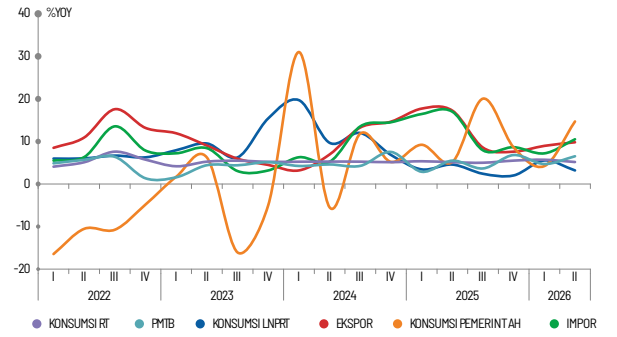

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan II 2026 Sisi Pengeluaran

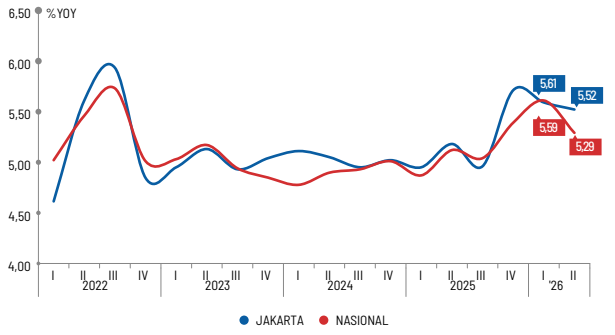

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta

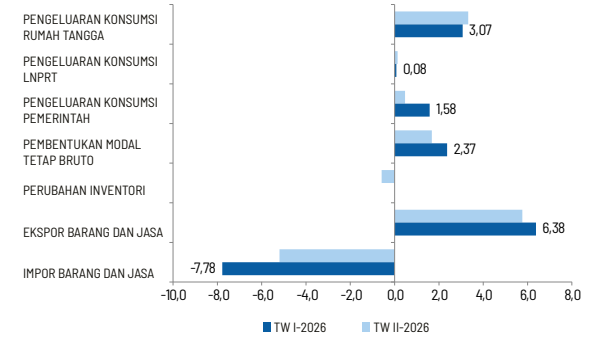

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1.5 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan II 2026 Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi), dan Konsumsi Pemerintah. Konsumsi RT dengan pangsa 59,01% tumbuh 5,18% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,72% (yoy). Meski demikian, Konsumsi RT tetap memberikan kontribusi terbesar, yaitu 3,07% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan II 2026 (Grafik 1. 5). Investasi dengan pangsa 36,62% mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan 6,52% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,71% (yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 2,37% terhadap PDRB Jakarta. Selanjutnya, Konsumsi Pemerintah dengan pangsa 11,69% mencatatkan pertumbuhan sebesar 14,70% (yoy) pada triwulan II 2026, terakselerasi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,22% (yoy) dan berkontribusi sebesar 1,58%. Adapun Konsumsi LNPRT tumbuh 3,20% (yoy) dengan kontribusi 0,08% pada triwulan II 2026. Dari sisi eksternal, pada triwulan II 2026 ekspor tumbuh sebesar 9,82% (yoy) dan impor tumbuh sebesar 10,52% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, tercatat kinerja net impor dengan kontribusi sebesar -1,40% pada PDRB Jakarta.

Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026. Pada triwulan II 2026, konsumsi RT tetap tumbuh positif sebesar 5,18% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,72% (yoy) (Grafik 1. 4). Meskipun melambat, konsumsi RT tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar, dengan andil 3,07% dari total pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 5,52% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1. 5). Perlambatan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga sejalan dengan normalisasi permintaan pasca-*long festive season* HBKN Ramadan dan Idulfitri, Imlek, serta Nyepi yang berlangsung pada triwulan I 2026. Perlambatan tersebut tecermin pada penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi 144,63 pada triwulan II 2026 dari 147,13 pada triwulan sebelumnya (Grafik 1. 6). Penyaluran kredit konsumsi juga mengalami perlambatan dari 4,52% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 0,11% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1. 7). Kendati demikian, laju pertumbuhan konsumsi RT tetap kuat yang didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan penyaluran gaji ke-13 ASN, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 6,17% pada tahun 2026 serta laju inflasi (Juni 2026) yang terkendali sebesar 2,78% (yoy). Selain itu, maraknya penyelenggaraan *event* seperti Jakarta International Marathon (JAKIM), Pekan Raya Jakarta (PRJ), serta rangkaian perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta menjadi penopang pertumbuhan konsumsi RT. Perlambatan kinerja Konsumsi RT yang lebih dalam juga tertahan oleh kinerja penjualan *e-commerce* yang tetap solid (Grafik 1. 8), khususnya didorong oleh kategori perlengkapan rumah tangga, penjualan otomotif & aksesoris, serta *personal care* & kosmetik.

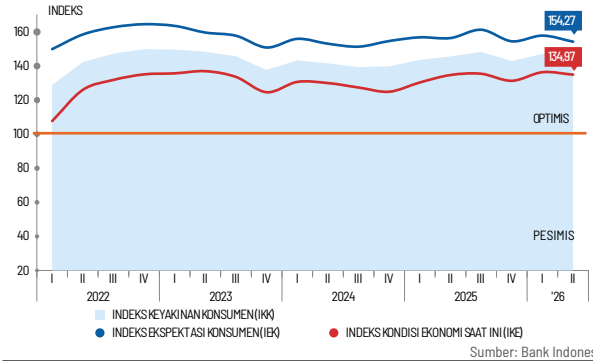

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.6 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK

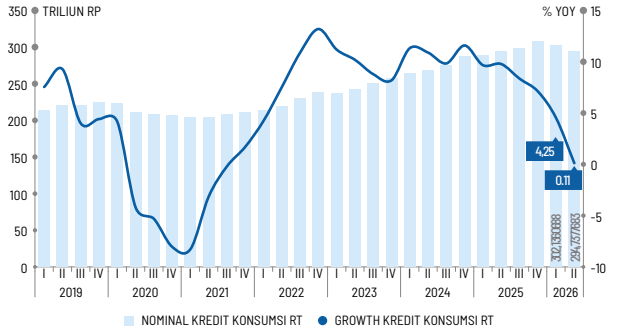

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.7 Penyaluran Kredit Konsumsi RT

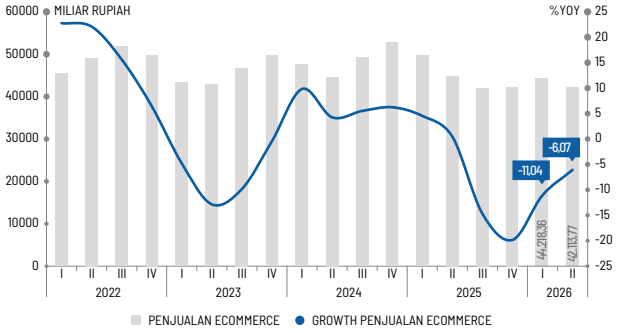

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan Penjualan *E-Commerce*

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Investasi Jakarta pada triwulan II 2026 tumbuh tinggi dan menopang perekonomian. Pada triwulan II 2026, investasi (PMTB) tumbuh sebesar 6,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,71% (yoy) (Grafik 1. 4). Investasi memberikan andil sebesar 2,37% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 (Grafik 1. 5). Penguatan kinerja investasi Jakarta sejalan dengan meningkatnya realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh mencapai 33,47% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 1. 9). Berdasarkan rilis BPS, meningkatnya investasi juga didukung oleh peningkatan *output* konstruksi dan impor barang modal. Selain itu, kinerja positif investasi juga tecermin dari penyaluran kredit investasi yang tetap tumbuh tinggi mencapai 30,80% (yoy) (Grafik 1. 10).

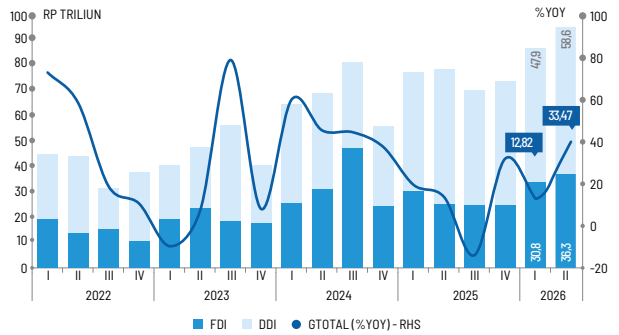

Sumber: DPMPTSP DKI Jakarta, diolah

Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi PMA PMDN

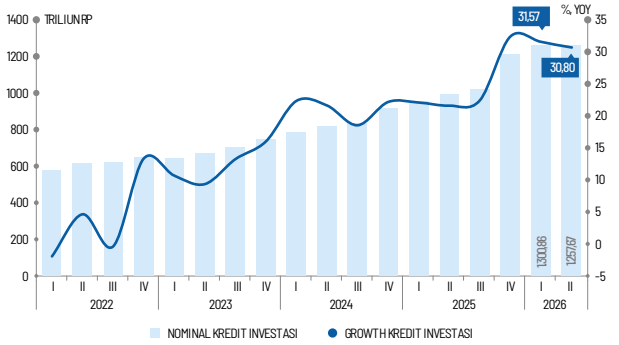

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Investasi di Jakarta

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah tumbuh menguat pada triwulan II 2026 dan menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 14,70% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,22% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, andil konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 sebesar 2,37% (Grafik 1. 5). Menguatnya kinerja konsumsi pemerintah terutama bersumber dari sisi APBN, sejalan dengan akselerasi realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial di triwulan II 2026 yang telah mencapai 64,98% dan 58,34% dari pagu. Pencapaian ini lebih tinggi dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (Tabel 1. 4).

Tabel 1.4 Realisasi APBN terhadap pagu

REALISASI APBN TERHADAP PAGU	TW II 2025	TW II 2026
Belanja Barang	31,89%	64,98%
Belanja Modal	47,15%	47,06%
Belanja Bantuan Sosial	36,11%	58,34%

Net Ekspor

Pada triwulan II 2026, neraca perdagangan luar negeri DKI Jakarta mencatat defisit net ekspor USD15,11 miliar, lebih dalam dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD11,43 miliar (Grafik 1. 11). Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui Jakarta tumbuh sebesar 7,92%

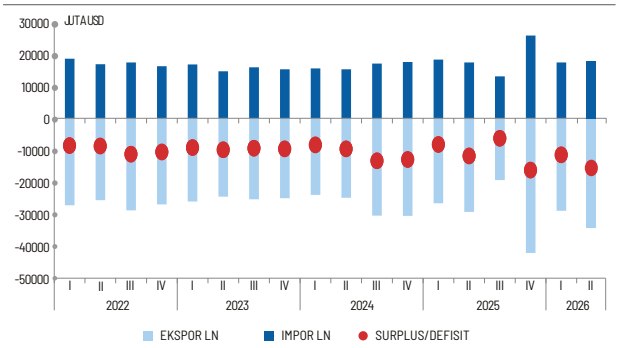

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 1.11 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta

(yoy) pada triwulan II 2026, menguat dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,76% (yoy). Sejalan dengan kinerja Ekspor, kinerja Impor luar negeri melalui Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,05% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,78% (yoy).

Ekspor

Kinerja ekspor tumbuh menguat pada triwulan II 2026. Pertumbuhan ekspor tercatat sebesar 9,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya (8,98% yoy) sehingga memberikan andil pertumbuhan sebesar 6,38% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta (Grafik 1. 4 dan Grafik 1. 5). Penguatan ekspor terutama didorong oleh pertumbuhan kinerja ekspor komoditas unggulan Jakarta, antara lain Mesin dan Peralatan Listrik, Lemak dan Minyak Hewan/Nabati, serta Kendaraan dan Bagiannya (Grafik 1. 12). Selain itu, ekspor jasa juga mencatatkan kinerja positif, tecermin dari pertumbuhan rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1. 13).

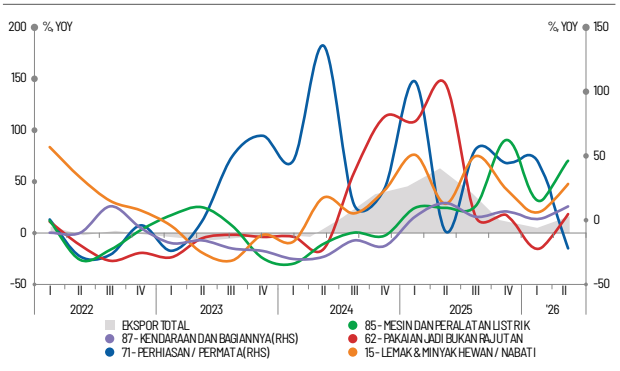

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Jakarta

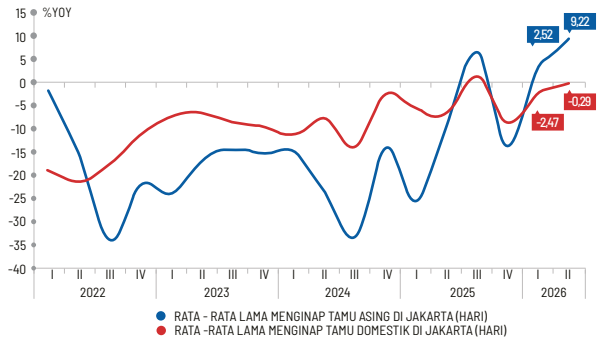

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Domestik

Impor

Kinerja impor tumbuh menguat pada triwulan II 2026 sebesar 10,52% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (7,21% yoy). Kenaikan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, meliputi barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku (Grafik 1. 14). Bahan baku menunjukkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 22,83% (yoy), diikuti barang modal yang tumbuh sebesar 9,25% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, total impor DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,17% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, impor berdasarkan komoditas juga menunjukkan kinerja positif. Komoditas dengan pertumbuhan tertinggi, antara lain Plastik dan Barang Plastik Lainnya (49,45%; yoy), Bahan Kimia Organik (43,49%; yoy), Besi dan Baja (26,20%; yoy), serta Mesin dan Peralatan Listrik (26,01%; yoy) (Grafik 1. 15).

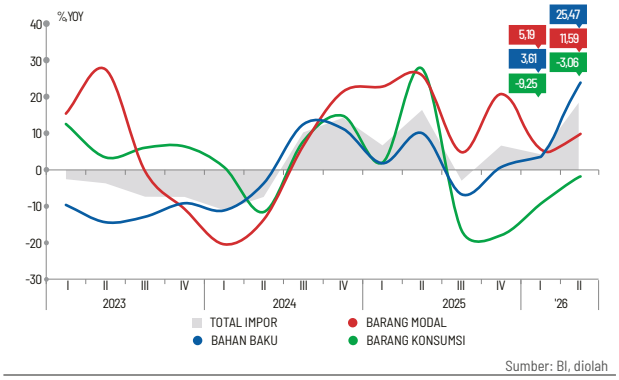

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.14 Pertumbuhan Nilai Impor DKI Jakarta

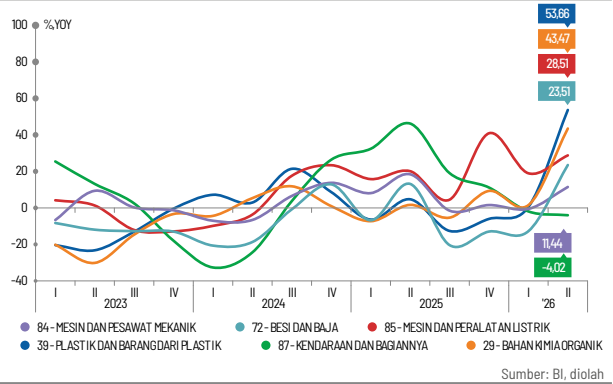

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama DKI Jakarta

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi Lapangan Usaha utama DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2026 terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Konstruksi, seiring dengan momentum HBKN Iduladha, pelaksanaan berbagai *event* besar dan MICE, seperti Pekan Raya Jakarta (PRJ) serta rangkaian HUT Jakarta ke-499. Selain itu, pertumbuhan juga didorong oleh meningkatnya *output* konstruksi dan penyelesaian berbagai proyek strategis di Jakarta. Pertumbuhan ekonomi juga turut ditopang oleh LU utama lainnya, seperti LU Industri Pengolahan yang tumbuh meningkat. Selain LU utama dan LU yang berkontribusi besar, LU lainnya seperti LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Jasa Perusahaan dan LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) tetap tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta (Grafik 1. 16 dan Grafik 1. 17). Pada triwulan II 2026, LU Perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Jakarta, disusul oleh LU Jasa Keuangan, LU Konstruksi, LU Industri Pengolahan, dan LU Infokom dengan porsi masing-masing sebesar 18,24%; 11,16%; 10,84%; 10,80%, dan 9,23% (Grafik 1. 16).

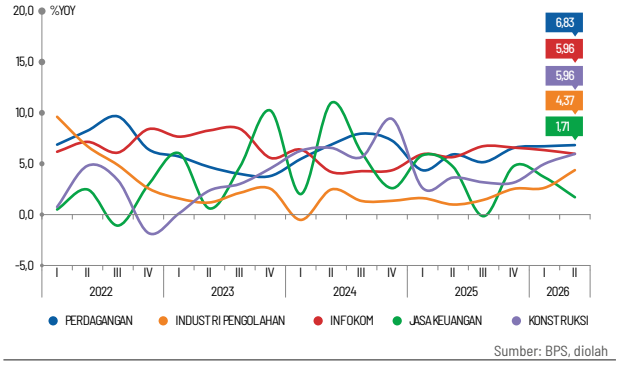

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama

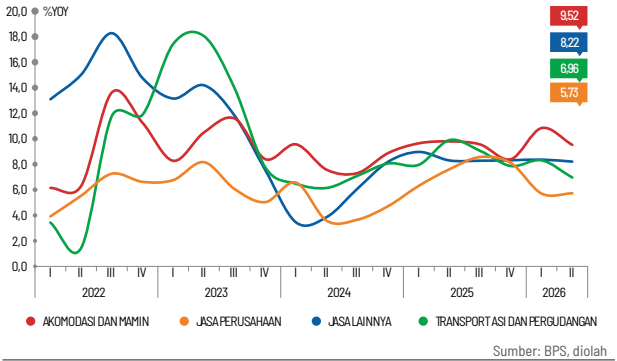

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan

LU utama tersebut di atas juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan laporan, utamanya LU Perdagangan, LU Infokom, dan LU Konstruksi yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 1,10% (yoy); 0,82% (yoy); dan 0,62% (yoy) (Grafik 1. 19). Masih kuatnya pertumbuhan pada

ketiga sektor ekonomi utama tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan *output* konstruksi dan penyelesaian beberapa proyek, peningkatan wisman dan wisnus tujuan Jakarta, serta peningkatan aktivitas MICE dan event yang diselenggarakan di Jakarta pada triwulan laporan. Selain itu, peningkatan nilai transaksi *e-commerce* menunjukkan peningkatan aktivitas platform digital yang berdampak pada tingginya pertumbuhan LU Infokom pada triwulan laporan. Selanjutnya, pada LU lainnya seperti LU Penyediaan Akmamin, LU Jasa Perusahaan, dan LU Transportasi & Pergudangan, juga turut memberikan kontribusi tinggi masing-masing sebesar 0,49% (yoy), 0,49% (yoy), dan 0,30% (yoy) (Grafik 1. 19). Hal ini disebabkan tingginya mobilitas dan permintaan domestik untuk sektor HOREKA pada momentum HBKN Iduladha dan pelaksanaan berbagai *event* dan MICE, yang meningkatkan kinerja ketiga LU tersebut.

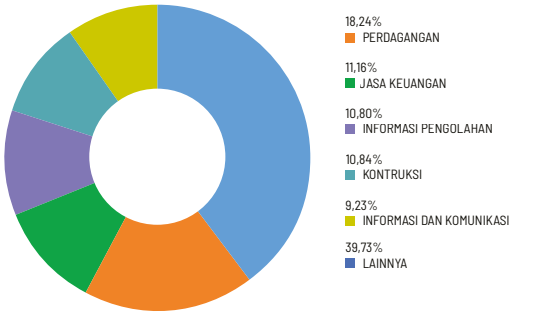

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.18 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan II 2026

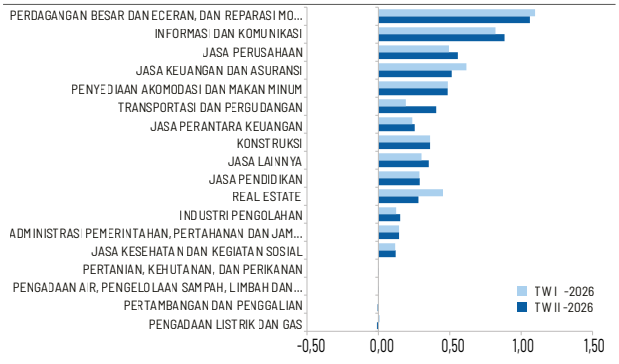

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.19 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 6,83% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,71% (yoy) (Grafik 1. 18). Peningkatan tersebut ditopang oleh maraknya pelaksanaan kegiatan event besar, MICE, serta belanja pemerintah untuk kebutuhan program prioritas. Hal ini tecermin dari perkembangan indeks penjualan eceran yang tumbuh tinggi pada triwulan II 2026, dengan nilai pertumbuhan total penjualan sebesar 8,90% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya (-1,50% yoy) (Grafik 1. 20). Selain itu, survei konsumen masih menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan nilai indeks kondisi ekonomi saat ini triwulan II 2026 pada kisaran optimis sebesar 134,97, walaupun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (136,43) (Grafik 1. 21).

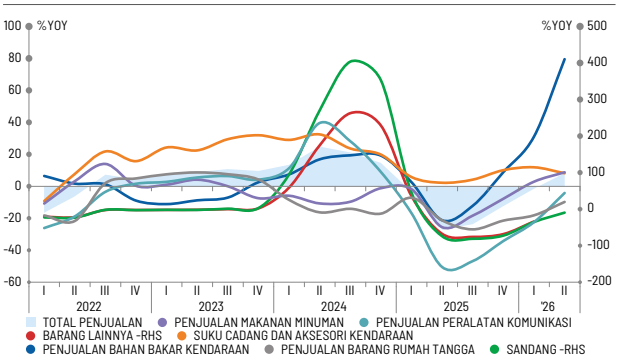

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta

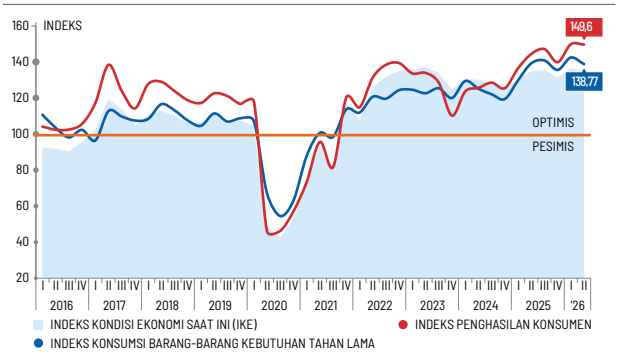

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen

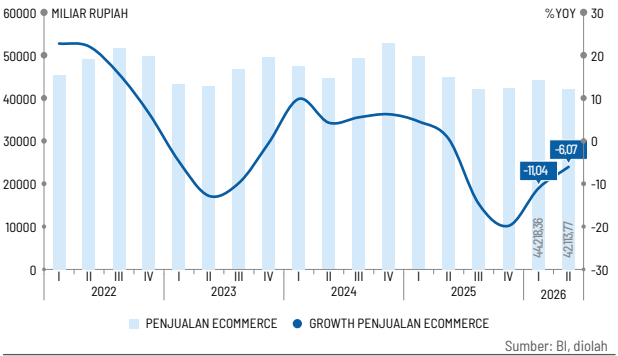

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.22 Perkembangan Penjualan E-Commerce di Jakarta

Dari sisi digitalisasi, kinerja perdagangan juga didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan secara digital via platform *e-commerce*, yang menunjukkan kontraksi pertumbuhan sebesar 6,07% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,04% (yoy) (Grafik 1. 22). Peningkatan kinerja

e-commerce salah satunya disebabkan momentum HBKN Iduladha serta penyaluran gaji ke-13 ASN yang mendorong daya beli masyarakat DKI Jakarta.

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) pada triwulan II 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,93% (yoy) meskipun tidak sekuat pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 6,33% (yoy) (Grafik 1. 23). Pertumbuhan LU Infokom DKI Jakarta pada triwulan II 2026 terpantau tetap kuat, ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi konektivitas, penetrasi internet nasional meningkat signifikan mencapai 229 juta pengguna atau sekitar 80,66% dari total populasi pada pertengahan 2025, naik dari 212 juta pengguna pada awal tahun. Jakarta tercatat memiliki tingkat penetrasi tertinggi, yaitu mencapai 91,35% (Survey APJII, 2025). Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut turut didukung oleh Jakarta sebagai pusat teknologi nasional dengan infrastruktur digital yang semakin matang. Salah satu contohnya pada Mei 2025, Microsoft resmi membuka *region cloud* pertama di Indonesia (Indonesia Central) yang berpusat di Jakarta, sebagai bagian dari rencana investasi sebesar USD1,7 miliar tahun 2024–2028 untuk infrastruktur AI dan *cloud* di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sektor infokom merupakan salah satu sektor dengan nilai investasi terbesar di Jakarta sepanjang tahun 2025. Beberapa contoh investasi besar di sektor ini antara lain: ekspansi jaringan oleh operator seluler (Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata) untuk meningkatkan kapasitas 4G/5G; investasi perusahaan *tech giants* global (selain Microsoft, Google dan Amazon) juga telah membuka *region cloud/data center* di sekitar Jakarta; serta maraknya pendanaan *startup* di ekosistem digital Jakarta (*fintech, e-commerce, ride-hailing, edutech* dan lainnya yang berbasis di ibu kota). Momentum ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor Infokom di Jakarta tidak hanya ditopang oleh tren peningkatan konektivitas internet, tetapi juga diperkuat oleh ekosistem infrastruktur digital yang semakin siap, daya beli masyarakat yang terjaga, serta intensitas kegiatan masyarakat yang memacu permintaan terhadap layanan digital, yang salah satunya tecermin dari membaiknya indeks penjualan peralatan komunikasi, dari triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 2,91% (yoy), pada triwulan II 2026 mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 8,81% (yoy) (Grafik 1. 24).

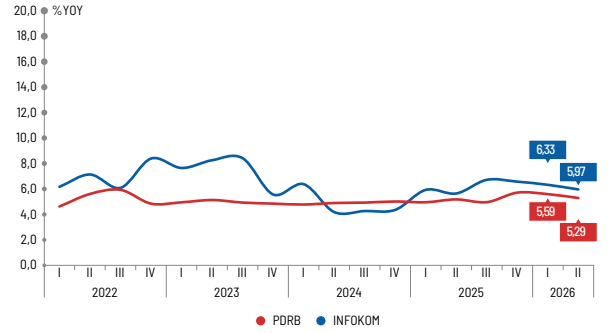

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta

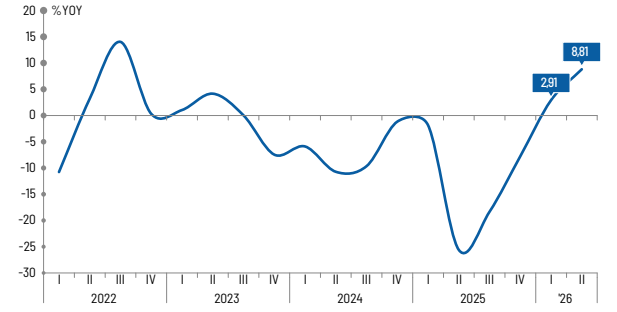

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi Jakarta

Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan II 2026 memberikan andil sebesar 0,62% pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 5,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (4,98%; yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi tecermin dari tingginya pertumbuhan kredit konstruksi yang tumbuh signifikan pada triwulan II 2026 sebesar 106,28% (yoy), walaupun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (113,73%; yoy) (Grafik 1. 25). Selain itu, pertumbuhan juga didukung oleh perbaikan kinerja pengadaan semen pada triwulan II 2026 yang tumbuh sebesar 49,82% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 13,42% (yoy) (Grafik 1. 26).

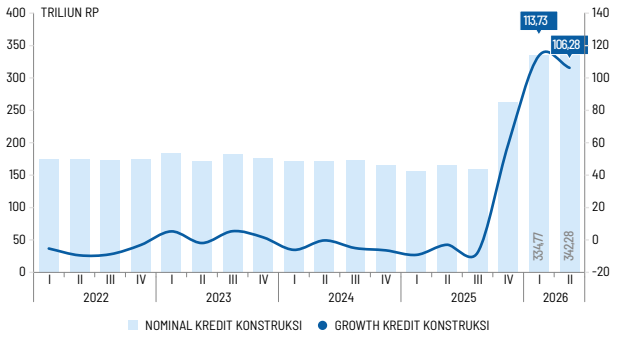

Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Jakarta

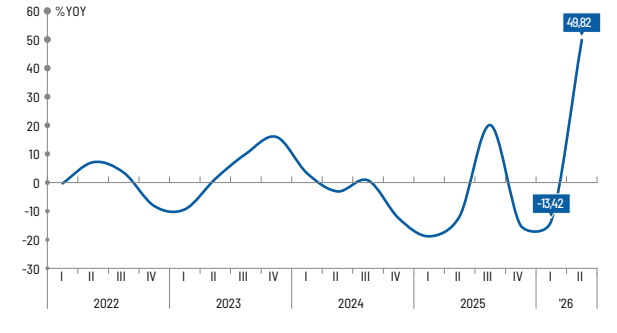

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.26 Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta

Selanjutnya, masih kuatnya kinerja LU Konstruksi di Jakarta diiringi dengan beberapa proyek strategis pemerintah maupun swasta yang masih berlanjut pada triwulan II 2026, diantaranya: Proyek MRT fase 2 dan 3, TOD, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment, Mandiri IT Tower - Bumi Slipi Jakarta, *pedestrian shelter redevelopment* dan *green shelter electricity* TransJakarta, hingga Fatmawati Mixed Used MRT Jakarta. Pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Selain itu, terdapat 9 (sembilan) proyek PT PP dengan status *on going* dan persiapan di Jakarta, yaitu: (i) tanggul pantai/laut dengan nama proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD); (ii) Jakarta Sewerage System yang masih dalam proses konstruksi; serta (iii) 7 ruas jalan tol, yang mana 4 diantaranya sedang proses konstruksi dan 3 lainnya masih tahap persiapan (proses pembebasan lahan), (Kementerian PUPR).

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Sebagai salah satu LU utama, LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan II 2026 dengan andil terhadap pertumbuhan triwulan II 2026 sebesar 0,45%, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,37% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (2,62%; yoy). Peningkatan ini ditopang oleh meningkatnya kinerja ekspor komoditas industri pada triwulan II 2026, diantaranya: ekspor berbagai produk kimia, mesin dan peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, lemak & minyak hewan/nabati, pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan (Grafik 1. 27). Peningkatan juga diikuti oleh kenaikan impor bahan baku yang tumbuh positif sebesar 25,47% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dari triwulan I 2026 yang tumbuh 3,61% (yoy) (Grafik 1. 28).

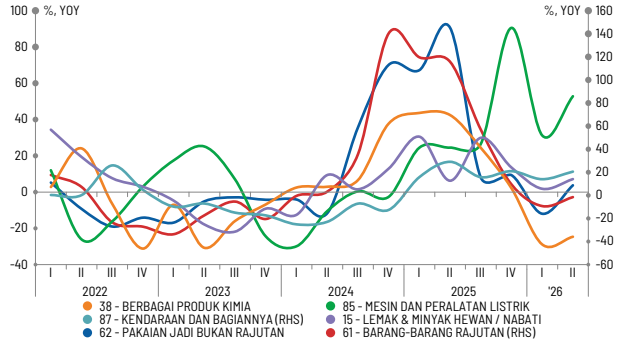

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.27 Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta

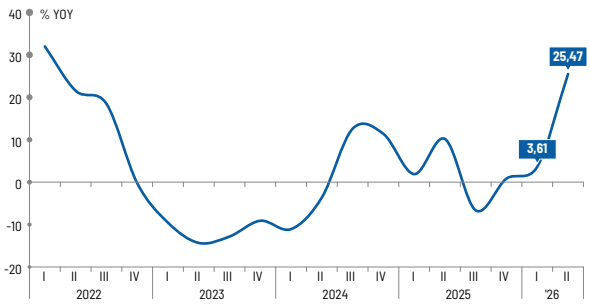

Sumber: Kubus Impor, DSta

Grafik 1.28 Perkembangan Impor Bahan Baku DKI Jakarta

Lapangan Usaha Jasa Keuangan

Pada triwulan II 2026, LU Jasa Keuangan memberikan andil sebesar 0,19% terhadap pertumbuhan PDRB pada triwulan laporan. LU Jasa Keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,68% (yoy). (Grafik 1. 16). Kendati demikian, kinerja penyaluran kredit di DKI Jakarta tetap kuat, dengan nilai penyaluran kredit total pada triwulan II 2026 yang tumbuh kuat sebesar 19,36% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,67% (yoy) (Grafik 1. 29). Lebih lanjut, jika dilihat dari jenis penggunaannya, peningkatan kredit utamanya didorong oleh kinerja penyaluran kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 15,42% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (11,26%; yoy). Sedangkan, kredit investasi dan konsumsi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 30,80% (yoy) dan 1,21% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,57% (yoy) dan 4,40% (yoy) (Grafik 1. 30). Adapun secara sektoral, kuatnya kinerja penyaluran kredit terutama dipengaruhi peningkatan kredit ke sektor-sektor utama DKI Jakarta di triwulan laporan. (Grafik 1. 31).

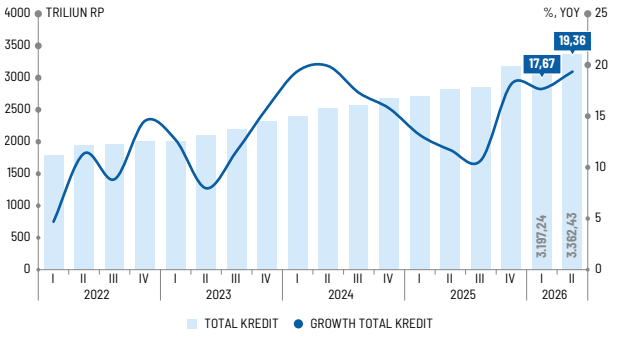

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.29 Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta

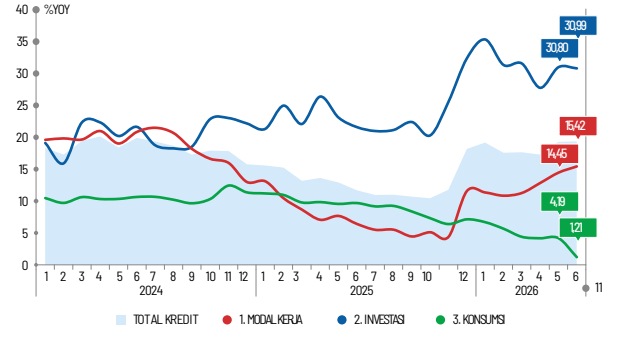

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.30 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta

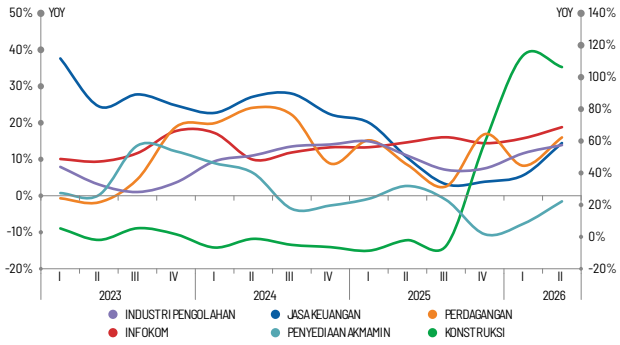

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.31 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha DKI Jakarta

Selanjutnya dari sisi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jakarta, pada triwulan II 2026 tumbuh kuat sebesar 13,76% (yoy), namun masih di bawah pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,45% (yoy). Hal ini diiringi perlambatan pertumbuhan untuk jenis kepemilikan DPK Pemerintah, DPK Korporasi dan DPK Rumah Tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 36,17% (yoy), 11,55% (yoy), dan 2,24% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 44,05% (yoy), 19,65% (yoy), dan 3,18% (yoy) (Grafik 1. 33). Dari sisi kepemilikan rekening, melambatnya perkembangan DPK di Jakarta utamanya disebabkan perlambatan pada rekening giro dan tabungan rumah tangga di Jakarta yang tumbuh pada triwulan II 2026 sebesar 13,76% (yoy) dan 7,81% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,45% (yoy) dan 20,70% (yoy). Sedangkan, DPK rekening deposito tumbuh 21,55% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (21,16%; yoy) (Grafik 1. 34).

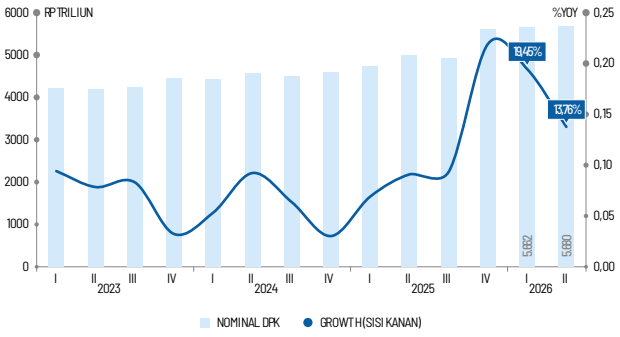

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.32 Perkembangan DPK di Jakarta

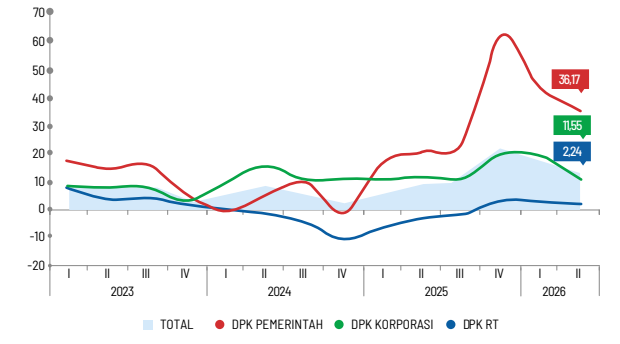

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.33 Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan

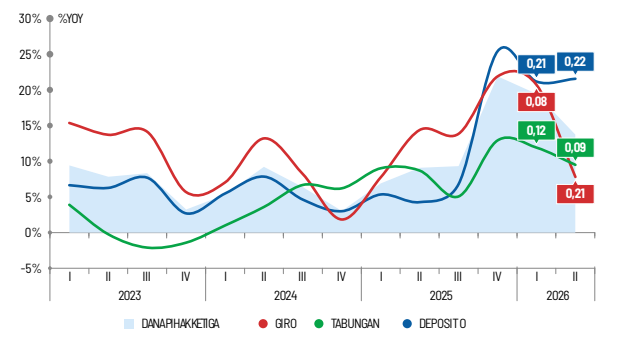

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.34 Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan

LU Penyediaan Akmamin dan LU Jasa Perusahaan memberikan andil pertumbuhan pada perekonomian Jakarta masing-masing sebesar 0,49% pada triwulan II 2026, dengan laju pertumbuhan sebesar 9,52% (yoy) dan 5,73% (yoy). Tingginya pertumbuhan tecermin dari indikator penjualan barang makanan dan minuman melalui indeks penjualan eceran pada komponen makanan dan minuman, yang tumbuh meningkat sebesar 6,22% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy) (Grafik 1. 35). Selain itu, peningkatan kinerja jasa perusahaan juga tecermin dari realisasi perkembangan kegiatan usaha LU Jasa Perusahaan yang meningkat sebesar 1,36%SBT, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,39%SBT (Grafik 1. 36).

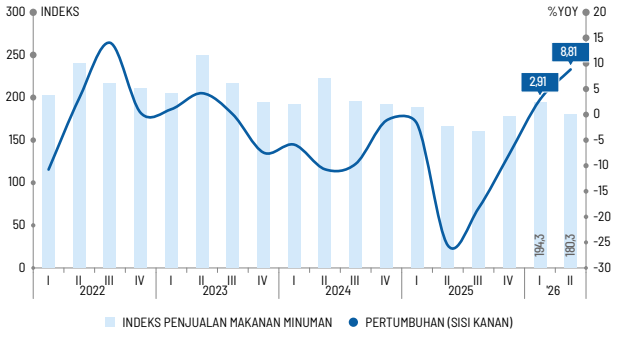

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.35 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran Komponen Makanan dan Minuman

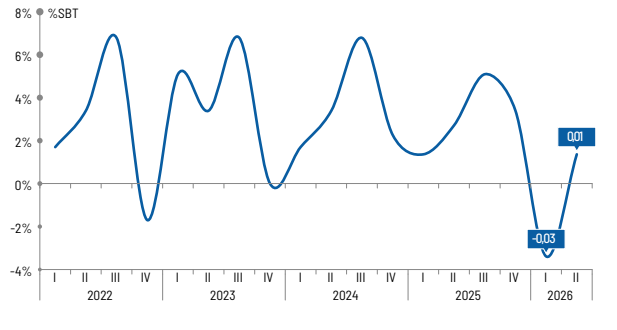

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.36 Perkembangan Kegiatan Usaha LU Jasa Perusahaan

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Transgud)

LU Transgud dengan andil 0,30% pada triwulan II 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,96% (yoy), nilai tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,31% (yoy). Pertumbuhan LU Transgud yang tertahan sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat setelah periode musim mudik dalam rangka HBKN Idulfitri. Hal ini tecermin dari perkembangan jumlah penumpang penerbangan dari Jakarta yang terkontraksi pada triwulan II 2026 sebesar 4,01% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,34% (yoy) (Grafik 1. 37).

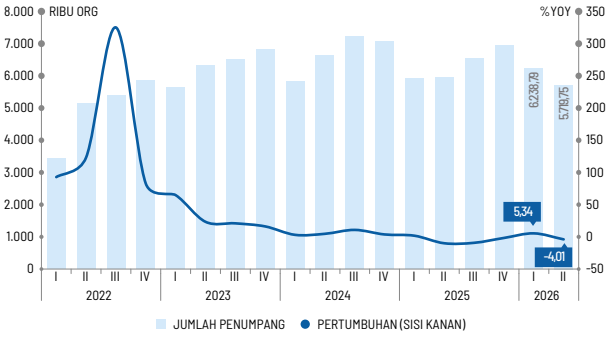

Grafik 1.37 Perkembangan Jumlah Penumpang Penerbangan dari Jakarta

B. *TRACKING* PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III 2026

Pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan tetap kuat pada triwulan III 2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT diperkirakan tetap terjaga seiring maraknya penyelenggaraan *event* dan MICE, investasi proyek strategis pemerintah dan swasta terakselerasi, serta konsumsi pemerintah tetap kuat seiring berlanjutnya program-program prioritas pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha, LU Konstruksi, LU Jasa Keuangan, serta LU Infokom diprakirakan akan menguat di tengah LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan yang termoderasi.

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi RT, investasi, dan konsumsi pemerintah. Permintaan domestik diperkirakan tetap terjaga seiring maraknya diskon dan penyelenggaraan *event*. Investasi diperkirakan terakselerasi seiring berlanjutnya proyek prioritas pemerintah dan swasta yang bersifat *multiyears*. Lebih lanjut, konsumsi pemerintah diperkirakan tetap kuat seiring percepatan implementasi program-program prioritas pemerintah. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor diprakirakan tumbuh terbatas sejalan dinamika ketidakpastian ekonomi global dan berlanjutnya konflik geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global.

Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi RT diprakirakan tetap terjaga pada triwulan III 2026. Kinerja konsumsi RT diprakirakan tetap tumbuh positif meski tidak setinggi triwulan II 2026. Hal ini seiring dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya libur sekolah pada bulan Juli 2026 serta terbatasnya jumlah hari libur nasional dan cuti bersama. Meski demikian, kinerja konsumsi RT tetap terjaga sejalan dengan maraknya penyelenggaraan *event* pada momentum kegiatan HUT RI, serta konser, pameran, MICE, dan aktivitas *leisure* menahan perlambatan konsumsi lebih dalam.

Kinerja konsumsi RT pada triwulan III 2026 diperkirakan tetap terjaga, antara lain tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada bulan Juli yang tetap berada pada level optimis (Grafik 1. 38). Lebih lanjut, penjualan otomotif khususnya mobil pada Juli tumbuh sebesar 33,33% (yoy), lebih tinggi dari bulan Juni yang tumbuh 32,88% (yoy) (Grafik 1. 39). Hal tersebut mengindikasikan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertahan oleh normalisasi permintaan masyarakat yang tecermin pada indeks total penjualan eceran pada bulan Juli yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,59% (yoy), melambat dari pertumbuhan pada Juni yang tumbuh sebesar 6,82% (yoy) (Grafik 1. 40).

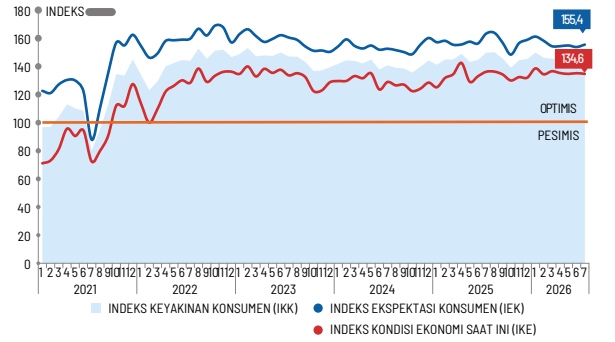

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.38 Perkembangan IKK, IEK, IKE Jakarta

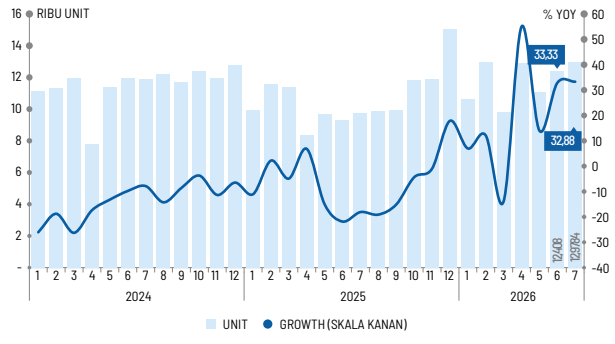

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.39 Penjualan Mobil di Jakarta

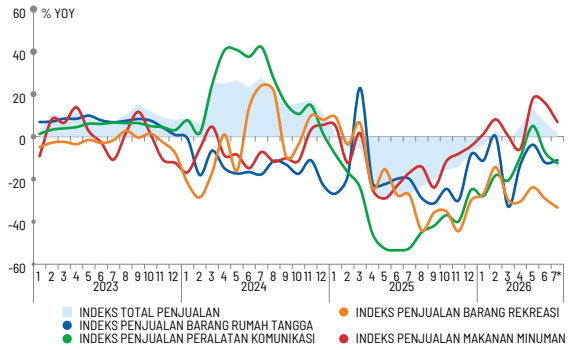

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.40 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kinerja PMTB pada triwulan III 2026 diperkirakan tumbuh menguat. Perkiraan ini terutama didorong oleh berlanjutnya proyek infrastruktur strategis pemerintah dan swasta seperti MRT, LRT, TOD, jalan tol, proyek pengendalian banjir dan fasilitas publik yang didukung dengan kegiatan promosi perdagangan. Kondisi tersebut tecermin dari survei kegiatan dunia usaha (SKDU) memasuki triwulan III 2026 menunjukkan tren membaik dengan saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 40,79%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 35,15% (Grafik 1. 41). Prakiraan ini selanjutnya juga didukung oleh peningkatan impor barang modal pada Juni 2026 yang berada pada tren meningkat dengan pertumbuhan sebesar 15,92% (yoy), melanjutkan pertumbuhan di bulan sebelumnya yang mencapai 11,13% (yoy) (Grafik 1. 42). Kredit investasi pada Juli 2026 juga berada pada tren yang menguat dengan pertumbuhan mencapai 31,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 30,80% (yoy) (Grafik 1. 43).

Meningkatnya PMTB juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta, antara lain:

- Proyek Jalan Tol Harbour Road II (Ancol Timur–Pluit) sepanjang 9,67 km dengan nilai proyek mencapai Rp5,22 triliun terus dikebut dengan progres konstruksi mencapai 44,12% per Agustus dan target operasional penuh pada 2027.
- Pembangunan MRT Fase 2A yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer pembangunannya telah mencapai 62,68% dengan rencana penyelesaian seluruh pekerjaan sipil pada akhir 2027.
- Pembangunan *Flyover* Latumenten sepanjang sekitar 380 meter di Jakarta Barat masih berlanjut dengan *progress* terakhir di Juli mencapai 55,2% dengan target penyelesaian pada akhir 2026 guna mengurangi kemacetan di kawasan Grogol.
- Normalisasi Kali Cakung Lama sepanjang 2,65 km yang terbagi dalam tiga segmen telah masuk dalam tahap kontruksi dengan progres pembangunan mencapai sekitar 25% yang ditargetkan rampung secara keseluruhan pada 2028.
- Pembangunan sistem tata air dan empat rumah pompa di koridor Daan Mogot, Jakarta Barat yang dimulai sejak Januari 2026 terus berlanjut hingga Juli 2026 dengan target penyelesaian pada Agustus 2027 guna mendukung pengendalian banjir kawasan Jakarta Barat.
- Proyek normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang total 33 km terus berlanjut dengan progres mencapai sekitar 17 km atau 52% hingga Mei 2026.
- Sebanyak 27 BAST fasilitas sosial/fasilitas umum diserahterimakan pengembang kepada Pemprov, terdiri atas lahan 224.969 m^2, konstruksi 81.803 m^2 dan konversi RSM/S. Ini menunjukkan penyelesaian kewajiban investasi/pembangunan pengembang yang telah berjalan.
- Revitalisasi Taman Semanggi senilai Rp134 miliar yang dilakukan secara kolaboratif bersama PT Media Indra Buana melalui skema pembiayaan kreatif berbasis hak penamaan (*naming rights*) masih berlanjut sejak Feb'26 dengan target selesai sebagian pada 2026 dan 2027.

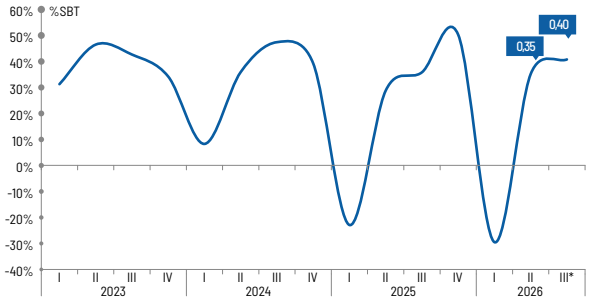

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.41 Perkembangan SKDU

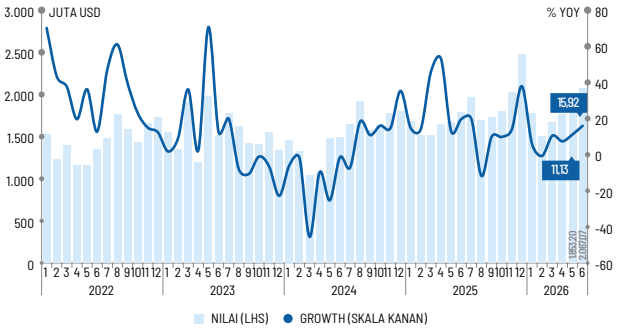

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.42 Nilai Impor Barang Modal

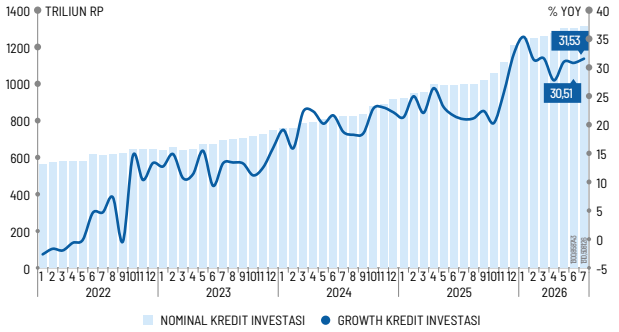

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.43 Perkembangan Kredit Investasi Jakarta

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah diprakirakan tetap tumbuh positif meski termoderasi dari triwulan II 2026. Perlambatan tersebut sejalan dengan normalisasi setelah tingginya belanja pemerintah pada triwulan II 2026, termasuk pembayaran gaji ke-13 ASN dan pelaksanaan berbagai program pemerintah. Dari sisi APBD, eksekusi belanja pemerintah masih tertahan. Realisasi belanja daerah baru mencapai 40,18% dari pagu hingga akhir Juli, sementara belanja modal baru 8,49% dari pagu (Grafik 1. 44). Kondisi ini meningkatkan risiko sebagian realisasi bergeser ke triwulan IV 2026. Lebih lanjut, efisiensi belanja nonprioritas pemerintah pusat berpotensi membatasi belanja perjalanan dinas, rapat, seremoni, dan kegiatan pendukung lainnya yang banyak terealisasi di Jakarta. Meski demikian, belanja K/L di Jakarta tetap menjadi penopang konsumsi pemerintah, terutama melalui belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sejalan dengan peran Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintah (Grafik 1. 45).

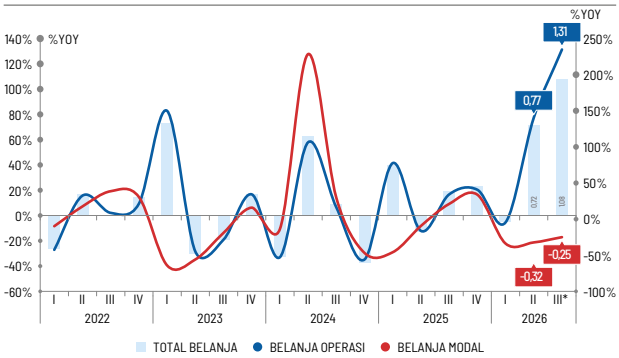

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 1.44 Realisasi Belanja APBD di Jakarta

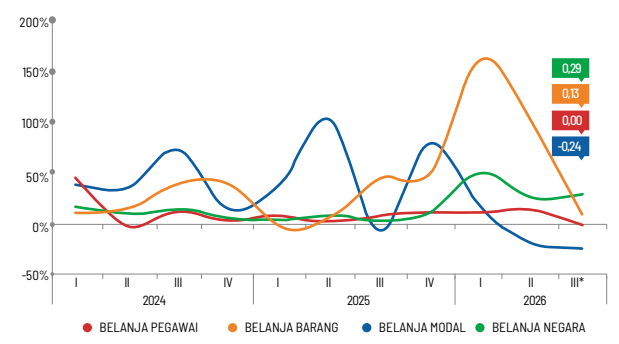

Sumber: DJPb DKI Jakarta, diolah

Grafik 1.45 Realisasi APBN DKI Jakarta

Ekspor

Kinerja ekspor pada triwulan III 2026 diprakirakan tetap tumbuh kuat meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor tetap kuat, namun berpotensi tertahanan seiring pelemahan permintaan global dan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok. Pelemahan kinerja ekspor juga disebabkan oleh prospek pelemahan ekspor otomotif khususnya ke Jepang karena adanya regulasi homologasi baru pada triwulan III 2026. Hal ini tecermin dari pertumbuhan ekspor mobil DKI Jakarta jenis CBU dan CKD yang terkontraksi sebesar 10,93% (yoy) pada bulan Juli 2026 (Grafik 1. 46). Secara keseluruhan, total nilai ekspor terkontraksi sebesar 3,18% (yoy) pada Juni 2026, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang terkontraksi 1,50% (yoy) (Grafik 1. 47)

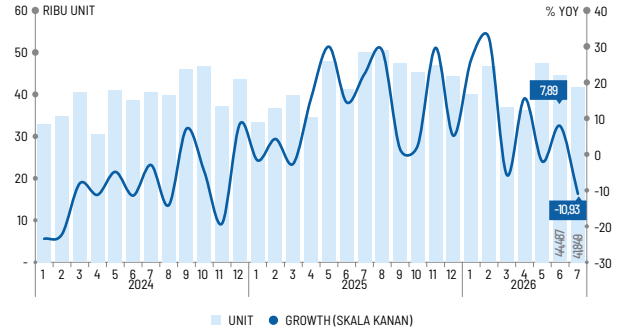

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.46 Ekspor Mobil CBU dan CKD

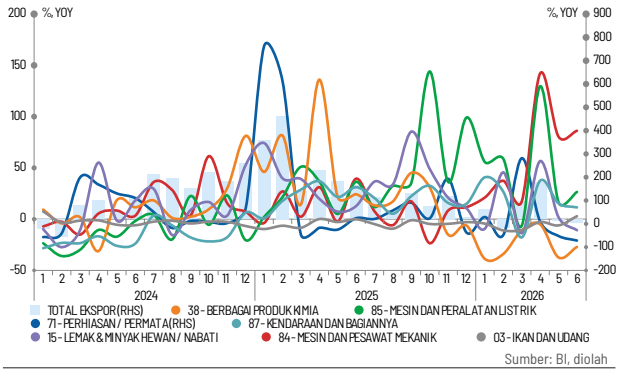

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.47 Perkembangan Nilai Ekspor Jakarta

Impor

Kinerja impor pada triwulan III 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi. Meningkatnya kinerja impor sejalan dengan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi dan investasi, serta tetap kuatnya permintaan terhadap barang dan jasa impor. Tren peningkatan impor tecermin pada total nilai impor Jakarta yang tumbuh sebesar 23,83% (yoy) pada Juni 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,79% (yoy) (Grafik 1. 48). Seluruh komponen impor juga tumbuh meningkat, kecuali impor barang konsumsi. Impor barang modal tumbuh 15,92% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (11,13%; yoy). Impor

bahan baku tumbuh 30,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 17,62% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, impor jasa turut menunjukkan peningkatan, tecermin dari jumlah penumpang yang terbang keluar dari Jakarta pada Juni 2026 meski masih terkontraksi sebesar 0,85% (yoy), namun lebih baik dari bulan sebelumnya (-5,35%; yoy) (Grafik 1. 49).

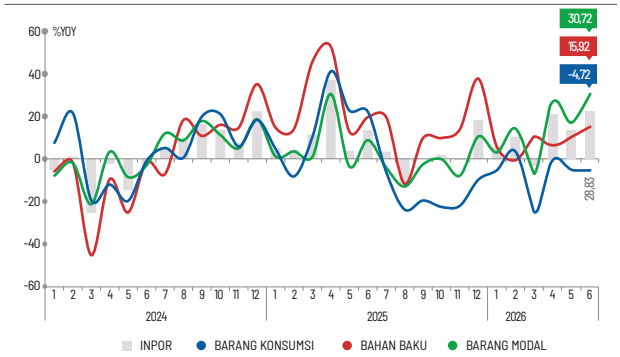

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.48 Perkembangan Impor Jakarta dan Komponennya

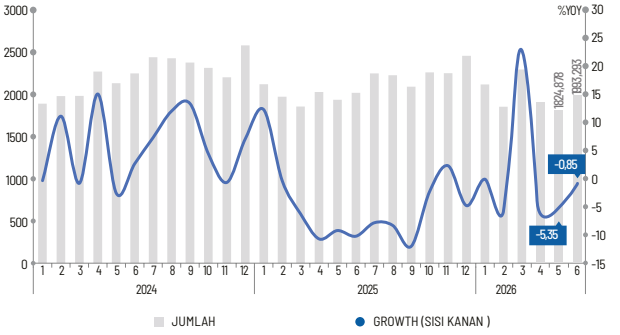

Sumber: Angkasa Pura, diolah

Grafik 1.49 Perkembangan Penumpang Penerbangan dari Jakarta

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Pada triwulan III 2026, **LU Perdagangan** diprakirakan akan tumbuh kuat, walaupun tidak setinggi periode sebelumnya seiring normalisasi pasca momentum HBKN dan periode libur yang panjang. Kuatnya kinerja perdagangan didukung dengan nilai Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) sektor perdagangan yang menunjukkan peningkatan dengan nilai 4,60% SBT, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,45% SBT) (Grafik 1. 50). Kendati demikian, peningkatan kinerja lebih lanjut tertahan seiring penurunan indeks penjualan eceran pada bulan Juli 2026 yang tumbuh sebesar 1,59% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya (6,82%; yoy). Masih kuatnya aktivitas perdagangan, juga terindikasi dari penjualan mobil pada Juli 2026 yang meningkat dengan pertumbuhan 33,33% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (32,88%; yoy).

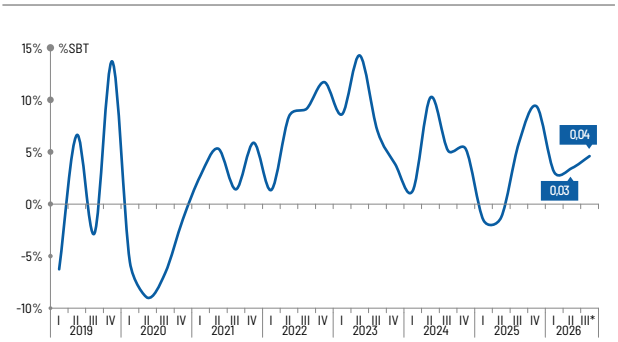

Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.50 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta (Triwulan III 2026)

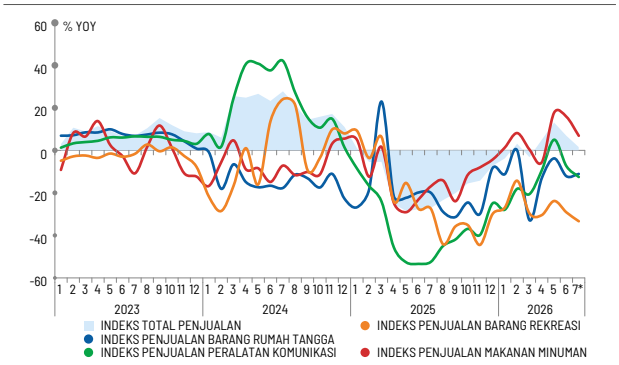

Sumber: Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 1.51 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta (Triwulan III 2026)

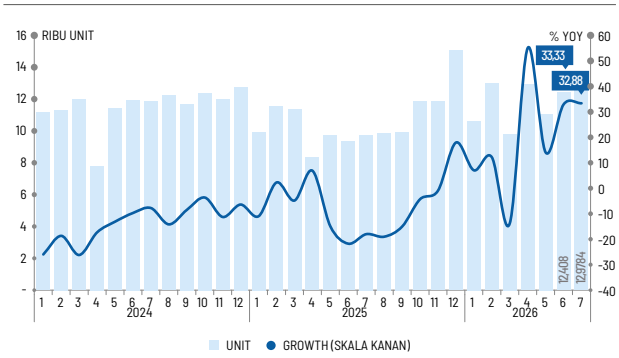

Sumber: GAIKINDO

Grafik 1.52 Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta (Triwulan III 2026)

Selanjutnya, **LU Jasa Keuangan** pada triwulan III 2026 diprakirakan mengalami pertumbuhan yang meningkat dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh tingginya penyaluran kredit di DKI Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 20,79% (yoy) pada Juli 2026, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya (19,36%; yoy). Selain itu, pertumbuhan kredit untuk beberapa LU Utama Jakarta mencatatkan peningkatan/pertumbuhan yang kuat, diantaranya kredit industri pengolahan dan konstruksi yang pada Juli 2026 tumbuh masing-masing sebesar 25,41% (yoy) dan 109,04% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (18,81%; yoy dan 106,28%; yoy). Selain itu, dari sisi DPK perbankan juga menunjukkan peningkatan,

pertumbuhan DPK pada Juli 2026 tercatat sebesar 15,84% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya (13,76%; yoy). Dari sisi kepemilikan rekening, pertumbuhan DPK yang tetap kuat utamanya ditopang oleh rekening korporasi dan pemerintah. Pertumbuhan DPK Korporasi dan pemerintah per Juli 2026 masing-masing tumbuh sebesar 12,82% (yoy) dan 42,47% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (11,55%; yoy dan 36,17%; yoy). Pertumbuhan DPK ini mengindikasikan likuiditas perbankan yang tetap kuat untuk menopang aktivitas jasa keuangan.

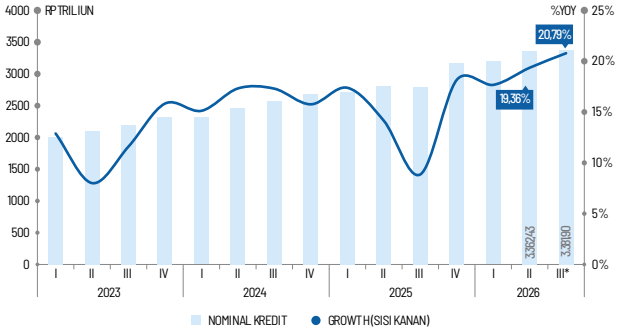

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.53 Perkembangan Penyaluran Kredit Jakarta (Triwulan III 2026)

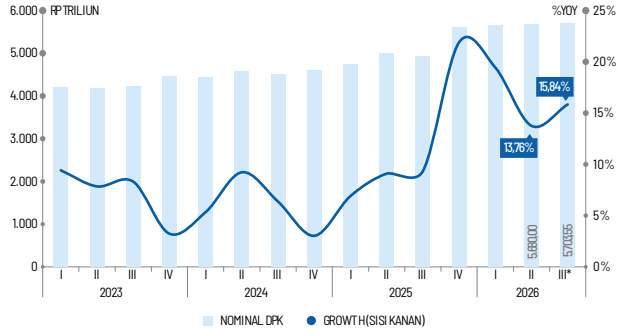

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.54 Perkembangan DPK di Jakarta (Triwulan III 2026)

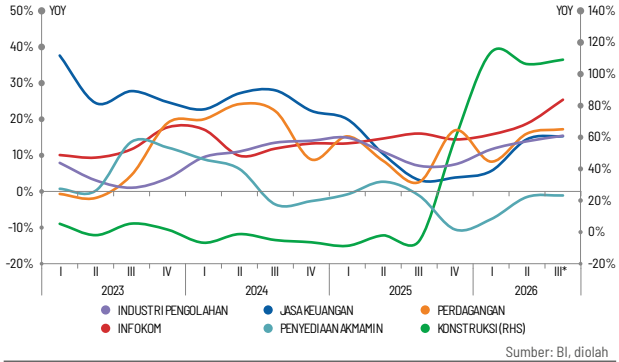

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.55 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Utama Jakarta (Triwulan III 2026)

LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi diprakirakan juga mengalami kinerja positif pada triwulan III 2026. Kinerja industri pengolahan diprakirakan sedikit mengalami normalisasi setelah kinerja yang kuat pada triwulan II 2026, tecermin dari perlambatan produksi mobil pada Juli 2026 yang tumbuh 5,44% (yoy), melambat dari bulan sebelumnya (18,02%; yoy) (Grafik 1. 56). Kendati demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh prakiraan kegiatan usaha melalui nilai SKDU sektor industri pengolahan yang meningkat dengan nilai sebesar 12,68% SBT dibandingkan bulan sebelumnya (8,45% SBT) (Grafik 1. 57). Selanjutnya, LU Konstruksi diprakirakan mengalami peningkatan kinerja, tecermin dari pertumbuhan kredit konstruksi pada Juli 2026, dengan jumlah Rp341,35 triliun dan tumbuh sebesar 109,04% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (106,28%; yoy) (Grafik 1. 58). Selain itu, prakiraan peningkatan kinerja sektor konstruksi juga didukung oleh meningkatnya SKDU sektor konstruksi untuk triwulan III 2026 dengan nilai sebesar 9,35% SBT, meningkat dari triwulan sebelumnya (4,67%; yoy) (Grafik 1. 59).

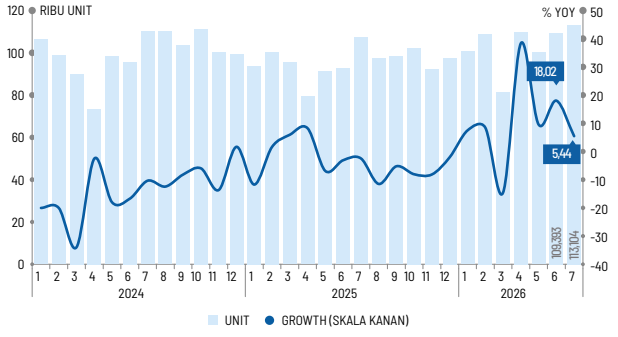

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.56 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri DKI Jakarta (Triwulan II 2026)

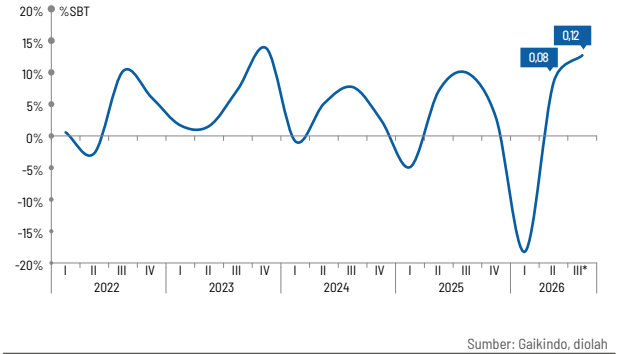

Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 1.57 Perkiraan SKDU LU Industri Pengolahan DKI Jakarta (Triwulan II 2026)

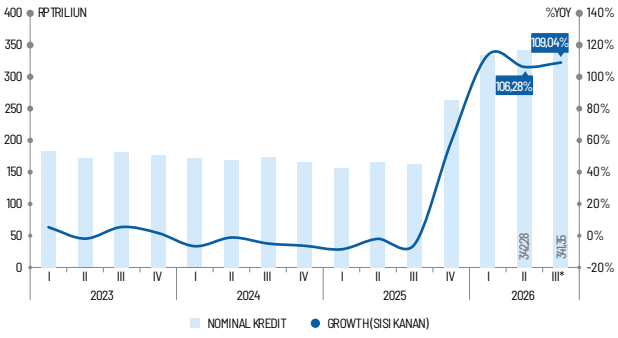

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.58 Perkembangan Kredit LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan II 2026)

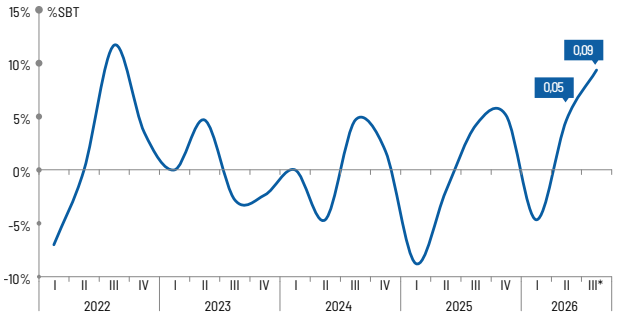

Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 1.59 Perkiraan SKDU LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan III 2026)

Selanjutnya, **LU Infokom** diperkirakan akan mengalami kinerja yang kuat pada triwulan III 2026 seiring membaiknya aktivitas transaksi transportasi *online* sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan aktivitas *e-commerce*. Nilai pertumbuhan indeks penjualan e-*commerce* di Jakarta membaik dari yang sebelumnya terkontraksi sedalam 12,52% (yoy), menjadi tumbuh positif 4,94% (yoy) (Grafik 1. 60).

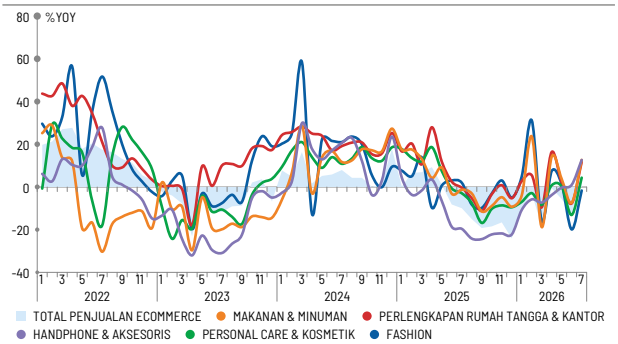

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.60 Perkembangan Indeks Penjualan *E-Commerce* di Jakarta (Triwulan III 2026)

Halaman ini sengaja dikosongkan

BOKS 1

Mendorong Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jakarta:

Penguatan Kelembagaan dan Insentif Pengembangan Industri Perfilman

Struktur ekonomi Jakarta terus bergeser ke sektor berbasis jasa. Pangsa sektor jasa meningkat dari 53,95% pada 2019 menjadi 55,87% pada 2025, sedangkan pangsa industri pengolahan turun dari 11,82% menjadi 10,58%. Ekonomi kreatif ikut berkembang dalam perubahan tersebut. Pada semester I 2025, ekonomi kreatif menyumbang 11,53% terhadap PDRB Jakarta dan tumbuh 9,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam lima tahun sebelumnya. Bagi Jakarta yang ditopang oleh konsumsi dan berbagai kegiatan jasa, ekonomi kreatif menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup sesuai dengan struktur ekonominya.

Di antara subsektor ekonomi kreatif, perfilman masih mempunyai basis yang relatif kecil. Dalam pemetaan PDRB pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta, subsektor Film-Animasi-Video mencatat kontribusi rata-rata sekitar 0,04% dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5,16%. Sementara itu, Lembaga Sensor Film mencatat 545 judul film layar lebar pada 2025, terdiri atas 270 film nasional dan 275 film impor. Aktivitas industri film nasional tersebut membuka peluang bagi Jakarta untuk mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai film, mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, distribusi hingga pemutaran.

Nilai ekonomi perfilman tidak berhenti pada penerimaan bioskop. Produksi film membutuhkan tenaga kreatif, peralatan dan studio, lokasi, akomodasi, katering, transportasi, logistik, jasa profesional, pembiayaan, serta layanan pascaproduksi. PwC Indonesia dan LPEM FEB UI (2023) mencatat *output multiplier* sektor film, animasi, dan video sekitar 1,38 kali. Keterkaitan tersebut cukup relevan bagi Jakarta. Pada triwulan II 2026, sektor Perdagangan, Jasa Keuangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Lainnya secara agregat mencakup sekitar 62% PDRB Jakarta. Sebagian besar kebutuhan produksi film beririsan langsung dengan kegiatan usaha tersebut.

Angka *multiplier* tersebut tetap perlu dibaca secara proporsional. Sebagai ilustrasi, belanja produksi Rp20 miliar dengan multiplier 1,38 secara aritmatika setara dengan sekitar Rp27,6 miliar output total. Perhitungan ini menggambarkan efek berantai dari belanja awal, bukan tambahan PDRB Jakarta. Manfaat yang diterima Jakarta bergantung pada berapa besar pengeluaran produksi yang benar-benar dibayarkan kepada kru, vendor, lokasi, hotel, katering, transportasi, maupun penyedia jasa lain di wilayah Jakarta. Karena itu, peningkatan aktivitas produksi akan lebih berarti apabila diikuti dengan *local value capture* yang lebih besar.

Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Jakarta Film Commission (JFC) sebagai bagian dari pengembangan ekosistem perfilman. JFC ditempatkan sebagai SBU Perfilman di bawah Jakarta Experience Board (JXB) dan menjalankan fungsi informasi, koordinasi, serta fasilitasi produksi. Beberapa layanan yang mulai disiapkan mencakup paket akomodasi *cast* dan *crew* melalui unit perhotelan JXB, pemanfaatan aset untuk produksi dan promosi, serta integrasi kebutuhan produksi melalui JFC. Dalam model ini, kebutuhan rumah produksi dapat dihubungkan dengan aset, unit usaha, perangkat daerah, BUMD, pengelola kawasan, komunitas, maupun mitra usaha. Pelibatan UMKM dan penyedia jasa lokal juga menjadi bagian yang dapat dikembangkan melalui layanan tersebut.

Dari sisi fiskal, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan untuk tontonan film nasional melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 dan 591 Tahun 2026. Keringanan ditetapkan sebesar 50% dan berlaku mulai masa pajak Juli 2026. Nilai keringanan yang tidak disetorkan kepada Pemprov diteruskan kepada produsen film nasional sesuai mekanisme yang ditetapkan. Kebijakan ini menambah instrumen dukungan bagi industri film nasional sekaligus melengkapi agenda transformasi Jakarta menjadi Kota Sinema.

Skema PBJT yang berjalan saat ini berangkat dari penayangan film nasional di bioskop Jakarta. Film penerima manfaat harus ditayangkan di bioskop wilayah DKI Jakarta dan menjadi objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Persyaratan tersebut belum secara langsung mengaitkan manfaat dengan jumlah hari produksi di Jakarta, penggunaan tenaga kerja atau vendor lokal, maupun besarnya *production spending* yang terjadi di Jakarta. Dukungan pada sisi penayangan dapat tetap berjalan, sementara pengembangan instrumen selanjutnya dapat lebih dekat dengan kegiatan produksi. Besarnya belanja produksi di Jakarta, penggunaan pekerja dan penyedia jasa lokal, serta lama produksi merupakan beberapa ukuran yang dapat dipertimbangkan agar manfaat kebijakan lebih banyak terserap dalam perekonomian Jakarta.

Penguatan layanan JFC dan basis data industri menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pelaku produksi membutuhkan pintu masuk yang jelas untuk memperoleh informasi lokasi, mengurus kebutuhan perizinan, dan terhubung dengan penyedia jasa yang tersedia di Jakarta. Di sisi lain, pencatatan mengenai jumlah produksi, hari produksi, tenaga kerja, vendor, lokasi, serta nilai belanja produksi masih diperlukan untuk melihat perkembangan industri secara lebih utuh. Data ini juga dibutuhkan untuk menilai apakah insentif dan layanan yang diberikan benar-benar menambah aktivitas produksi serta belanja lokal.

Jakarta sudah memiliki beberapa modal untuk mendorong kemajuan industri film: basis sektor jasa yang besar, ekosistem ekonomi kreatif, JFC, aset dan jaringan JXB, serta insentif fiskal yang mulai berjalan. Tantangannya sekarang lebih konkret, yaitu bagaimana meningkatkan kegiatan produksi dan memastikan bagian yang lebih besar dari belanja tersebut terserap oleh pekerja, UMKM, vendor, dan penyedia jasa di Jakarta. Jika itu dapat dilakukan, Jakarta Kota Sinema akan mempunyai dimensi ekonomi yang lebih jelas, bukan sekadar meningkatkan aktivitas perfilman, tetapi ikut menambah aktivitas usaha, kesempatan kerja, dan sumber pertumbuhan baru bagi Jakarta.

BOKS 2

Perkembangan dan Prospek Konsumsi Rumah Tangga Jakarta:

Tetap Tumbuh, Makin Selektif

Konsumsi rumah tangga DKI Jakarta masih bertumbuh, tetapi dorongannya mulai melemah. Data BPS menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,18% secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2026, turun dari 5,72% pada triwulan I. Dengan pangsa 63,24% terhadap PDRB, konsumsi tetap menjadi penopang utama ekonomi Jakarta yang tumbuh 5,52%. Namun, konsumsi pemerintah yang meningkat 14,70% dan investasi 6,52% menunjukkan bahwa kuatnya ekonomi agregat tidak berarti seluruh rumah tangga mengalami penguatan daya beli yang sama.

Data transaksi memperlihatkan perlambatan tersebut berlanjut pada awal semester II. Rata-rata pertumbuhan Mandiri Spending Index (MSI) Jakarta turun dari 4,7% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 4,6% pada

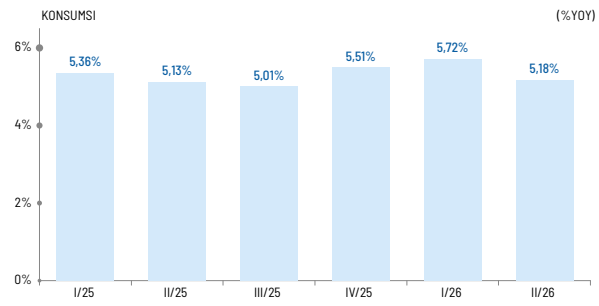

Sumber : BPS DKI Jakarta

Grafik B2.1 Pertumbuhan Konsumsi RT DKI Jakarta

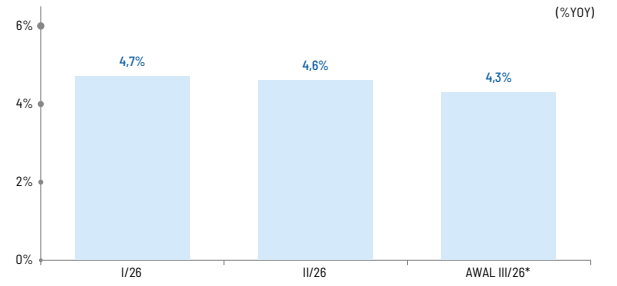

Sumber : Mandiri Spending Index

Grafik B2.2 Perkembangan MSI DKI Jakarta

triwulan II 2026 dan 4,3% pada awal triwulan III 2026, berdasarkan data hingga 9 Agustus 2026. Pada pengamatan terakhir, indeks Jakarta mencapai 120,2, tertinggal dari nasional 124,0 dan Jawa 122,5. Ini menunjukkan belanja masih meningkat, tetapi momentumnya lebih terbatas. MSI merupakan indikator transaksi nasabah, sehingga tidak identik dengan pertumbuhan konsumsi riil dalam PDRB.

Perlambatan itu berjalan bersama perubahan prioritas belanja. Pada 2025, konsumsi rumah tangga untuk restoran dan hotel tumbuh 7,79%, jauh di atas makanan dan minuman sebesar 3,44%. Pada triwulan II 2026, lapangan usaha akomodasi dan makan minum tumbuh 9,52%; transaksi Jakarta Fair juga naik dari Rp7,3 triliun pada 2025 menjadi Rp8,2 triliun pada 2026[1]. Aktivitas kuliner, wisata, dan acara masih

1 https://www.jakartafair.co.id/post/resmi-ditutup-jakarta-fair-2026-catatkan-transaksi-rp82-t

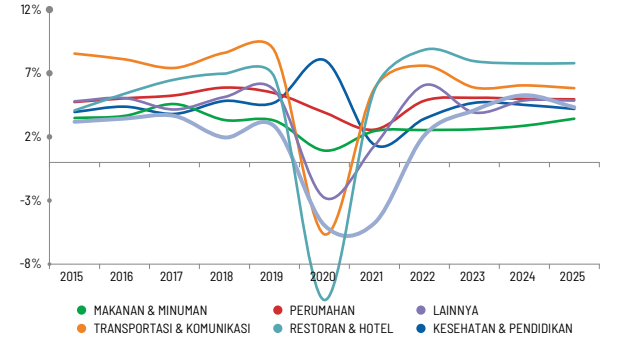

Sumber : BPS, diolah

Grafik B2.3 Pertumbuhan Komponen Konsumsi RT Provinsi DKI Jakarta

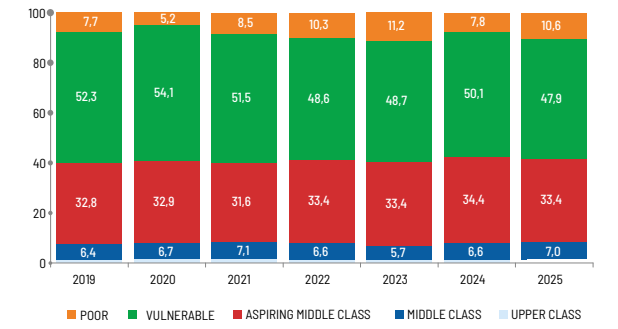

Sumber : BPS DKI Jakarta, diolah

Grafik B2.5 Perkembangan MSI DKI Jakarta

menarik pengeluaran. Namun, omzet sektor jasa dan acara juga mencakup belanja pengunjung luar daerah, sehingga tidak seluruhnya mencerminkan konsumsi penduduk DKI Jakarta.

Gambaran asesmen antarbank pun beragam. BCA mencatat penahanan belanja pada segmen menengah hingga teratas. Sementara itu, BRI melaporkan tabungan ritel tumbuh 22,3% (yoy) dan volume transaksi 8,03% (yoy) pada Juni 2026. Cakupan BRI adalah Regional Jakarta, meliputi DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Perbedaan wilayah, nasabah, dan periode ini membuat data tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang sama. Meski demikian, temuan BRI mengindikasikan bahwa penarikan tabungan belum terjadi secara merata pada semua segmen.

Di balik belanja yang tetap tumbuh, fondasi daya beli menghadapi tekanan struktural. Analisis Mandiri atas data BPS menunjukkan pangsa kelas menengah Jakarta turun dari 30,0% pada 2019 menjadi 24,2% pada 2025, atau berkurang sekitar 527 ribu orang. Padahal, kelompok ini masih menyumbang 47,9% konsumsi pada 2025. Pangsa pekerja formal juga turun dari 63,8% pada 2023 menjadi 61,7% pada Mei 2026. Menyusutnya basis kelas menengah dan meningkatnya informalitas berpotensi membatasi kestabilan pendapatan serta ruang belanja rumah tangga.

Fenomena "makan tabungan" dan "makan pinjaman" perlu dibaca dalam konteks tersebut: konsumsi dipertahankan dengan mengurangi simpanan atau menambah utang. Kajian nasional Mandiri pada Juli 2026 menunjukkan indeks tabungan kelompok bawah turun dari 82,9 pada Juli 2024 menjadi 71,9 pada Juli 2026 (Januari 2022=100). Kelompok ini didefinisikan berdasarkan rata-rata tabungan di bawah Rp1 juta, berbeda dari klasifikasi kelas menengah BPS. Kajian yang sama mencatat indeks pinjaman gabungan P2P lending, kartu kredit, dan paylater perusahaan pembiayaan mencapai 157,7 pada observasi terakhir (Januari 2024=100). Angka nasional tersebut menjadi sinyal risiko, bukan bukti bahwa semua rumah tangga DKI mengandalkan utang untuk konsumsi.

Prospek hingga akhir 2026 masih terbuka, meski pemulihannya berpotensi tidak merata. Asesmen data perbankan memperkirakan triwulan III menjadi fase normalisasi, sementara triwulan IV mendapat dorongan belanja akhir tahun, acara, dan perhotelan. Inflasi Jakarta sebesar 2,50% (yoy) pada Juli, lebih rendah dari nasional 2,88% (yoy), membantu menjaga daya beli. Akan tetapi, melemahnya optimisme konsumen serta risiko cuaca terhadap pasokan pangan dapat menahan pengeluaran.

Dengan demikian, tantangan Jakarta adalah memperluas kemampuan berbelanja secara berkelanjutan. Penguatan pekerjaan dan pendapatan, stabilitas harga pangan, serta perlindungan kelompok rentan akan menentukan apakah dorongan konsumsi dari jasa dan acara dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga. Kredit dapat membantu meratakan pengeluaran, tetapi tanpa pemulihan pendapatan, tambahan cicilan berisiko mempersempit belanja pada periode berikutnya.

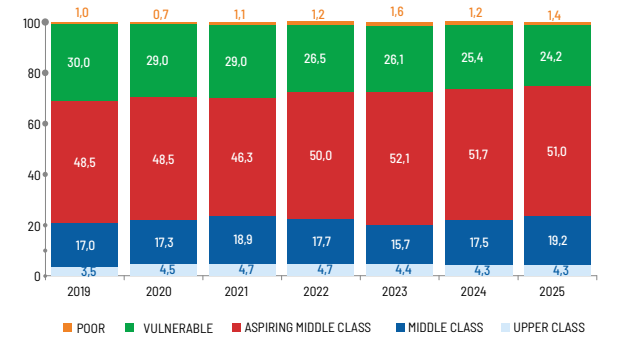

Sumber : BPS DKI Jakarta, diolah

Grafik B2.4 Pertumbuhan Konsumsi RT DKI Jakarta

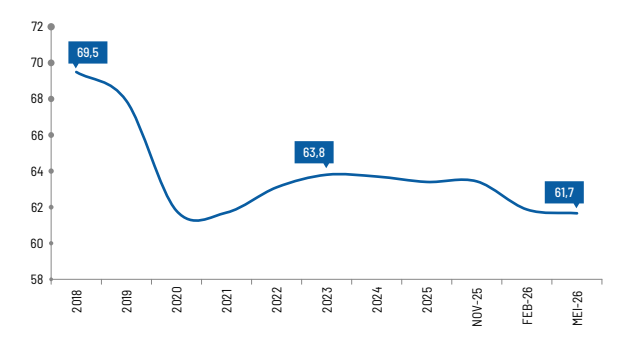

Sumber : BPS DKI Jakarta, diolah

Grafik B2.6 Perkembangan Pangsa Pekerja Formal DKI Jakarta

Bab 2

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,78% (yoy). Inflasi triwulan ini tercatat paling rendah di antara semua provinsi di pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,34% (yoy). Capaian ini menunjukkan inflasi Jakarta yang tetap terkendali di tengah berlanjutnya penyesuaian harga sebagai dampak gejolak harga minyak dan energi global. Memasuki triwulan III 2026, inflasi Jakarta pada Agustus 2026 tetap terjaga pada rentang sasaran nasional, sebesar 2,71% (yoy). Capaian ini merupakan yang terendah di antara semua provinsi di Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,88% (yoy). Tekanan inflasi tahunan terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas global, harga energi, serta tarif angkutan udara. Ke depan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran pada tahun 2026 seiring dengan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, utamanya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

INFLASI IHK DKI JAKARTA (yoy)

3,37%
Triwulan I 2026

2,78%
Triwulan II 2026

RATA-RATA INFLASI IHK (yoy)

2,24%
Rerata inflasi Triwulan II 2024-2026, yoy

INFLASI IHK DKI JAKARTA (ytd)

1,65%
Juni 2026, ytd

A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN II 2026

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta melandai pada triwulan II 2026. Inflasi IHK Jakarta tercatat sebesar 2,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 3,37% (yoy). Inflasi triwulan ini tercatat paling rendah di antara semua provinsi di pulau Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,34% (yoy). Capaian ini menunjukkan inflasi Jakarta tetap terkendali di tengah berlanjutnya penyesuaian harga sebagai dampak gejolak harga minyak dan energi global. Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga, sekaligus mengantisipasi potensi rambatan kenaikan harga komoditas global terhadap tekanan harga domestik. Dalam hal ini, TPID DKI Jakarta memperkuat sinergi melalui strategi 4K – keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif – antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Inflasi pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran (Grafik 2.1). Berdasarkan kontribusinya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Transportasi memberikan sumbangan inflasi yang paling besar, disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Grafik 2.2). Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama didorong oleh emas perhiasan, bensin, angkutan udara, beras, dan daging ayam ras. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga tomat, telur ayam ras, bawang putih, bawang bombay, dan kentang.

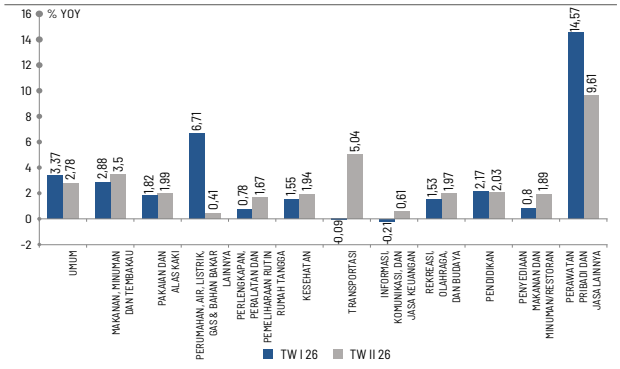

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

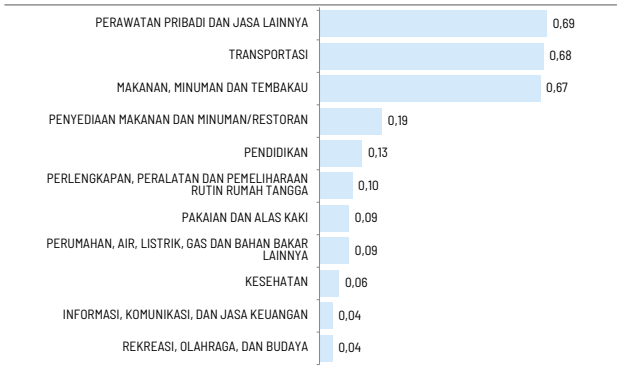

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (%)

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi kontributor utama inflasi IHK Jakarta pada triwulan II 2026. Dengan andil tahunan sebesar 0,69%, kelompok ini mencatat inflasi yang masih cukup tinggi 9,61% (yoy), meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 14,57% (yoy). Tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang mencatat inflasi 35,18% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang menembus 61,63% (yoy), dengan andil tahunan mencapai 0,57%.

Perkembangan tersebut masih sejalan dengan tren harga emas global yang mengalami koreksi tajam seiring dengan meredanya tensi geopolitik akibat tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Secara tahunan, rata-rata harga emas global pada triwulan II 2026 terpantau meningkat sebesar 37,21% (yoy), tidak setinggi lonjakan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 70,20% (yoy) (Grafik 2.3). Seiring dengan perkembangan global, rata-rata harga emas perhiasan domestik pada triwulan ini tercatat sebesar Rp1.989.982/gr atau naik 36,62% (yoy), meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang mencapai 66,03% (yoy) (Grafik 2.4). Selain emas perhiasan, komoditas *personal care* seperti parfum, deodoran, tarif gunting rambut pria, pasta gigi, shampo, *facial/peeling*, pembalut wanita, bedak, dan krim wajah juga berkontribusi terhadap inflasi tahunan kelompok ini.

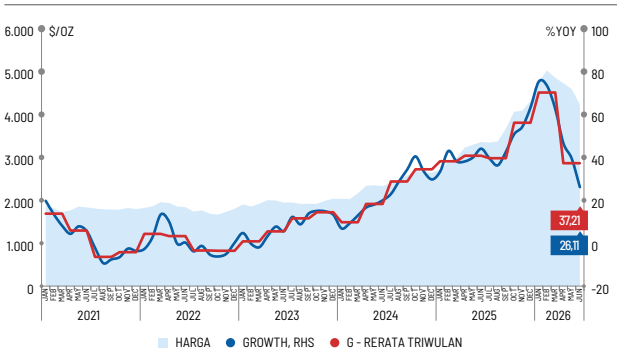

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.3 Perkembangan Harga Emas Global

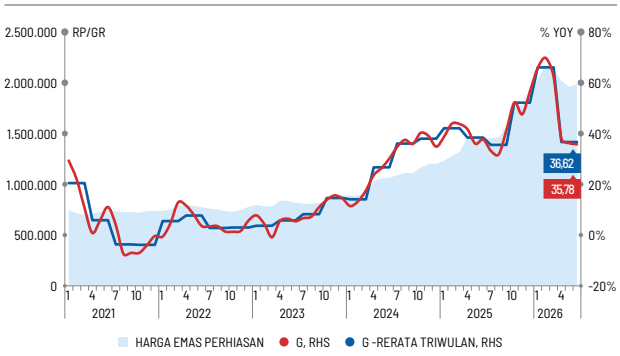

Sumber: SPH, diolah

Grafik 2.4 Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta

Kelompok Transportasi turut berkontribusi pada inflasi IHK Jakarta pada triwulan II 2026. Kelompok ini tercatat inflasi 5,04% (yoy), setelah triwulan sebelumnya mencatat deflasi 0,09% (yoy), dengan andil tahunan sebesar 0,68%. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, pada 10 Juni 2026 yang mendorong inflasi komoditas bensin dengan andil tahunan sebesar 0,39%. Tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya tekanan permintaan pada periode libur sekolah serta perubahan struktural harga avtur seiring dengan lonjakan harga hingga 70-80% pada awal triwulan II 2026 akibat tensi geopolitik, meskipun mengalami penurunan kembali sekitar 10% pada akhir triwulan II 2026. Adapun rata-rata harga avtur pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp21.681/L, meningkat 62,88% (yoy) (Grafik 2.5).

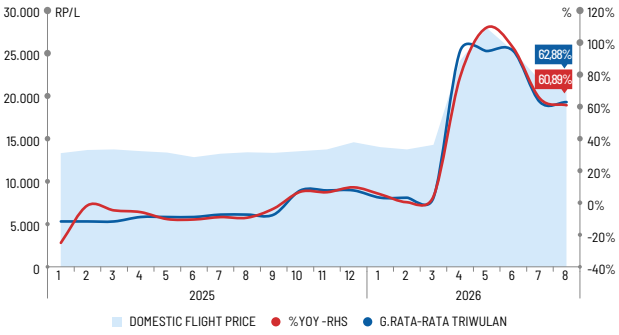

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.5 Perkembangan Harga Avtur

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut berkontribusi pada inflasi IHK Jakarta dengan andil tahunan sebesar 0,67%. Inflasi kelompok ini tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 2,88% (yoy) menjadi 3,50% (yoy). Kontribusi inflasi terbesar berasal dari komoditas beras dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,13% dan 0,12%, sementara penurunan harga pada tomat, telur ayam ras, bawang putih, bawang bombay, serta kentang menahan tekanan lebih lanjut.

Kenaikan harga beras menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi pada triwulan II 2026. Hasil pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) menunjukkan rata-rata harga beras sebesar Rp15.298/kg (Grafik 2.6). Secara tahunan, harga tersebut meningkat 2,49% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,44% (yoy), seiring dengan terbatasnya ketersediaan pasokan beras pada masa paceklik yang berlangsung sepanjang triwulan ini. Kondisi ini tecermin dari rata-rata ketersediaan pasokan beras di Food Station yang tercatat menurun dari 5.522 ton pada triwulan I 2026 menjadi sebesar 2.773 ton, serta lebih rendah dibandingkan rata-rata pasokan triwulan II 2025 yang mencapai 10.471 ton.

Komoditas daging ayam ras juga mengalami kenaikan harga, dengan rata-rata harga tercatat sebesar Rp43.552/kg (Grafik 2.7). Secara tahunan, harga tersebut meningkat 7,78% (yoy), yang masih dipengaruhi oleh harga *live bird* di tingkat produsen dan masih tingginya biaya input produksi, khususnya jagung pakan ternak. Meskipun terdapat pengurangan operasional program pemerintah pada periode libur sekolah, harga komoditas ini tetap mengalami peningkatan secara tahunan di atas rata-rata historis 5 tahun terakhir.

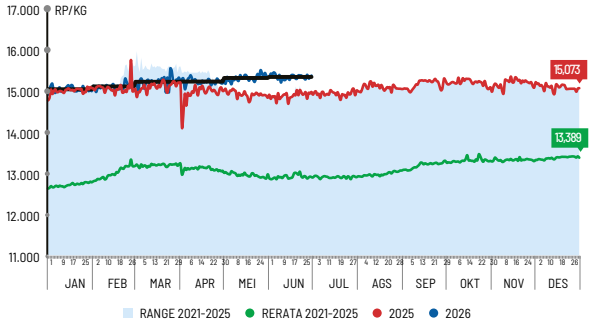

Sumber: IPJ, diolah

Grafik 2.6 Perkembangan Harga Beras

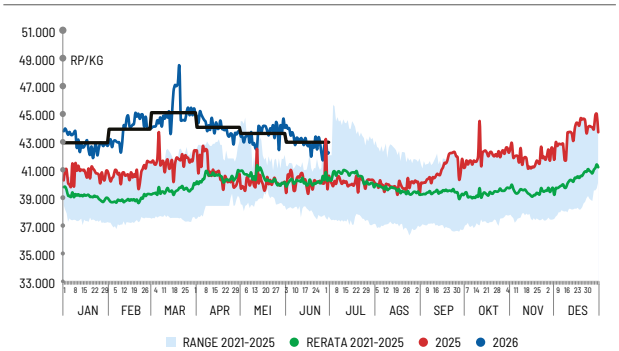

Sumber: IPJ, diolah

Grafik 2.7 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras

Di sisi lain, komoditas hortikultura yang meliputi tomat, bawang putih, dan bawang bombay mengalami penurunan harga seiring dengan meningkatnya ketersediaan dari daerah sentra, salah satunya Jawa Barat, serta kelancaran impor bawang putih dari negara asal. Ketiga komoditas hortikultura ini masing-masing berkontribusi sebesar -0,03%, -0,03%, dan -0,01%. Berdasarkan data IPJ, rata-rata harga bawang putih pada periode ini tercatat sebesar Rp42.336/kg (Grafik 2.8), menurun hingga 11,65% (yoy) secara tahunan. Dari sisi ketersediaan pasokan, rata-rata pasokan bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 25,4 ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 21,10 ton.

Selain hortikultura, tren penurunan harga telur ayam ras berlangsung pada triwulan ini dan menahan tekanan lebih lanjut. Berdasarkan data IPJ, rata-rata harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp28.749/

kg (Grafik 2.9). Secara tahunan, kenaikan harga pada triwulan ini sebesar 1,49% (yoy) tidak setinggi triwulan sebelumnya yang sebesar 6,15% (yoy). Kondisi ini didorong oleh melimpahnya ketersediaan pasokan telur ayam ras yang terjadi secara nasional, seiring dengan langkah antisipatif untuk pemenuhan kebutuhan program pemerintah. Sementara, penurunan harga kentang seiring dengan meningkatnya ketersediaan dari daerah sentra, terutama Dieng, turut berkontribusi menahan tekanan lebih lanjut dengan andil sebesar -0,01%.

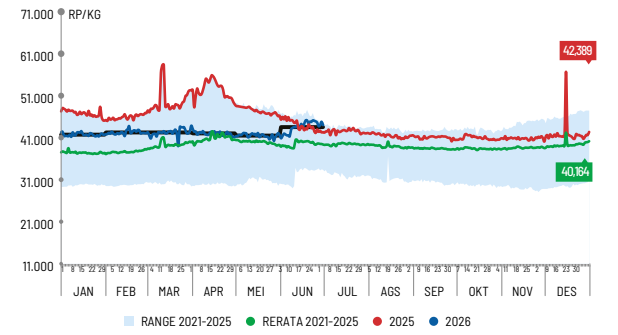

Sumber: IPJ, diolah

Grafik 2.8 Perkembangan Harga Bawang Putih

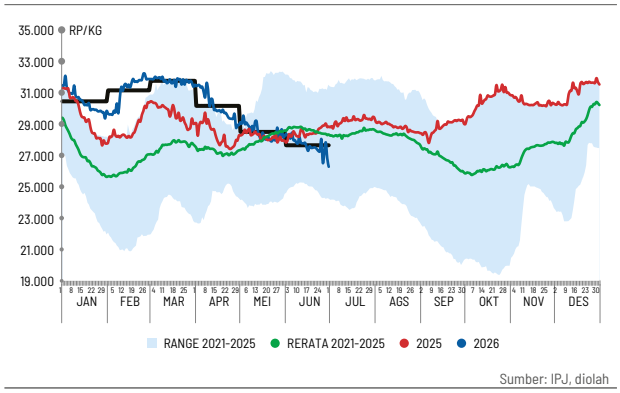

Sumber: IPJ, diolah

Grafik 2.9 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mencatat andil 0,19% dengan inflasi 1,89% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada triwulan sebelumnya 0,80% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi makanan jadi, seperti ayam goreng, nasi dengan lauk, soto, pizza, masakan Jepang, ketoprak, martabak, pempek, sop, miso, dan bakso siap santap.

Kelompok Pendidikan juga mencatatkan inflasi 2,03% (yoy), sedikit melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,17% (yoy), dengan sumbangan inflasi tahunan sebesar 0,13%. Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan biaya pendidikan, antara lain Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), akademi/perguruan tinggi, serta biaya bimbingan belajar, dan kursus bahasa asing. Kenaikan ini sejalan dengan pola musiman seiring dengan penyesuaian harga pada tahun ajaran baru.

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga menyumbang inflasi 0,10%. Kelompok ini mencatatkan inflasi 1,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan bersumber dari kenaikan harga upah asisten rumah tangga, kasur, service AC, lemari pakaian, stoples, dan meja kursi makan.

Dengan andil tahunan sebesar 0,09%, **kelompok Pakaian dan Alas Kaki serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** turut mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 1,99% (yoy) dan 0,41% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki terutama dipicu oleh kenaikan harga celana panjang jeans pria, celana panjang jeans wanita, kemeja pendek katun pria, ongkos binatu/laundry, sepatu wanita, celana pendek pria, dan celana dalam wanita, sementara inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga didorong oleh bahan bakar rumah tangga akibat penyesuaian harga LPG nonsubsidi, sewa rumah, kontrak rumah, tukang bukan mandor, dan paku.

Selanjutnya, **kelompok Kesehatan** turut mencatat inflasi yang lebih tinggi, yakni 1,94% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 0,06%. Tekanan harga didorong oleh tarif rumah sakit, tarif *checkup*, masker, obat dengan resep, dan vitamin. Sementara itu, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya serta kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan masing-masing mencatat inflasi sebesar 1,97% (yoy) dan 0,61% (yoy). Tekanan harga kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya dipicu oleh harga tas sekolah dan makanan hewan peliharaan, sementara kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan didorong oleh kenaikan tarif pulsa ponsel, *flashdisk*, biaya administrasi asuransi, laptop/notebook, dan televisi berwarna.

Terjaganya inflasi DKI Jakarta pada rentang sasaran nasional juga didukung oleh optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang masih terjaga. Hasil Survei Konsumen (SK) pada triwulan II 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) seluruhnya tetap berada pada level optimis (berada di atas 100) sebagaimana Grafik 2.10.

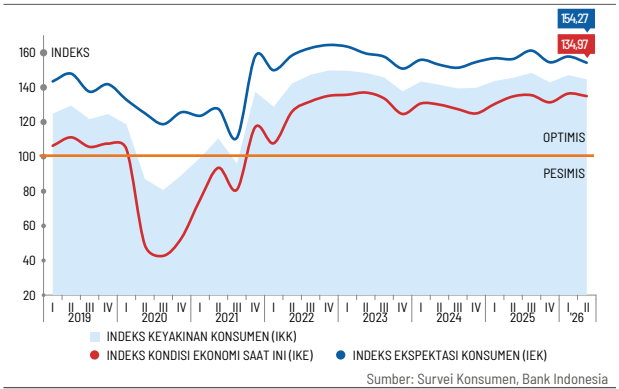

Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 2.10 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)

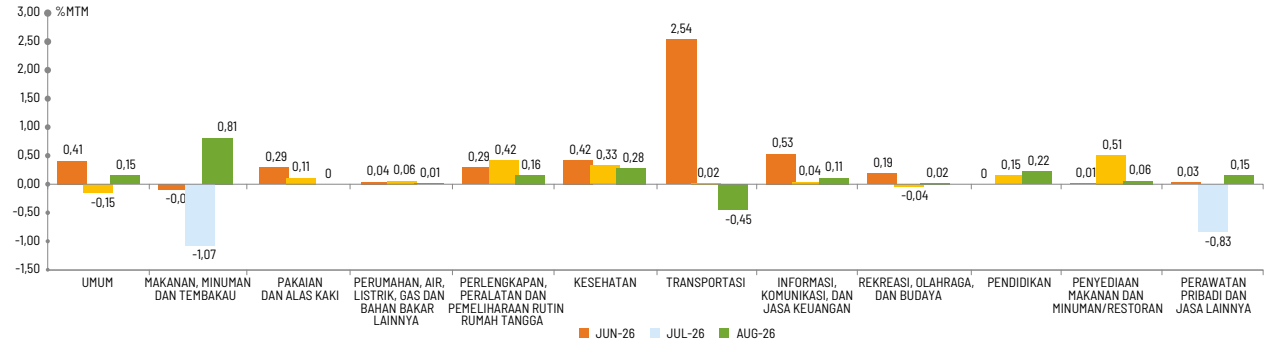

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.11 Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Mei-Juli 2026

B. *TRACKING* INFLASI TRIWULAN III 2026

Pada triwulan III 2026, inflasi Jakarta tetap terjaga pada rentang sasaran nasional. IHK Jakarta pada Agustus 2026 tercatat inflasi sebesar 0,15% (mtm), lebih rendah dibandingkan nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,21% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,15% (mtm). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Kesehatan, serta kelompok Pendidikan, sementara tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok Transportasi (Grafik 2.11).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada bulan ini. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,81% (mtm), berkebalikan arah dari bulan sebelumnya yang deflasi 1,07% (mtm), dengan memberikan andil sebesar 0,15% terhadap inflasi DKI Jakarta. Tekanan terutama berasal dari kenaikan harga daging ayam ras, kacang panjang, dan buncis. Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak dan harga bibit day old chick (DOC) broiler, serta diperkuat oleh meningkatnya permintaan pascalibur sekolah dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga komoditas tersebut mencatat kenaikan harga bulanan tertinggi dalam 3 tahun terakhir dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,14%, 0,01% dan 0,01%. Berdasarkan pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga daging ayam ras pada Agustus 2026 mencapai Rp43.553/kg, meningkat 2,56% (mtm) dibandingkan Rp42.465/kg pada bulan sebelumnya (Grafik 2.12). Dari sisi pasokan, rata-rata pasokan daging ayam ras juga menurun 6,57%, dari 839,80 ton menjadi 784,67 ton. Tekanan inflasi pada kelompok ini turut berasal dari kenaikan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM) seiring penyesuaian harga jual eceran, dengan andil sebesar 0,01% terhadap inflasi DKI Jakarta pada periode berjalan.

Di sisi lain, tekanan harga tertahan oleh penurunan harga bawang merah dan tomat seiring meningkatnya pasokan pada periode panen di daerah sentra. Rata-rata harga bawang merah pada Agustus 2026 tercatat turun hingga 21,38% dibandingkan bulan sebelumnya, dari Rp48.763/kg pada bulan sebelumnya menjadi Rp43.229/kg (Grafik 2.13). Terjaganya pasokan juga tercermin dari rata-rata pasokan bawang merah yang meningkat dari 97,24 ton menjadi 102,64 ton. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata pasokan tomat yang meningkat dari 42,94 ton menjadi 44,04 ton pada bulan ini. Penurunan harga lebih lanjut juga turut didukung oleh terjaganya pasokan jeruk. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 3,57% (yoy).

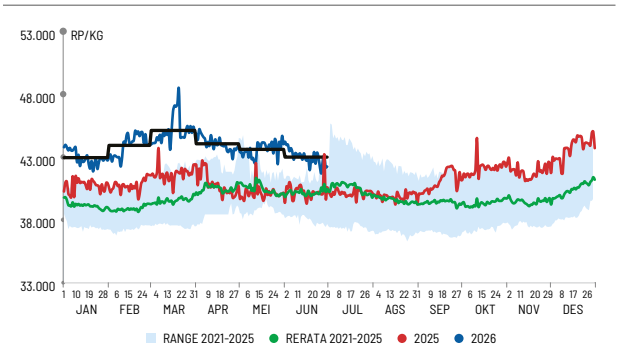

Sumber: IPJ, diolah

Grafik 2.12 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras

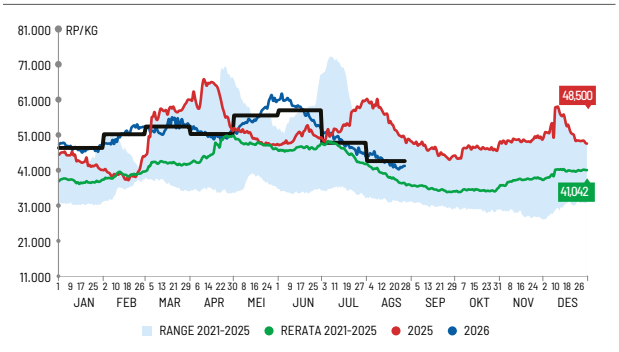

Sumber: IPJ, diolah

Grafik 2.13 Perkembangan Harga Bawang Merah

Kelompok Kesehatan turut berkontribusi pada inflasi bulan Agustus 2026 dengan andil sebesar 0,01%. Kelompok ini tercatat inflasi 0,28% (mtm), meskipun melandai dibandingkan 0,33% (mtm) pada bulan sebelumnya. Kenaikan harga terutama berasal dari komoditas vitamin, obat dengan resep, dan obat flu, dengan masing-masing memberikan andil kurang dari 0,01% terhadap inflasi DKI Jakarta. Secara tahunan, kelompok Kesehatan tercatat inflasi sebesar 2,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 1,99% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Kelompok Pendidikan menjadi penyumbang utama ketiga inflasi DKI Jakarta dengan andil sebesar 0,01%. Kelompok ini mengalami inflasi 0,22% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,15% (mtm). Perkembangan tersebut sejalan dengan pola musiman pada periode tahun ajaran baru, yang umumnya mendorong kenaikan harga pada kelompok Pendidikan. Kenaikan harga terutama terjadi pada biaya pendidikan SD, SMP, bimbingan belajar, PAUD, dan SMA. Secara tahunan, kelompok Pendidikan mencatat inflasi sebesar 1,12% (yoy), meskipun melandai dibandingkan 1,86% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Di sisi lain, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi **kelompok Transportasi** yang memberikan andil sebesar -0,06%. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,45% (mtm), setelah mengalami inflasi 0,02% (mtm) pada bulan sebelumnya. Deflasi terutama didorong oleh penurunan tarif angkutan udara seiring penurunan fuel surcharge tiket pesawat rute domestik menjadi maksimal 30% dari Tarif Batas Atas (TBA), sejalan dengan penurunan avtur. Rata-rata avtur pada bulan Agustus 2026 terpantau turun 1,28%, dari Rp21.820/L pada bulan sebelumnya menjadi Rp21.542/L (Grafik 2.14). Di samping itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, khususnya penurunan harga Pertamax dan Pertamax Turbo masing-masing sekitar 2% dan 5% juga turut mendorong deflasi kelompok Transportasi. Namun, deflasi lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga pelumas/oli mesin. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok Transportasi tercatat sedikit melandai dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari 5,30% (yoy) menjadi 4,83% (yoy).

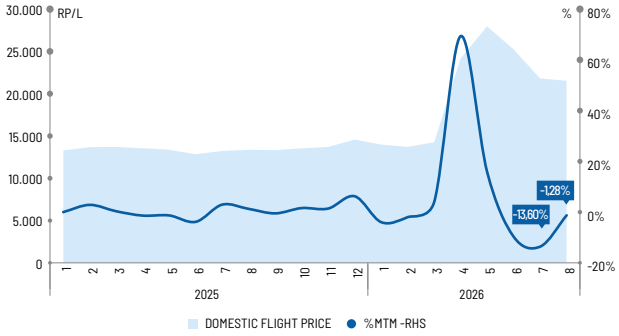

Sumber: Pertamina One Solution, diolah

Grafik 2.14 Perkembangan Harga Avtur

Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada Agustus 2026 meningkat dari bulan sebelumnya, namun tetap terjaga pada rentang sasaran nasional. Inflasi tahunan Jakarta pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,71% (yoy), paling rendah di antara semua provinsi di Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,19% (yoy) (Grafik 2.15). Tekanan inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0.69% dan inflasi 3,57% (yoy) (Grafik 2.16). Kelompok Transportasi dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga turut menjadi penyumbang utama dengan andil masing-masing sebesar 0,65% dan 0,61% serta inflasi sebesar 4,83% (yoy) dan

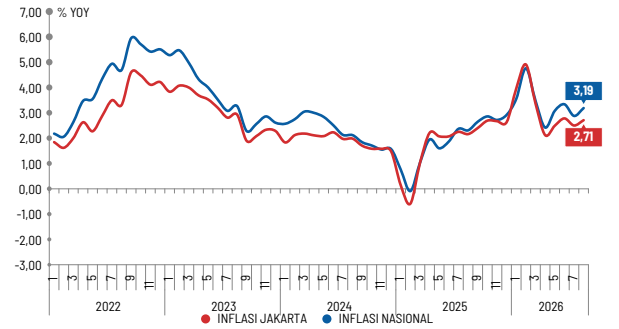

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.15 Inflasi Jakarta dan Nasional

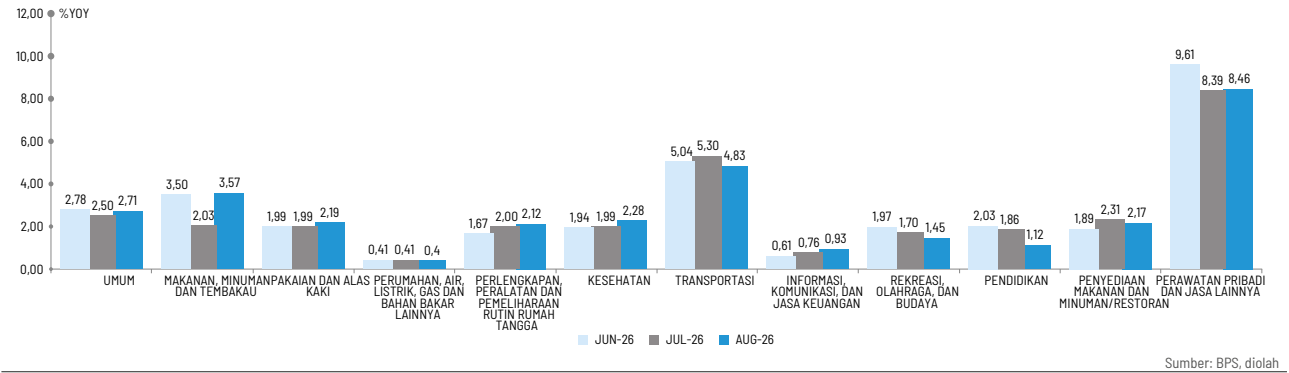

Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.16 Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Juni-Agustus 2026

8,46% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang utama inflasi tahunan terutama berasal dari komoditas emas perhiasan sebagai dampak lonjakan harga komoditas global, bensin akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta tarif angkutan udara sejalan dengan perkembangan harga avtur. Ketiga komoditas tersebut masing-masing berkontribusi sebesar 0,47%, 0,45%, dan 0,11%. Selain itu, beberapa komoditas pangan strategis turut memberikan tekanan inflasi, terutama daging ayam ras dan beras, yang masing-masing menyumbang andil sebesar 0,24% dan 0,12% terhadap inflasi tahunan Jakarta pada Agustus 2026. Tekanan tersebut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura, antara lain bawanag merah, tomat, dan bawang bombay, serta telur ayam ras dan tarif jalan tol, sehingga menahan peningkatan inflasi tahunan lebih lanjut.

C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN II 2026

Terkendalinya inflasi di Jakarta dalam rentang sasaran tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian dilakukan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan komoditas strategis agar tetap tersedia, mudah dijangkau, dan terjangkau harganya, terutama di tengah kenaikan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi pangan, serta peningkatan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespon dinamika inflasi pangan, TPID DKI Jakarta memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Kegiatan ini mencakup di antaranya intensifikasi Pasar Murah pada periode HBKN, perluasan Kerjasama Antar Daerah, optimalisasi *urban farming*, penguatan hilirisasi pangan, optimalisasi jalur distribusi, penguatan kelembagaan, antara lain melalui rapat koordinasi, *High Level Meeting, capacity building*, serta penguatan *early warning system* untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan akibat perkembangan cuaca dan El Niño

Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

1. **Pelaksanaan pasar murah oleh BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta** sebagai upaya menyediakan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen.
2. **Pelaksanaan Program Pangan Bersubsidi** bagi masyarakat sasaran di berbagai wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta memperluas akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau.
3. **Penyaluran Bantuan Pangan berupa beras dan minyak goreng oleh Perum BULOG Kanwil Jakarta-Banten** dengan realisasi penyaluran mencapai 100%. Bantuan disalurkan kepada 725.779 penerima, dengan realisasi beras mencapai 14.515.580 kg dan minyak goreng sebesar 2.903.116 kg.
4. **Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha** sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga di tengah peningkatan permintaan masyarakat. GPM yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional di DKI Jakarta menyediakan berbagai komoditas pangan strategis, antara lain beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), minyak goreng kemasan, gula pasir, serta sumber protein hewani berupa telur ayam ras, daging ayam segar, dan daging sapi beku.
5. **Penguatan intervensi pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H** melalui penyediaan dan pengawasan komoditas pangan strategis guna mengantisipasi peningkatan permintaan masyarakat. Dalam rangka memastikan ketersediaan hewan kurban, Perumda Dharma Jaya menyediakan sebanyak 900 ekor sapi. Dari sisi pengawasan dan edukasi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain webinar *"Penyelenggaraan Kurban yang Sehat dan Berkelanjutan"* pada 12 Mei 2026; sosialisasi dan edukasi kurban ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) bekerja sama dengan Masjid Istiqlal pada 20 Mei 2026; serta webinar mengenai pemotongan hewan dan penanganan daging kurban ASUH pada tanggal yang sama. Selain itu, pada 18 Mei 2026, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta melakukan pengecekan kesehatan dan kelayakan hewan kurban di TPHP Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Ketersediaan Pasokan

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, di antaranya:

1. **Penguatan ketersediaan pasokan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD)**, antara lain melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga kontinuitas pasokan pangan ke Jakarta.
2. **Monitoring keamanan pangan di pasar tradisional dan ritel modern di wilayah DKI Jakarta** oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas KPKP di masing-masing wilayah. Kegiatan dilakukan secara berkala untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

3. **Penguatan ketersediaan pangan lokal melalui pengembangan *urban farming*** di berbagai wilayah DKI Jakarta, antara lain melalui:

a. **Monitoring kegiatan *urban farming* di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.** Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama Suku Dinas KPKP Jakarta Timur dan TNI Angkatan Udara mengembangkan lahan pertanian seluas sekitar 2,5 hektare yang dikelola oleh Kelompok Tani Tengah Kota. Lahan tersebut secara rutin menghasilkan berbagai komoditas hortikultura, antara lain bayam, kangkung, dan kacang panjang, untuk mendukung ketersediaan pangan segar bagi masyarakat sekitar.

b. **Pelaksanaan panen rutin *urban farming* di wilayah Jakarta Timur** oleh Suku Dinas KPKP Jakarta Timur. Komoditas yang dipanen antara lain bawang merah, cabai merah, cabai rawit, terung ungu, dan pakcoy sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan untuk produksi pangan.

c. **Pelaksanaan gerakan tanam serentak di wilayah Jakarta Timur.** Pada 24 April 2026, gerakan tanam dilaksanakan pada 103 titik dengan total luas lahan sekitar 9.596 m^2 untuk komoditas antara lain jagung manis, jagung pulut, dan bawang merah. Selanjutnya, pada 8 Mei 2026 dilakukan gerakan tanam bersama komoditas jagung, padi, dan sayuran di kawasan *urban farming* Kampung Bali, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, pada lahan seluas sekitar 4,7 hektare.

d. **Penguatan kegiatan tanam dan panen pangan di wilayah Jakarta Utara.** Berbagai kegiatan dilakukan antara lain penanaman bersama di BPP Sukapura, Kelurahan Marunda; panen raya bersama komunitas anak berkebutuhan khusus di Lovely Garden Sunter; serta Gerakan Tanam Serentak di RPTRA Manggala Bisma. Pada 30 April 2026, Gerakan Menanam Jakarta Utara juga dilaksanakan pada 143 lokasi sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan perkotaan. Produksi *urban farming* Jakarta Utara tercatat sebesar 310,05 kg pada Mei 2026 dan meningkat menjadi 407,6 kg pada Juni 2026.

4. **Penguatan hilirisasi komoditas cabai dan bawang** melalui pelatihan pengolahan produk pertanian yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Pada 17–18 Juni 2026, dilaksanakan kegiatan *Penguatan Hilirisasi Produk Pertanian Provinsi DKI Jakarta melalui Pelatihan Pengolahan Aneka Cabai dan Bawang* dengan tema "Meningkatkan Nilai Tambah, Menguatkan Daya Saing Produk Pertanian Jakarta" di *Training Center* Klender, Jakarta Timur. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Strategis (GPIPS) tersebut diikuti oleh 100 UMKM binaan Dinas KPKP dan Bank Indonesia. Pelatihan mencakup penguatan *soft skills*, antara lain pola pikir bisnis, kelembagaan dan sertifikasi UMKM, serta strategi pemasaran, maupun *hard skills* melalui praktik pengolahan cabai dan bawang menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti pasta cabai, minyak bawang, aneka sambal, dan *chili oil*. Kegiatan ini diharapkan dapat memperpanjang umur simpan komoditas pangan bergejolak, mengurangi potensi tekanan harga pada periode panen raya, serta mendukung ketersediaan produk pangan sepanjang tahun sekaligus memperkuat ketahanan usaha UMKM.

5. **Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)** untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan layak konsumsi. Sepanjang April–Juni 2026, pengawasan dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern di Jakarta Selatan, antara lain Gelael Tebet, Pasar Rumput, Pasar Bukit Duri Puteran, Superindo Tebet, Pasar Mayestik, Pasar Radio Dalam, Pasar Santa, Ranch Market Kemang, dan Hero Kemang. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap produk pangan untuk mengidentifikasi potensi kandungan bahan berbahaya. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan aman.

6. **Penguatan pengawasan kesehatan hewan dan daging kurban menjelang Iduladha 1447 H.** Pada 26 Mei 2026, bertempat di RPH Perumda Dharma Jaya, Cakung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi melepas petugas Pemeriksa Kesehatan Hewan dan Daging Kurban serta Juru Sembelih Halal (Juleha). Sebanyak 744 petugas pengawas dikerahkan di seluruh wilayah Jakarta untuk memastikan pelaksanaan kurban berlangsung aman dan tertib serta memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Selain itu, sebanyak 458 sampel darah hewan kurban telah diperiksa dan seluruhnya dinyatakan bebas antraks.

Kelancaran Distribusi

Upaya untuk mendorong kelancaran distribusi di antaranya adalah:

1. **Pelaksanaan distribusi pangan secara rutin oleh BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta** melalui penjualan menggunakan kendaraan operasional oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya ke berbagai wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperluas jangkauan distribusi pangan sekaligus mendukung akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis.

2. **Penguatan distribusi komoditas peternakan dan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H** melalui koordinasi dengan daerah pemasok serta pengawasan terhadap proses distribusi dan penampungan guna menjaga kelancaran pasokan. Selain itu, pada 3 Juni 2026, Perumda Dharma Jaya menjalin kerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dalam penyediaan daging kurban sebagai bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat pada periode Iduladha.

3. **Penguatan koordinasi dan monitoring distribusi pangan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta** bersama tiga BUMD Pangan, yaitu PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, serta pelaku usaha di Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Induk Kramat Jati. Kegiatan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus distribusi pangan dari sentra pasokan hingga

tingkat konsumen serta mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala distribusi yang dapat memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di DKI Jakarta.

Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, di antaranya:

1. **Pelaksanaan Rapat Kamisan TPID Provinsi DKI Jakarta** sebagai forum koordinasi rutin untuk memantau perkembangan harga, pasokan, dan stok komoditas pangan strategis, mengidentifikasi potensi risiko inflasi, serta merumuskan langkah tindak lanjut pengendalian inflasi secara tepat waktu.
2. **Pelaksanaan *Capacity Building* dan Studi Banding TPID Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Jawa Tengah** pada 22–23 April 2026 dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperkuat sinergi antaranggota TPID. Kegiatan studi banding di Kabupaten Magelang diikuti oleh 38 peserta dari KPwBI Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan BUMD Pangan, dengan agenda kunjungan ke Koperasi Panca Arga Tani Gemilang sebagai klaster *champion* cabai nasional dan Gupon Sekar Langit sebagai sentra padi organik. Kegiatan memberikan pembelajaran mengenai pengaturan pola tanam untuk menjaga kontinuitas produksi, penerapan sistem lelang cabai untuk membentuk harga yang lebih kompetitif, serta pengembangan pertanian sirkular dan kemitraan dengan sektor ritel dan *food and beverage*. Pada kesempatan tersebut, PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Pasar Jaya turut menjajaki peluang kerja sama penyediaan hortikultura dan beras organik untuk memenuhi kebutuhan sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) serta mendukung program pasar murah di DKI Jakarta. Selanjutnya, *Capacity Building* pada 23 April 2026 di Semarang membahas penguatan kelembagaan TPID, pengembangan *Early Warning System* (EWS) inflasi, serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD), inovasi, dan digitalisasi sektor pertanian. Kegiatan juga menjadi sarana pembelajaran atas praktik pengendalian inflasi Jawa Tengah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir serta penjajakan potensi perluasan KAD dengan DKI Jakarta.
3. **Pelaksanaan rapat koordinasi TPID Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kesiapan sektor pangan dan energi menghadapi musim kemarau 2026** pada 1 April 2026. Rapat membahas sejumlah langkah antisipatif untuk memitigasi risiko musim kemarau terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan, antara lain memastikan ketepatan sasaran program bantuan pangan, mengoptimalkan dan memperluas kerja sama dengan daerah produsen dan sektor swasta, memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung produksi pangan, serta memperkuat monitoring lapangan guna memastikan kecukupan pasokan.
4. **Penguatan koordinasi dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok terkait perkembangan cuaca dan iklim serta potensi dampaknya terhadap ketahanan pangan**. Dalam pertemuan pada 28 April 2026, BMKG menyampaikan bahwa kondisi iklim global telah memasuki fase netral setelah berakhirnya La Niña lemah pada Februari 2026, sementara El Niño dengan intensitas lemah hingga moderat berpeluang berkembang pada semester II 2026 dengan probabilitas sekitar 50–60%. Musim kemarau 2026 diprakirakan datang lebih awal di sekitar 46,5% wilayah Indonesia, berlangsung lebih panjang pada 57,2% wilayah, serta lebih kering dengan 64,5% wilayah berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal. Puncak musim kemarau diprakirakan berlangsung pada Agustus 2026. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan langkah antisipatif TPID terhadap potensi gangguan produksi dan pasokan pangan.
5. **Penguatan koordinasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya dalam rangka mengantisipasi dampak El Niño** terhadap ketahanan pangan DKI Jakarta melalui rapat koordinasi pada 19 Mei 2026. Pertemuan membahas kesiapan pasokan dan stok pangan serta strategi mitigasi terhadap potensi gangguan produksi dan distribusi akibat kondisi cuaca. Koordinasi diarahkan pada penguatan pengelolaan rantai pasok, kecukupan stok, serta kesiapan intervensi guna menjaga stabilitas harga pangan di DKI Jakarta. Sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan BUMD Pangan terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah.
6. **Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Antisipasi Dampak El Niño terhadap Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta** pada 21 Mei 2026 sebagai tindak lanjut koordinasi TPIP-TPID Wilayah Jawa dan langkah mitigasi terhadap risiko gangguan produksi, distribusi, serta stabilitas pasokan pangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara umum pasokan pangan Jakarta diprakirakan memadai menghadapi musim kemarau semester II 2026, didukung antara lain oleh penyerapan beras pada periode panen raya serta penguatan pasokan komoditas peternakan. Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, terutama tingginya biaya produksi dan distribusi, perkembangan harga gabah dan beras, ketergantungan pasokan hortikultura dari luar Jakarta, potensi perubahan pola distribusi komoditas peternakan, kenaikan harga pakan, serta risiko *heat stress* akibat El Niño. Untuk memitigasi risiko tersebut, TPID terus mendorong penguatan stok dan pasokan, optimalisasi Kerja Sama Antardaerah melalui Forum Mitra Praja, peningkatan ketepatan data pangan, serta pengembangan produksi pangan lokal.
7. **Pelaksanaan *Capacity Building* TPID Provinsi DKI Jakarta bertema "Pemanfaatan Prognosa Pangan untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta"** secara virtual pada 5 Juni 2026. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyampaikan arah

kebijakan pangan nasional, prospek ketahanan pangan 2026–2027, strategi antisipasi El Niño, serta pemanfaatan proyeksi neraca pangan sebagai instrumen *early warning system* pengendalian inflasi. Diskusi turut membahas mekanisme pembaruan data neraca pangan, pemanfaatan indikator ketahanan stok sebagai dasar intervensi, penguatan KAD, serta peningkatan kualitas data pangan DKI Jakarta. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pemanfaatan prognosa pangan sebagai dasar perencanaan pasokan, distribusi, dan intervensi pasar yang lebih tepat sasaran.

8. **Pelaksanaan Rapat Penyusunan Prognosa Neraca Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Strategis Provinsi DKI Jakarta** pada 23 Juni 2026 oleh TPID melalui Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Rapat dihadiri oleh tim teknis TPID yang terdiri atas Dinas KPKP, KPwBI Provinsi DKI Jakarta, BUMD Pangan, dan Perum BULOG, dengan menghadirkan Bapanas dan BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber. Pembahasan difokuskan pada penguatan metodologi penyusunan prognosa neraca pangan melalui perbaikan perhitungan koefisien ketersediaan, pengolahan data produksi, stok, serta perdagangan antarwilayah, pemanfaatan aplikasi Proyeksi Neraca Pangan, dan standardisasi metadata komoditas. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan akurasi informasi surplus-defisit pangan sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pasokan dan pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat dan berkelanjutan.
9. **Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi DKI Jakarta semester I 2026 yang terintegrasi dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)** pada 25 Juni 2026. Rapat dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta serta dihadiri jajaran Forkopimda, instansi vertikal, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber. Pertemuan membahas perkembangan ekonomi dan inflasi terkini serta sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain meningkatnya ketidakpastian global, potensi puncak musim kemarau pada Agustus 2026, dan tekanan terhadap fiskal daerah. Sebagai tindak lanjut, disepakati penguatan sinergi lintas instansi melalui optimalisasi strategi 4K, khususnya penguatan peran TPID dan BUMD Pangan dalam menjaga pasokan dan daya beli masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta peningkatan pengawasan distribusi pangan, BBM, dan LPG. Sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang berkelanjutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BOKS 3

Menjaga Keterjangkauan Harga Beras Bagi Masyarakat Jakarta

Beras memiliki peran strategis dalam pembentukan inflasi pangan dan daya beli masyarakat. Bagi Jakarta, isu stabilitas harga beras menjadi semakin penting karena karakter wilayahnya sebagai pusat konsumsi dengan kapasitas produksi yang sangat terbatas. Produksi beras Jakarta hanya sekitar 877 ton per tahun (Sumber: Badan Pusat Statistik), jauh di bawah kebutuhan yang mencapai 886.641 ton per tahun (Sumber: Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta). Dengan demikian, sekitar 95–99% pasokan pangan Jakarta bergantung pada wilayah lain. Kondisi ini membuat harga beras di Jakarta sangat dipengaruhi oleh perkembangan produksi, harga gabah, dan kelancaran distribusi dari berbagai sentra pemasok di luar daerah.

Perkembangan harga menunjukkan bahwa tekanan beras di Jakarta meningkat tajam pada April 2026 dan kemudian bertahan pada level yang relatif tinggi. Pola tersebut berbeda dengan tekanan harga yang semata-mata dipicu oleh kenaikan permintaan musiman. Setelah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) berlalu, harga tidak segera kembali ke level sebelumnya. Persistensi ini mengindikasikan bahwa faktor pendorong utama lebih dominan berasal dari sisi penawaran, khususnya kenaikan biaya produksi atau cost-push.

Dari sisi pasokan, stok beras cenderung menurun setelah berakhirnya panen raya musim tanam I. Pada saat yang sama, aliran pasokan dari sentra produksi masih terbatas karena harga gabah di tingkat produsen tetap tinggi. Ketergantungan Jakarta terhadap pasokan antardaerah membuat tekanan di hulu tersebut relatif cepat ditransmisikan ke pasar Jakarta. Selain itu, rantai distribusi beras menuju konsumen Jakarta masih melibatkan beberapa lapis pelaku, sehingga efisiensi distribusi tetap menjadi aspek penting dalam menjaga harga di tingkat konsumen.

Tantangan pertama berasal dari anomali harga gabah yang telah terlihat sejak periode panen raya 2025. Secara umum, panen raya seharusnya meningkatkan pasokan dan mendorong koreksi harga gabah. Namun, harga gabah tidak turun secara signifikan. Kondisi terkini menunjukkan harga gabah kering panen (GKP) untuk penggilingan di sejumlah sentra utama, seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, berada pada kisaran Rp8.000–Rp8.500 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sekitar Rp6.800-Rp7.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penurunan biaya bahan baku beras.

Tekanan harga gabah menjadi krusial karena GKP merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produksi beras, dengan porsi sekitar 90–93%. Tingginya harga bahan baku bahkan mendorong Food Station, BUMD pangan Jakarta, menghentikan produksi beras premium komersial untuk retail modern sejak Maret 2026 karena harga pokok produksi telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Kondisi tersebut berpotensi membatasi ketersediaan beras premium di Jakarta.

Sumber: BPS (2025)

Gambar B3.1 Pola Distribusi Perdagangan Beras DKI Jakarta

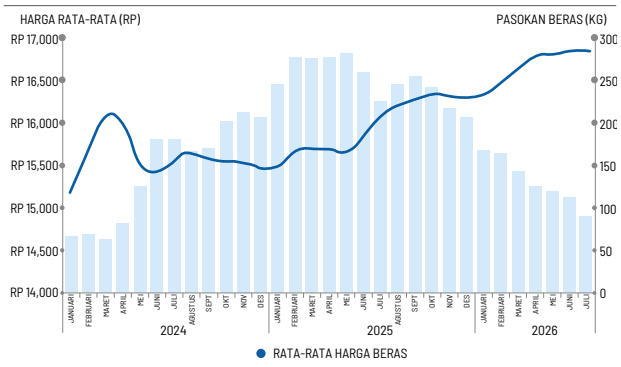

Sumber : PIHPS, FS, diolah

Gambar B3.1 Pergerakan Harga dan Pasokan Beras Jakarta

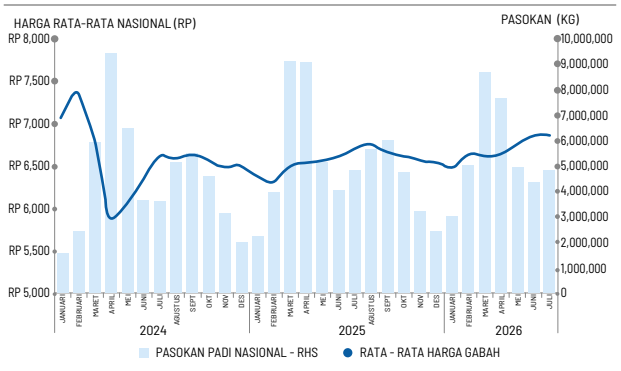

Sumber : Kementan, BPS, diolah

Gambar B3.2 Pergerakan Harga Gabah dan Pasokan Padi Nasional

Tekanan biaya juga datang dari kenaikan harga pupuk nonsubsidi sejak April 2026. Harga ZA Plus, misalnya, meningkat dari sekitar Rp4.300 per kilogram pada awal tahun menjadi Rp9.000 per kilogram pada Mei 2026. Harga urea, KCL, dan NPK juga mengalami kenaikan. Di sisi hilir, biaya kemasan turut meningkat sejalan dengan kenaikan harga bahan baku plastik yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan harga nafta global. Kombinasi harga gabah, pupuk, proses produksi, dan kemasan tersebut memperkuat tekanan biaya yang pada akhirnya memengaruhi harga jual beras.

Menghadapi tekanan tersebut, TPID DKI Jakarta menempuh strategi pengendalian yang berfokus pada penguatan pasokan sekaligus keterjangkauan harga. Dari sisi pasokan, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperluas dengan wilayah surplus, antara lain Banten, Cianjur, Bandung, Subang, Indramayu, Demak, Sragen, dan Kediri. Food Station juga menyiapkan skema *standby buyer* dengan target 15.000 ton dari cakupan 7.500 hektare, serta program *on-farm* padi bersama 10 mitra dengan total lahan 500 hektare dan target serapan 3.000 ton. Hingga Juli 2026, realisasi KAD komoditas padi/beras mencapai 1.187 ton.

Stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hingga Juli 2026, Bulog Kanwil Jakarta–Banten telah menyalurkan 14.115 ton beras SPHP atau sekitar 60,50% dari target 23.331 ton. Food Station turut mendukung penyaluran SPHP untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Pada sisi hilir, pasar murah diintensifkan sebagai instrumen untuk menjaga daya beli dan memperpendek akses konsumen terhadap beras sesuai HET. Pasar murah BUMD pangan Jakarta rutin dilaksanakan setiap hari pada sekitar 5–6 titik. Sepanjang Januari–Juli 2026, total

pelaksanaan pasar murah dan Program Pangan Bersubsidi mencapai 2.991 titik, terdiri dari 2.202 titik pasar murah oleh BUMD dan Bulog serta 791 titik Program Pangan Bersubsidi. Melalui program tersebut, beras 5 kilogram disediakan dengan harga Rp30.000 bagi kelompok penerima manfaat.

Ke depan, stabilitas harga beras Jakarta memerlukan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang dijalankan secara konsisten. Penguatan KAD perlu diarahkan tidak hanya untuk menambah volume pasokan, tetapi juga memastikan kontinuitas pasokan sepanjang tahun, terutama pada periode setelah panen raya. Di saat yang sama, pemantauan harga gabah dan komponen biaya produksi perlu diperkuat untuk mendeteksi tekanan lebih dini, disertai optimalisasi cadangan dan distribusi SPHP serta pasar murah yang semakin tepat waktu dan tepat sasaran.

Dengan karakter Jakarta sebagai wilayah konsumen, ketahanan pasokan akan sangat ditentukan oleh kuatnya konektivitas dengan sentra produksi dan efisiensi rantai distribusi. Sinergi TPID, BUMD pangan, Bulog, pemerintah daerah pemasok, dan pelaku usaha menjadi kunci agar gejolak di hulu tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen. Melalui penguatan pasokan antardaerah dan intervensi keterjangkauan harga yang terukur, stabilitas harga beras di Jakarta diharapkan tetap terjaga di tengah tekanan biaya produksi yang masih tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Pembiayaan Daerah

Pada triwulan II 2026, intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang solid dengan profil risiko yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta tumbuh meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit diimbangi dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ruang ekspansi kredit juga didorong oleh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang tetap akomodatif guna mendukung pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap terjaga, tecermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah dan berada jauh di bawah *threshold* 5%, serta rasio permodalan yang tetap kuat.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kebutuhan pembiayaan sektor korporasi seiring ekspansi usaha dan perbaikan kinerja penjualan. Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi, real estate, dan perdagangan besar dan eceran. Kemampuan bayar korporasi juga tetap kuat, tecermin dari rasio likuiditas yang terjaga dan tingkat Non-Performing Loans (NPL) korporasi yang rendah.

Kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan perlambatan pada triwulan II 2026. Kendati demikian, perlambatan kinerja kredit konsumsi rumah tangga lebih lanjut tertahan oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat seiring tetap kuatnya optimisme masyarakat yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga pada level 3% meskipun perlu terus dimonitor seiring akselerasi pertumbuhan kredit. Kredit sektor UMKM juga tetap tumbuh positif di tengah kuatnya penyaluran kredit bank umum, didukung oleh peningkatan aktivitas usaha dan berbagai program penguatan kapasitas yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong produktivitas dan daya saing UMKM.

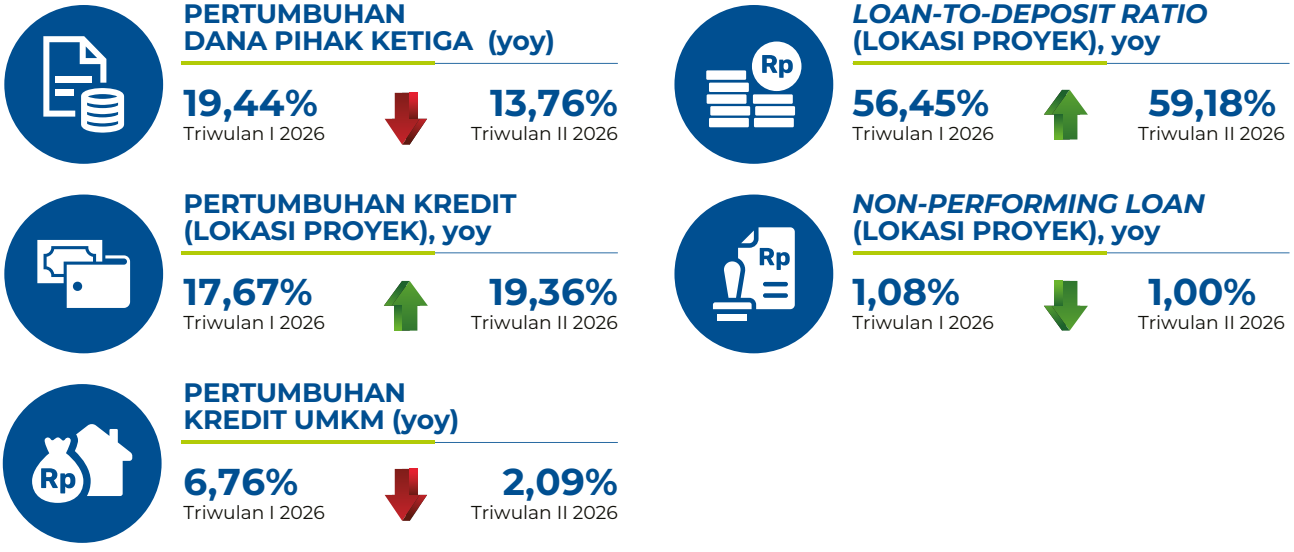

A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

Pada triwulan II 2026, intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang solid dengan profil risiko yang tetap terjaga. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta tetap tumbuh tinggi sebesar 19,36% (yoy), meningkat jika dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (17,67%, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kinerja positif kredit utamanya ditopang oleh penyaluran kredit modal kerja, di tengah penyaluran kredit konsumsi dan investasi yang termoderasi. Sejalan dengan hal tersebut, likuiditas perbankan pada triwulan II 2026 juga tetap terjaga, ditandai dengan dana pihak ketiga (DPK) bank umum yang tetap tumbuh tinggi sebesar 13,76% (yoy), walaupun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 19,44% (yoy). Dari sisi ketahanan, rasio kredit bermasalah tetap terjaga pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,00% (Tabel 3. 1).

Dalam upaya mendorong kinerja bank umum dalam menopang pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia konsisten memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bauran kebijakan nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial. Kedua kebijakan ini didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan.

Bauran berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kapasitas perbankan yang terjaga baik, antara lain dapat dilihat dari kondisi kecukupan likuiditas perbankan dengan diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Dengan *cost of fund* yang dijaga rendah, bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah sehingga memacu pertumbuhan kredit.

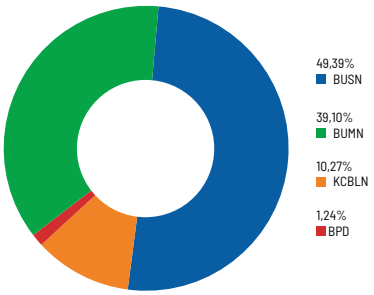

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Seiring dengan kinerja intermediasi dan ketahanan bank yang tetap kuat, total aset bank umum meningkat menjadi sebesar Rp9.529 triliun dengan pertumbuhan sebesar 14,64% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,27% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 49,39%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 39,10%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 10,27%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,24% (Grafik 3.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank)

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Pada triwulan II 2026, penghimpunan DPK bank umum tercatat tumbuh sebesar 13,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,44% (yoy) (Grafik 3.2). Perlambatan ini tecermin

Tabel 3.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

NO	KOMPONEN BELANJA	2022				2023				2024				2025				2026	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
1	Total Asset	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661	7.721	7.810	7.817	7.994	8.246	8.313	8.587	8.949	9.176	9.529
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.742	4.994	5.253	5.602	5.664	5.681
3	Kredit																		
	- Lokasi Bank (LB)	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493	3.580	3.729	3.746	3.915	3.981	4.081	4.108	4.468	4.504	4.808
	- Lokasi Proyek (LP)	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.717	2.817	2.847	3.178	3.197	3.362
4	Pertumbuhan :																		
	- g_Asset (%, yoy)	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96	7,20	8,46	7,32	4,35	6,80	6,44	9,86	11,95	11,27	14,64
	- g_DPK (%, yoy)	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23	7,78	8,80	6,36	3,03	4,48	9,52	16,62	21,90	19,44	13,76
	- g_Kredit Lokasi Bank (%, yoy)	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98	16,51	16,48	13,32	12,06	11,20	9,43	9,67	14,14	13,15	17,80
	- g_Kredit Lokasi Proyek (%, yoy)	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,60	15,83	19,41	19,90	17,30	15,76	13,16	11,69	10,69	18,16	17,67	19,36
5	Intermediasi (tanpa SB)																		
	-Lokasi Bank	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31	78,87	81,78	83,15	85,18	83,95	81,72	78,19	79,75	79,52	84,62
	-Lokasi Proyek	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09	52,90	55,31	57,10	58,52	57,30	56,41	54,20	56,73	56,45	59,18
6	Non performing loan (NPL)																		
	- Lokasi Bank	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81	1,83	1,86	1,78	1,69	1,65	1,55	1,57	1,39	1,42	1,36
	- Lokasi Proyek	1,94	1,70	1,62	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,08	1,13	0,98	1,08	1,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah

pada komponen Giro dan Tabungan, sedangkan Deposito mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan pangsa, DPK di DKI Jakarta didominasi oleh Deposito dengan pangsa sebesar 44,18%, diikuti oleh Giro dengan pangsa 40,43% dan Tabungan dengan pangsa 15,39% (Grafik 3.3).

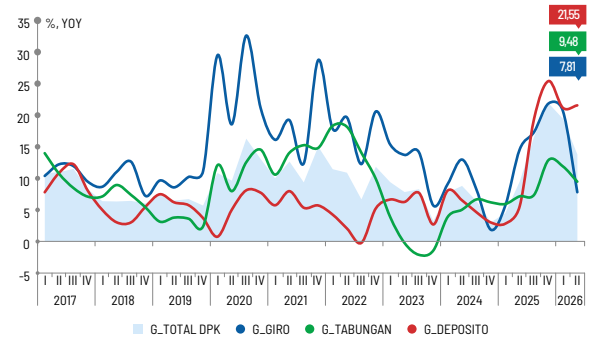

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2 Pertumbuhan DPK Jakarta

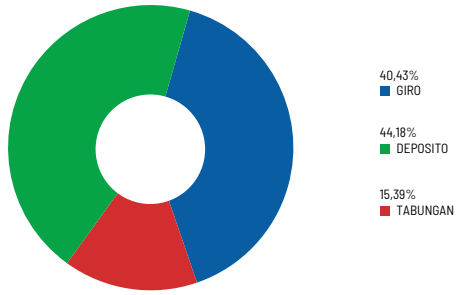

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3 Komposisi DPK Jakarta

Berdasarkan kepemilikan, perlambatan DPK disebabkan oleh DPK milik korporasi, pemerintah, dan RT. DPK pada masing-masing kepemilikan tumbuh 12,17% (yoy), 34,81% (yoy), dan 2,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (20,06% yoy; 42,61% yoy; dan 3,18% yoy). Hal ini sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pusat pada program-program prioritas nasional pada periode triwulan II 2026 serta realisasi konstruksi beberapa proyek swasta dan nasional. (Grafik 3.4)

Secara spasial, DPK di seluruh wilayah Jakarta tetap mencatatkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di Jakarta Timur yang tumbuh sebesar 64,63% (yoy). Berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan DPK Jakarta pada triwulan II 2026 ditopang oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, seiring besarnya pangsa DPK di kedua wilayah tersebut, mengingat peran keduanya sebagai wilayah pusat bisnis di Jakarta (Grafik 3.5).

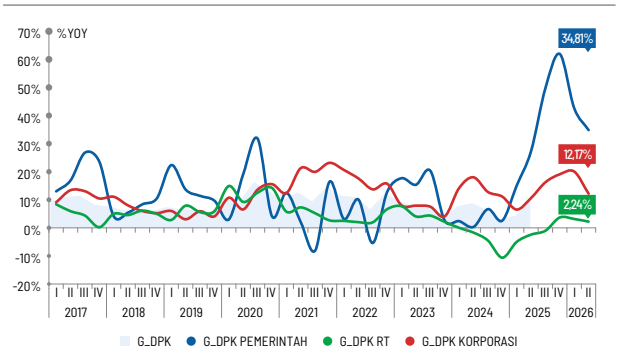

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta

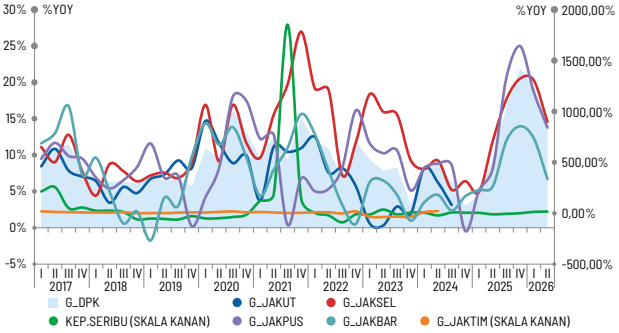

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta

Pangsa DPK DKI Jakarta tetap dominan terhadap Nasional, mencapai 55,25%. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai lebih dari 50% DPK perbankan nasional (Grafik 3.6). Hal tersebut sejalan dengan peran DKI Jakarta sebagai pusat keuangan nasional sehingga tetap menjadi tumpuan penghimpunan dana perbankan, terutama Deposito. Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta pada triwulan II 2026 adalah sebesar 13,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK Nasional yang sebesar 10,22% (yoy) (Grafik 3.7).

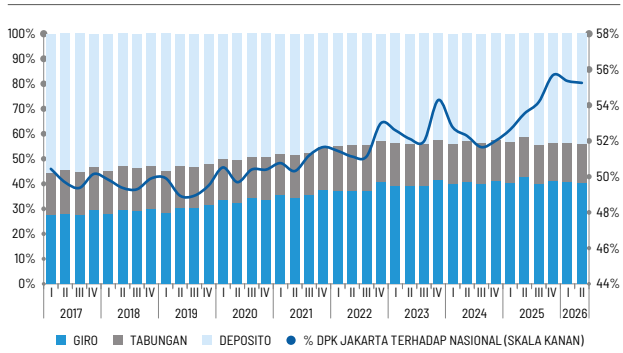

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional

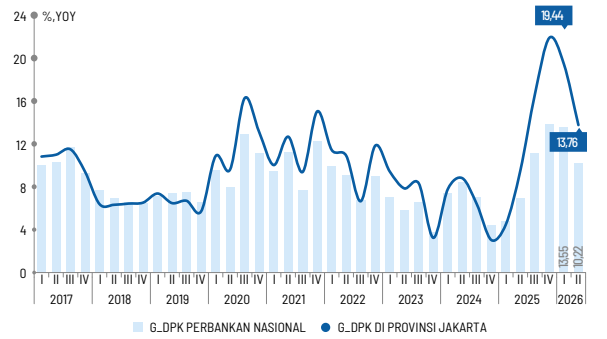

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional

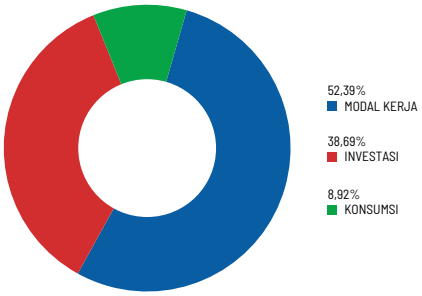

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

Perkembangan Kredit Bank Umum

Penyaluran kredit oleh bank umum di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 mencatatkan pertumbuhan yang solid, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat tumbuh sebesar 19,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,67% (yoy). Kredit berdasarkan lokasi bank juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 17,80% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,15% (yoy). Meningkatnya laju pertumbuhan kredit utamanya didorong oleh peningkatan komponen Kredit Modal Kerja (KMK).

KMK tumbuh sebesar 15,42% (yoy), meningkat dari 11,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kredit Investasi (KI) sedikit melambat dari 31,57% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 30,80% (yoy) pada triwulan II 2026. Relatif kuatnya pertumbuhan KI dan KMK pada triwulan II 2026, sejalan dengan membaiknya kinerja sektor produktif DKI Jakarta terutama pada LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan. Sementara, Kredit Konsumsi (KK) melambat cukup signifikan dari 4,40% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 1,21% (yoy) pada triwulan II 2026 (Grafik 3.8). Berdasarkan pangsanya, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 52,39%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 38,69% dan 8,92% (Grafik 3.9).

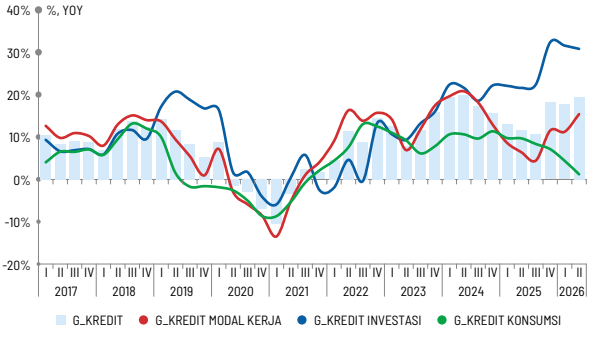

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta

Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi utamanya ditopang oleh pemintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen kebijakan makroprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial yang terus diperkuat dan inovatif mampu membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga penyaluran kredit tetap optimal. Fungsi intermediasi bank yang tetap terjaga, juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik.

Kondisi pertumbuhan kredit yang ekspansif ini terkonfirmasi oleh Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pada triwulan II 2026 tetap menunjukkan tren positif di zona optimis (di atas ambang batas 50). Optimisme ini mencerminkan ekspektasi perbankan terhadap keberlanjutan perbaikan kinerja intermediasi dan ketahanan sektor keuangan yang tetap solid.

Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan II 2026, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 64,62% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 23,73% dan rumah tangga sebesar 11,64% (Grafik 3.10). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit kelompok Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 36,25% (yoy), diikuti oleh kredit korporasi 18,55% (yoy), sementara kredit rumah tangga mencatat kontraksi 0,84% (yoy). Kredit kelompok korporasi dan pemerintah menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kredit kelompok rumah tangga pada triwulan II 2026 menurun dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (Grafik 3.11).

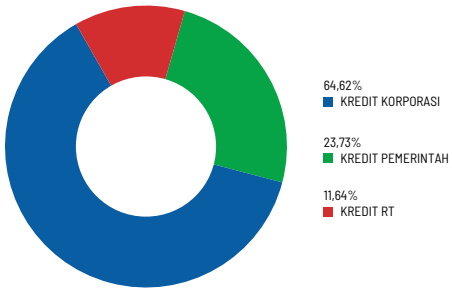

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan

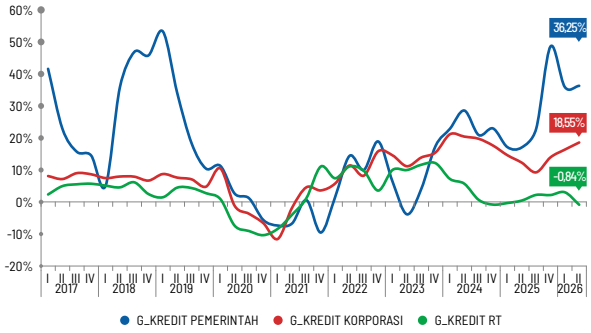

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan

Ditinjau berdasarkan sektornya, semua sektor utama masih mencatat laju pertumbuhan kredit yang meningkat dari triwulan sebelumnya, kecuali sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan (transgud). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit ke sektor konstruksi, diikuti *real estate*, perdagangan, perantara keuangan, industri pengolahan, dan transportasi, pergudangan, dan komunikasi. Utamanya pertumbuhan kredit konstruksi yang tinggi didorong oleh realisasi investasi bangunan dari penyelesaian proyek strategis nasional, swasta, maupun program prioritas pemerintah yang tinggi. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 3.12).

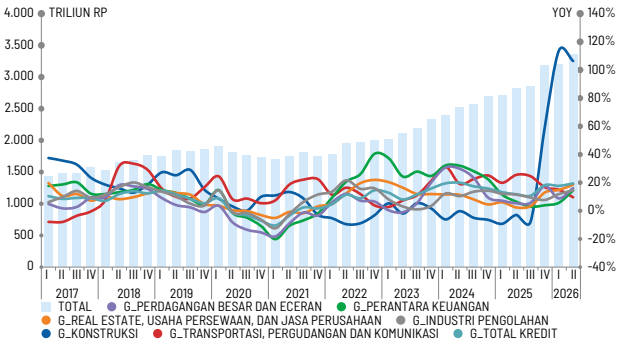

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral

Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai sentra perekonomian dan niaga, sejalan dengan tingginya pertumbuhan DPK pada kedua wilayah tersebut. Pada triwulan II 2026, porsi kredit yang disalurkan kepada kedua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 39,73% dan 35,96% (Grafik 3.13).

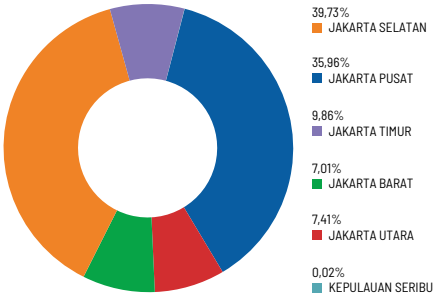

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.13 Sebaran Kredit di Jakarta

Pada triwulan II 2026, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 59,18% dan 84,62%. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 56,73% dan 79,75% sejalan dengan pertumbuhan kredit yang meningkat di tengah perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). (Grafik 3.14).

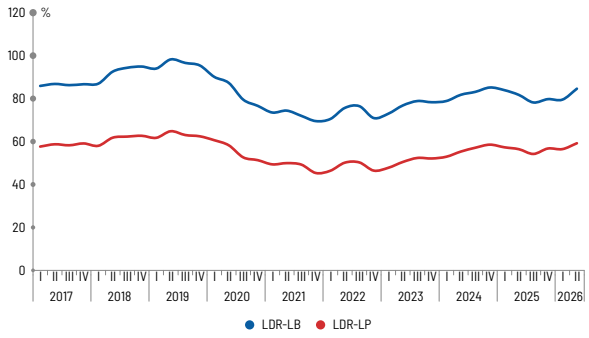

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit juga disalurkan ke luar DKI Jakarta termasuk Bodetabek. Hal ini menjadi salah satu indikator eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi.

Risiko Kredit Bank Umum

Tingkat ketahanan perbankan pada triwulan laporan masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tetap rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Pada triwulan II 2026, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 1,00%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,08%. Rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga tetap rendah sebesar 1,35%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,42% (Grafik 3.15). Begitu juga dengan rasio kredit yang berisiko, *Loan at Risk* (LaR) menurun dari 6,87% menjadi 6,21% (Grafik 3.16).

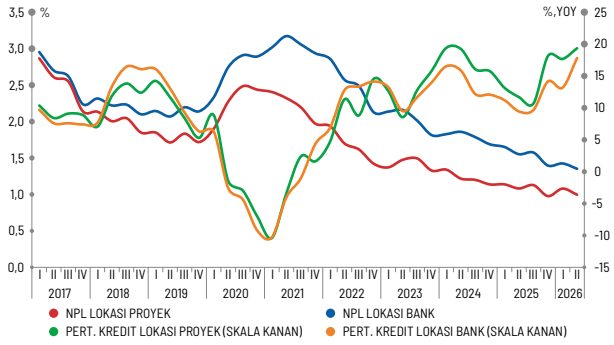

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta

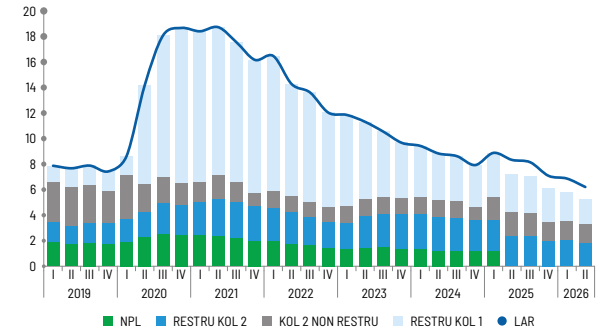

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta

Berdasarkan jenis penggunaan, turunnya rasio NPL dipengaruhi oleh penurunan rasio NPL pada semua jenis kredit penggunaan kecuali kredit konsumsi (Grafik 3.17). Jika dibandingkan dengan nasional, rasio NPL di DKI Jakarta baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 3.18).

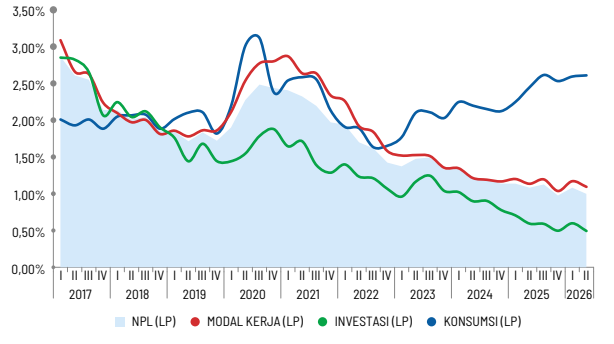

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan

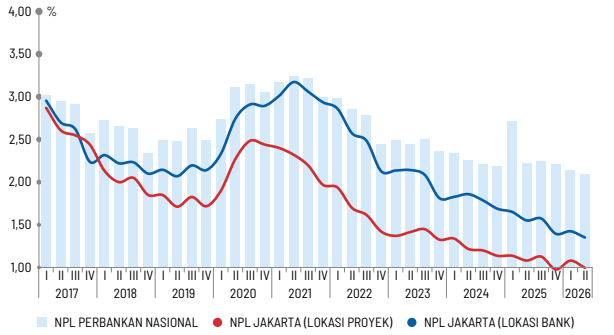

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

Tetap terjaganya rasio NPL perbankan DKI Jakarta di bawah *threshold* 5% tidak lepas dari upaya dan strategi perbankan dalam mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit, terutama yang dipengaruhi faktor tingginya gejolak global akibat dampak perang di Timur Tengah. Perbankan terutama bank-bank besar telah menyiapkan strategi dan penguatan manajemen risiko untuk menghadapi kenaikan risiko kredit. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain diversifikasi aset dan mengembangkan berbagai *credit risk tools* seperti penguatan aspek *credit risk scoring* dan *early warning signal* untuk mendeteksi debitur yang berpotensi mengalami pemburukan kualitas kredit.

Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain potensi pelemahan permintaan ekspor seiring perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang melemah sebagai dampak perang di Timur Tengah, risiko nilai tukar di tengah tetap tingginya ketidakpastian di pasar global, serta meningkatnya tekanan terhadap permintaan domestik, diprakirakan dapat menahan laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun di sisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.

B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

Pada triwulan II 2026, ketidakpastian ekonomi global akibat perang Timur Tengah serta implementasi tarif dagang oleh AS, masih menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang berorientasi ekspor. Hal tersebut diikuti dengan potensi gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas global yang terdampak eskalasi geopolitik, yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor. Keketatan likuiditas di pasar global seiring ketidakpastian

pasar keuangan global yang tetap tinggi, juga memengaruhi kinerja korporasi, terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu di sisi domestik, kinerja korporasi dipengaruhi oleh perkembangan inflasi serta konsolidasi fiskal seiring berbagai kebijakan pemerintah baru, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Risiko perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang terus berlanjut

Pada triwulan II 2026, beberapa negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Amerika Serikat, Tiongkok, dan Thailand (Grafik 3.19). Hal ini sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi global yang pada 2026 berpotensi tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,0% (yoy). Lebih lanjut, kinerja ekspor kepada negara mitra dagang utama menurun akibat disrupsi rantai pasok global (Grafik 3.20).

Ke depan, risiko pelemahan ekonomi global diprakirakan tetap tinggi di tengah masih berlanjutnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan laju inflasi yang meningkat, mendorong sebagian besar bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat. Perkembangan ini mendorong semakin kuatnya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR), yang diperburuk dengan defisit fiskal AS yang membesar. Kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi menyebabkan tingginya volatilitas aliran modal global yang lebih lanjut memperburuk prospek perekonomian global.

Dari sisi *financial channel*, kondisi tersebut berpotensi melemahkan nilai tukar berbagai negara. Kondisi ini perlu diantisipasi karena pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor sehingga biaya produksi meningkat dan memberi tekanan terhadap kinerja sektor usaha. Dari sisi *commodity channel*, volatilitas harga komoditas dapat menambah tekanan inflasi di dalam negeri yang pada gilirannya juga akan memengaruhi kinerja usaha korporasi. Dari sisi *trade channel*, terdapat potensi meningkatnya ekspor ke AS, menggantikan produk Tiongkok dan produk negara lain yang tarif resiprokalnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun demikian, di saat bersamaan terdapat potensi membanjirnya produk Tiongkok ke negara non-AS, termasuk Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja net ekspor.

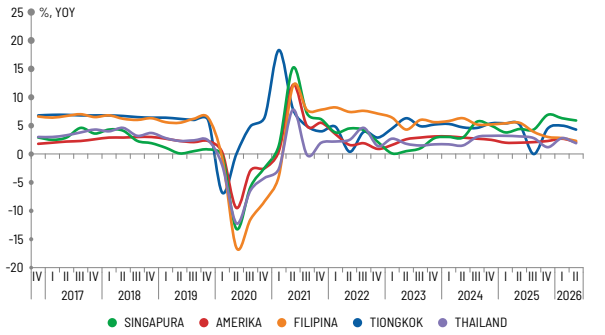

Sumber: Trading Economics

Grafik 3.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama

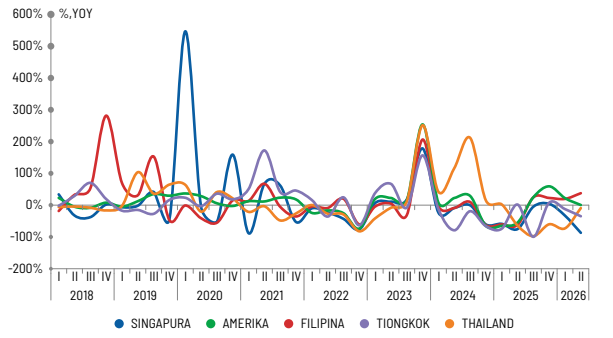

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

2. Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta terkontraksi

Ekspor produk manufaktur Jakarta pada triwulan II 2026 terkontraksi sebesar 4,78% (yoy) lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 9,26% (yoy). Ekspor produk otomotif sebagai ekspor utama produk manufaktur Jakarta yang sempat tertekan pada akhir 2025 karena permasalahan pemenuhan standar uji keselamatan, secara bertahap sudah menunjukkan pemulihan, namun kembali melambat (Grafik 3.21). Ke depan, tekanan fragmentasi perdagangan dan tensi geopolitik global yang berpotensi meningkat, dapat memengaruhi pola dan volume perdagangan global. Untuk itu, penguatan kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi pada industri manufaktur. Selain itu, diversifikasi ekspor ke negara-negara non-tradisional menjadi kunci untuk menjaga kinerja ekspor manufaktur khususnya otomotif.

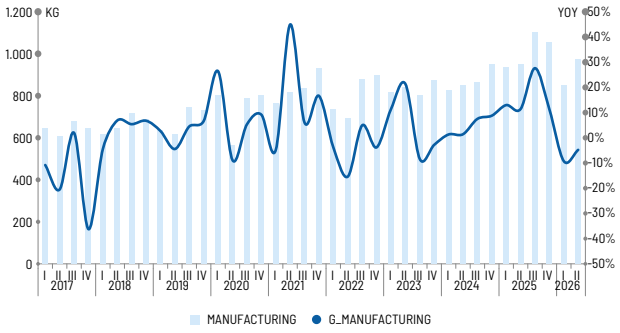

Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta

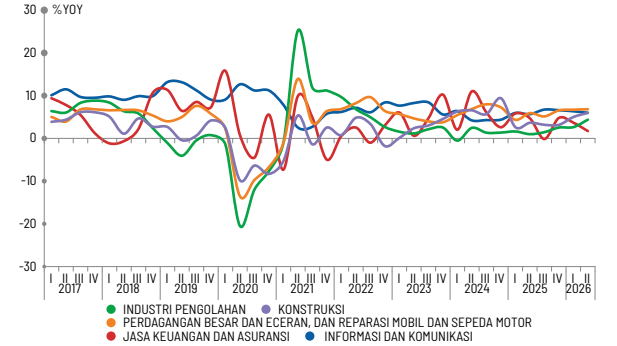

Sumber: BPS

Grafik 3.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta

3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 33,47% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (12,82%; yoy). Pertumbuhan ini terutama ditopang kenaikan realisasi investasi PMA yang tumbuh 58,52% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 11,92% (yoy). Selanjutnya, PMDN tumbuh 21,58% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,40% (yoy). Berdasarkan sektor, realisasi penanaman modal terbesar pada triwulan II 2026 adalah sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan pangsa 31%, Jasa Lainnya dengan pangsa 25%, serta Perdagangan dan Reparasi dengan pangsa 16%. Kinerja investasi yang positif didukung oleh berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun. Selain itu, kondisi makroekonomi dan stabilitas keuangan yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali, juga mendorong peningkatan kepercayaan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Ke depan, kepastian hukum, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta simplikasi dan kejelasan proses perizinan perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Kinerja Korporasi - Umum

Di tengah berbagai tantangan, baik global maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta tetap resilien dan mencatatkan pertumbuhan di atas 5%. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 didukung oleh pertumbuhan yang tinggi pada berbagai komponen LU utama, dengan pertumbuhan tertinggi pada LU Perdagangan (Grafik 3.22). Kinerja positif LU Perdagangan tersebut didorong oleh tetap terjaganya permintaan domestik, meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa, serta tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, LU utama lainnya seperti LU Industri Pengolahan, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, serta Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, mencerminkan masih kuatnya aktivitas dunia usaha di tengah ketidakpastian global. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa korporasi di DKI Jakarta secara umum masih mampu mempertahankan kinerja usaha dan beradaptasi terhadap berbagai dinamika perekonomian yang berlangsung.

Kinerja Korporasi Nonkeuangan

Berdasarkan data terkini (data triwulan II 2026), kinerja korporasi non-keuangan DKI Jakarta yang terdaftar di bursa (selanjutnya disebut korporasi) tetap baik, menguat dari kinerja akhir tahun 2025. Kondisi ini ditunjukkan oleh kemampuan membayar korporasi yang meningkat dengan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

Kinerja penjualan korporasi tumbuh menguat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2026, kinerja penjualan korporasi tumbuh positif sebesar 14,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,78% (yoy) (Grafik 3.23). Pertumbuhan penjualan yang meningkat tersebut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik seiring periode perayaan HBKN Iduladha, periode libur sekolah, penyaluran gaji ke-13 ASN, serta dampak berbagai aktivitas MICE yang ada di Jakarta.

Kinerja penjualan yang masih tetap solid berdampak positif terhadap profitabilitas tahunan korporasi yang tercermin dari rasio *return on asset* (ROA) korporasi yang menguat dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu 4,40% dibandingkan 4,33%. Pemilik modal dan investor juga masih menerima tingkat imbal hasil yang memadai sebagaimana tercermin dari nilai *return on equity* (ROE) yang relatif kuat pada level 8,35% (Grafik 3.24).

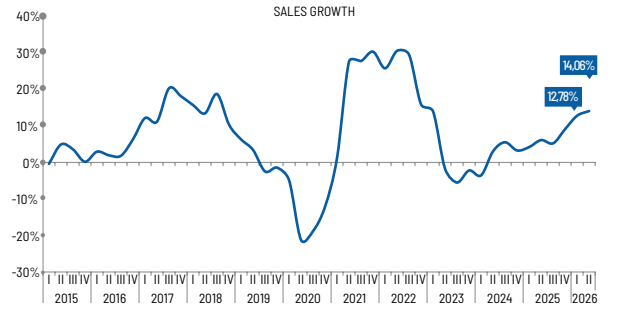

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk,diolah

Grafik 3.23 Penjualan Korporasi DKI Jakarta

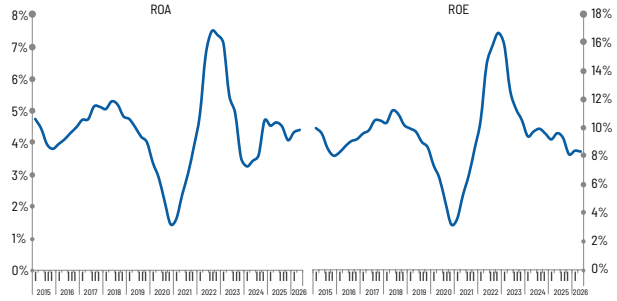

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk,diola

Grafik 3.24 Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta

Kinerja likuiditas korporasi juga terjaga baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *current ratio* yang relatif stabil di level 1,50. Nilai rasio yang semakin tinggi diatas 1 menunjukkan bahwa korporasi non-keuangan DKI Jakarta memiliki kondisi likuiditas yang cukup kuat dan sehat (Grafik 3.25).

Sejalan dengan pertumbuhan penjualan yang sedikit melambat, rasio *inventory turnover* korporasi juga sedikit melambat dari 6,83 pada triwulan I 2026 menjadi sebesar 6,80 pada triwulan II 2026. Namun demikian, korporasi masih cukup efisien dan mampu mengoptimalkan penjualan korporasi dari total aset yang dimiliki sehingga rasio *Asset turnover* (ATO) stabil pada level 0,65 (Grafik 3.26).

Penawaran kredit yang cukup kuat dari perbankan dengan didukung perluasan kebijakan makroprudensial longgar Bank Indonesia mampu menjaga minat sektor korporasi untuk menarik kredit dari perbankan sebagaimana tercermin dari rasio *leverage* yang ditunjukkan melalui *Debt to Equity Ratio* (DER) yang relatif stabil sebesar 0,58 pada triwulan II 2026. Sejalan dengan kondisi likuiditas yang masih memadai serta didukung berbagai upaya efisiensi, sektor korporasi terindikasi mempunyai tingkat kelayakan kredit yang cukup baik (*creditworthiness*). Hal ini tercermin dari rasio median *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat yang sebesar 2,93 kali pada triwulan II 2026 (Grafik 3.27). Nilai rasio ICR di atas 1 menunjukkan bahwa korporasi memiliki kondisi keuangan yang cukup sehat.

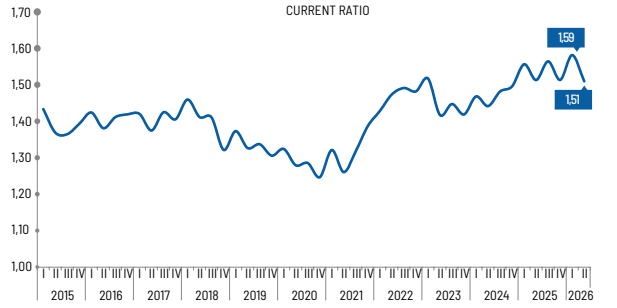

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk,diola

Grafik 3.25 Likuiditas Korporasi DKI Jakarta

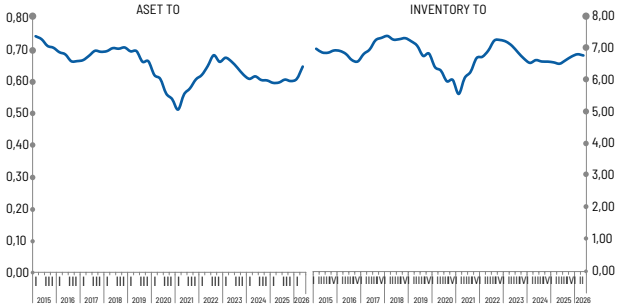

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk,diola

Grafik 3.26 Produktivitas Korporasi DKI Jakarta

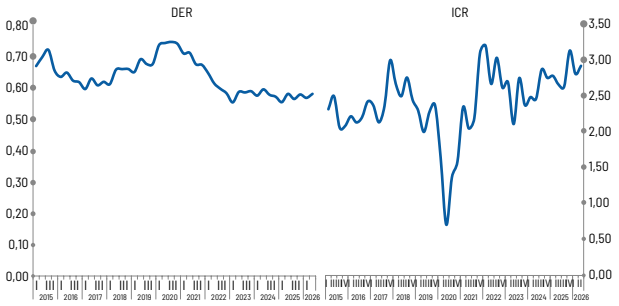

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk,diolah

Grafik 3.27 Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

Perkreditan

Kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat tetap tumbuh tinggi sebesar 18,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,33% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kredit modal kerja korporasi yang tumbuh sebesar 12,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,82% (yoy) (Grafik 3.28). Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi, transportasi pergudangan, dan industri pengolahan sejalan dengan tetap kuatnya kinerja usaha pada sektor-sektor tersebut (Tabel 3.2 dan Grafik 3.29).

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah sebesar 1,03%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,11% (Grafik 3.30). Kondisi ini mencerminkan cukup baiknya kemampuan membayar korporasi dan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.

Tabel 3.2 Kredit Korporasi Menurut Sektor Ekonomi

NO	SEKTOR EKONOMI	Mar-25			Jun-25			Mar-26			Jun-26		
		BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%,yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%,yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%,yoy)	BAKI DEBET (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%,yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	262,46	15,07%	7,64%	265,31	14,83%	6,08%	268,55	13,26%	2,32%	294,48	13,89%	10,99%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	342,91	19,69%	12,72%	352,69	19,72%	11,40%	395,42	19,52%	15,31%	416,22	19,63%	18,01%
3	PERANTARA KEUANGAN	306,99	17,63%	4,38%	287,98	16,10%	-3,81%	302,96	14,95%	-1,31%	299,24	14,11%	3,91%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	206,50	11,86%	5,64%	208,20	11,64%	1,86%	242,06	11,95%	17,22%	251,32	11,85%	20,71%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	216,51	12,43%	16,26%	242,61	13,56%	21,46%	272,69	13,46%	25,95%	297,06	14,01%	22,44%
6	KONSTRUKSI	85,30	4,90%	4,50%	87,93	4,92%	5,91%	157,77	7,79%	84,95%	159,26	7,51%	81,12%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	81,19	4,66%	46,30%	92,20	5,15%	59,30%	91,61	4,52%	12,83%	74,27	3,50%	-19,45%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	121,77	6,99%	81,15%	130,31	7,29%	52,92%	138,96	6,86%	14,12%	137,50	6,48%	5,51%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	27,24	1,56%	2,79%	26,93	1,51%	0,58%	24,37	1,20%	-10,56%	25,89	1,22%	-3,87%
10	LISTRIK, GAS DAN AIR	35,26	2,02%	18,94%	39,53	2,21%	18,36%	65,10	3,21%	84,62%	59,95	2,83%	51,66%
11	LAIN-LAIN	55,50	3,19%	55,08%	55,05	3,08%	49,07%	66,50	3,28%	19,82%	105,33	4,97%	91,33%
Total		**1741,63**	**100,00%**	**14,57%**	**1788,73**	**100,00%**	**12,26%**	**2025,97**	**100,00%**	**16,33%**	**2120,50**	**100,00%**	**18,55%**

Sumber: Bank Indonesia

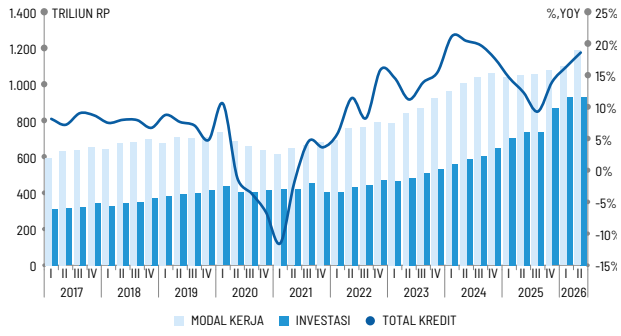

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.28 Pertumbuhan kredit Korporasi

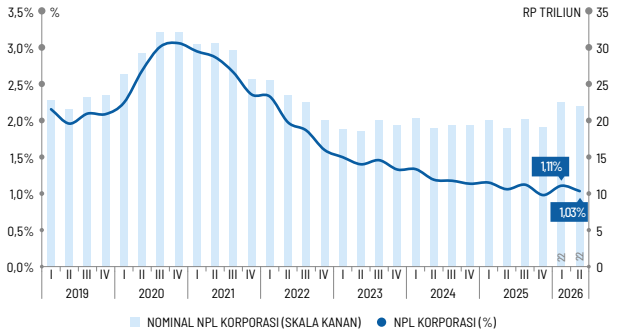

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.30 NPL pada Sektor Korporasi

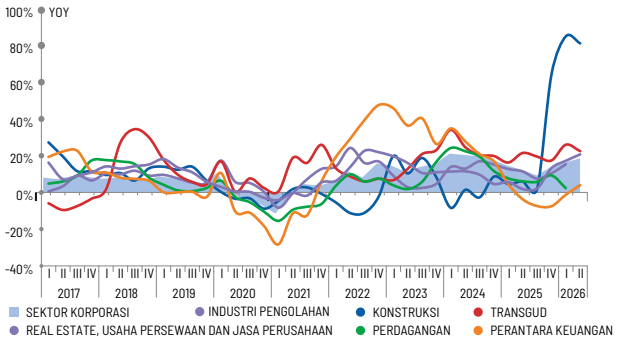

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.29 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi

Dana Pihak Ketiga

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi tetap tumbuh positif meskipun melambat sejalan dengan perlambatan DPK bank umum. Pada triwulan II 2026, DPK Korporasi tumbuh sebesar 12,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,06% (yoy) (Grafik 3.31). Perlambatan pertumbuhan terjadi pada semua jenis DPK Korporasi, dengan kontributor utama pertumbuhan adalah Giro Korporasi diikuti oleh Deposito Korporasi (Grafik 3.32). Laju pertumbuhan komponen Giro pada triwulan II 2026 mencapai 12,42% (yoy) dan menjadi kontributor utama pertumbuhan, mengingat pangsanya yang dominan sebesar 57,32% terhadap keseluruhan DPK korporasi (Grafik 3.33).

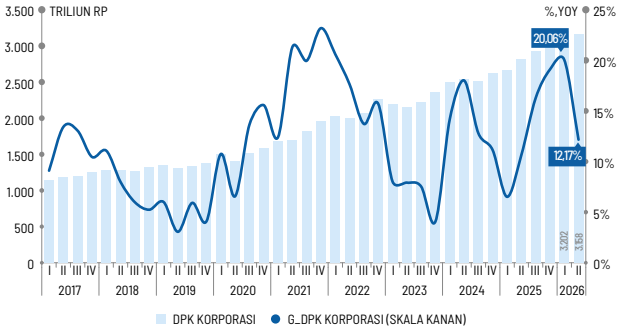

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.31 Perkembangan DPK Korporasi

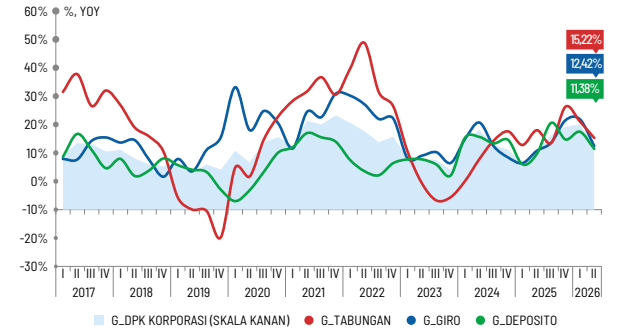

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.32 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi

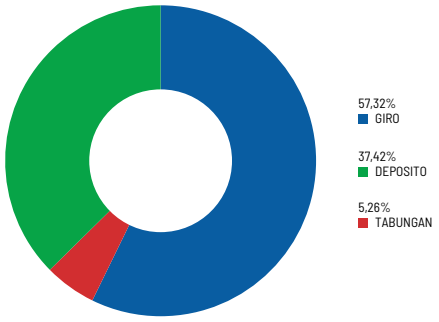

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.33 Komposisi DPK Korporasi

C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan II 2026 secara umum masih kuat meskipun mengindikasikan pelemahan. Kinerja rumah tangga yang berdaya tahan tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan II 2026 terjaga tinggi pada level optimis sebesar 144,4; walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 145,4 (Grafik 3.34). Sejalan dengan itu, Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) pada triwulan II 2026 sebesar 135,10, lebih rendah dari triwulan sebelumnya (136,50) sejalan dengan menurunnya indeks Penghasilan Konsumen (Grafik 3.35).

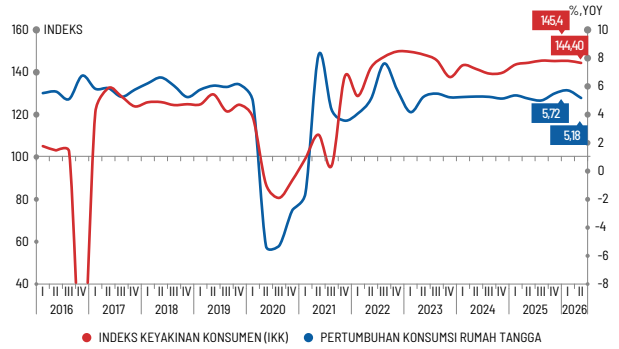

BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.34 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT

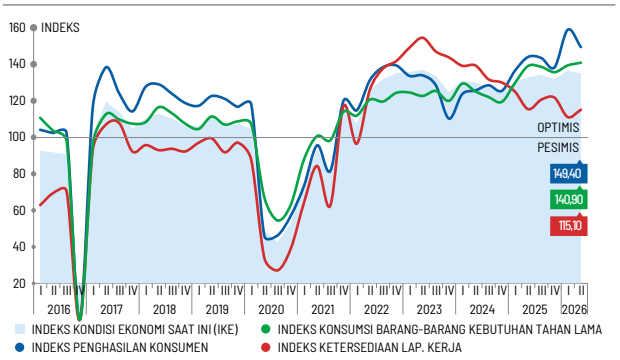

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.35 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

Apabila dilihat lebih dalam lagi berdasarkan tingkat pendapatannya, terjadi potensi peningkatan risiko pada rumah tangga seiring pelemahan daya beli rumah tangga khususnya pada kelas menengah ke bawah seiring penurunan nilai pada tingkat upah rill-nya.

Dalam konteks ini, penurunan konsumsi rumah tangga DKI Jakarta yang lebih dalam lagi tertahan oleh: (i) Perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tecermin dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa, perdagangan, dan transportasi seiring normalisasi aktivitas ekonomi pascapandemi serta meningkatnya mobilitas masyarakat; (ii) Kenaikan upah minimum dan penyesuaian gaji pada sejumlah sektor formal yang mendorong peningkatan pendapatan disposabel rumah tangga, khususnya pada kelompok pekerja tetap; (iii) Meningkatnya aktivitas sosial dan penyelenggaraan berbagai event berskala nasional maupun internasional di Jakarta yang mendorong belanja masyarakat pada sektor makanan-minuman, rekreasi, perhotelan, dan ritel; (iv) Penyaluran bantuan sosial serta berbagai stimulus fiskal dan program perlindungan sosial Pemerintah yang membantu menjaga daya beli, khususnya pada kelompok menengah bawah; serta (v)

Tetap terjaganya optimisme konsumen di tengah stabilitas inflasi dan ekspektasi ekonomi yang membaik, sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, termasuk belanja non-esensial dan *durable goods*.

Peningkatan potensi *spillover* risiko Rumah Tangga terhadap perbankan tecermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) Rumah Tangga meskipun masih di bawah *threshold* 5%. Ke depan, perlu diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi dapat semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, risiko kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Perkreditan

Berbeda dengan total kredit dan kredit korporasi, kredit pada sektor rumah tangga mengalami penurunan pada triwulan II 2026. Kredit rumah tangga tercatat terkontraksi sebesar 0,84% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 3,05% (yoy) (Grafik 3.36). Berdasarkan jenisnya, penurunan kredit rumah tangga dipengaruhi oleh perlambatan kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 4,38% (yoy) dan 0,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,78% (yoy) dan 4,52% (yoy)(Grafik 3.37). Adapun kinerja kredit investasi rumah tangga masih mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 23,43% (yoy), meskipun lebih baik dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 24,31% (yoy) (Grafik 3.38).

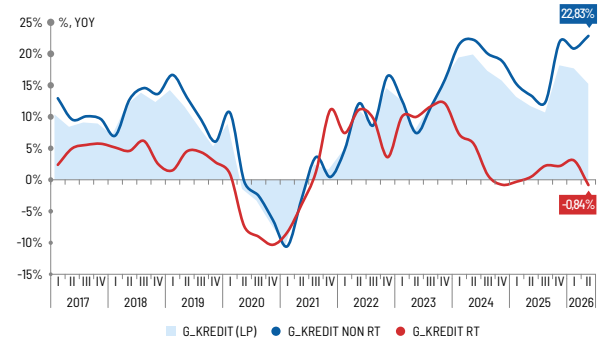

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.36 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

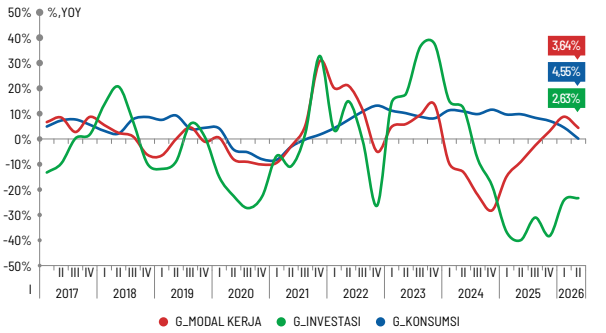

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.37 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga

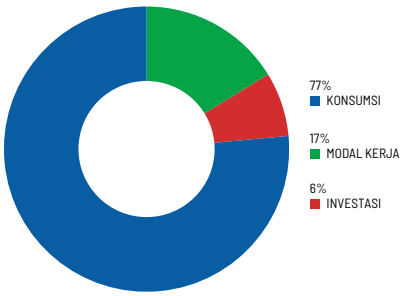

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.38 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga

Di tengah perlambatan kinerja kredit konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat diprakirakan tetap terjaga seiring tetap kuatnya optimisme masyarakat yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Prakiraan tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi moneter yang kondusif sejalan dengan stabilnya suku bunga kredit merespons dari perkembangan BI rate, serta pelonggaran standar penyaluran kredit oleh bank, terutama pada aspek agunan, sehingga mempermudah masyarakat mengakses kredit konsumsi.

Di sisi lain, kredit non rumah tangga tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat, hal tersebut menyebabkan pangsa kredit rumah tangga melanjutkan tren penurunan di triwulan II 2026 menjadi 12,13% (Grafik 3.39).

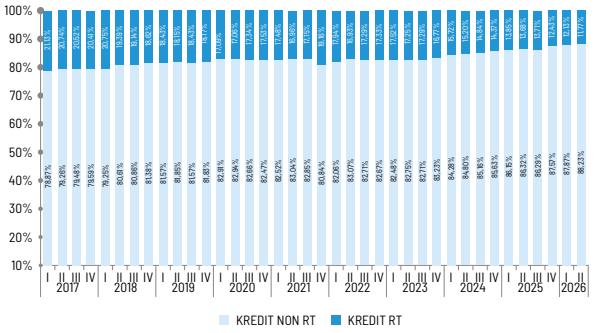

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.39 Komposisi Kredit RT dan Non-RT

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/ NPL) Rumah Tangga masih relatif rendah yaitu sebesar 2,63%, cukup jauh di bawah *threshold* 5%. Rasio NPL pada triwulan II 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,59%. Peningkatan NPL RT dipengaruhi oleh kenaikan kredit konsumsi RT (Grafik 3.40).

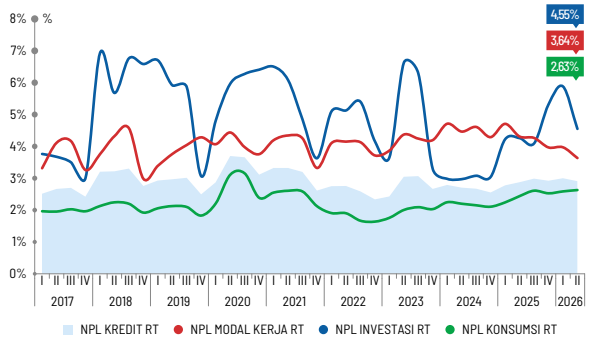

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.40 NPL Kredit Rumah Tangga

Berdasarkan tujuan penyalurannya, penurunan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 didorong oleh penurunan pada ketiga komponen kredit konsumsi rumah tangga, yaitu: kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multiguna. (Grafik 3.41 dan Grafik 3.42).

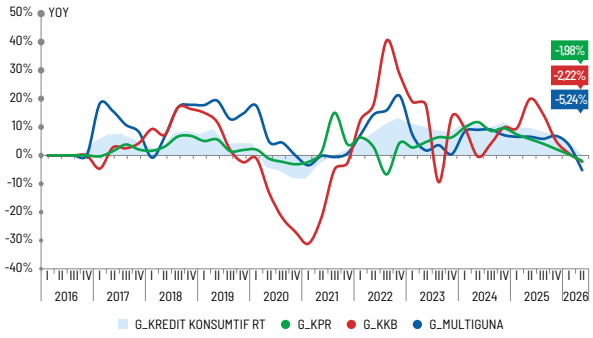

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.41 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga

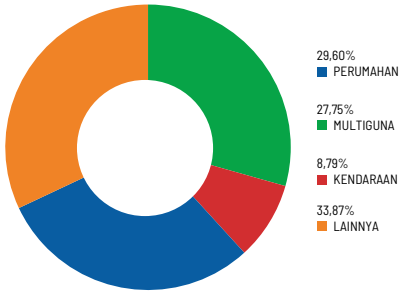

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.42 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Faktor penahan perlambatan kredit multiguna lebih lanjut salah satunya didorong oleh tingginya permintaan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, pengobatan, serta pembelian barang-barang. Fleksibilitas kredit multiguna menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai tujuan, terutama saat kebutuhan mendesak atau prioritas lainnya. Adapun pertumbuhan kredit KPR didukung kebijakan pemerintah memberikan insentif PPN DTP pembelian rumah tapak dan rumah susun. Selain itu, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah menambah alokasi KPR subsidi sebanyak 34.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi MBR diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST). Sementara itu, peningkatan kredit KKB didukung oleh kebijakan Bank Indonesia untuk memperpanjang insentif uang muka kredit (DP) 0% untuk kendaraan bermotor baru hingga Desember 2025.

Kendati demikian, perlambatan kredit rumah tangga tetap harus menjadi perhatian lebih lanjut, khususnya jika perlambatan tidak diiringi peningkatan tabungan yang sesuai. Hal ini dapat mengindikasikan penurunan pendapatan sehingga menyebabkan fenomena penggerusan tabungan.

Dari sisi risiko kredit, sejalan dengan kenaikan NPL kredit konsumsi rumah tangga, kenaikan NPL utamnya didorong oleh peningkatan NPL KPR (Grafik 3.43).

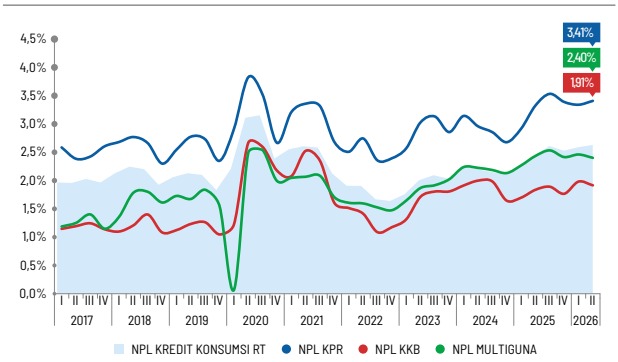

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.43 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga

DPK rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 mencatat pertumbuhan yang positif, dan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK rumah tangga mencatat pertumbuhan 2,24% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 3,18% (yoy) (Grafik 3.44). Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan DPK rumah tangga yang tetap positif ditopang oleh komponen DPK tabungan rumah tangga yang tetap tumbuh kuat, dan

perbaikan kontraksi pada komponen DPK deposito rumah tangga. DPK tabungan rumah tangga tumbuh 8,23% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (10,58%; yoy). Giro rumah tangga pada triwulan II 2026 terkontraksi sebesar 16,80% (yoy) menurun dari triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan 1,93% (yoy). Di sisi lain, penurunan total DPK rumah tangga lebih lanjut utamanya tertahan oleh perbaikan komponen DPK deposito rumah tangga yang terkontraksi sebesar 2,51% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 4,99% (yoy)(Grafik 3.45).

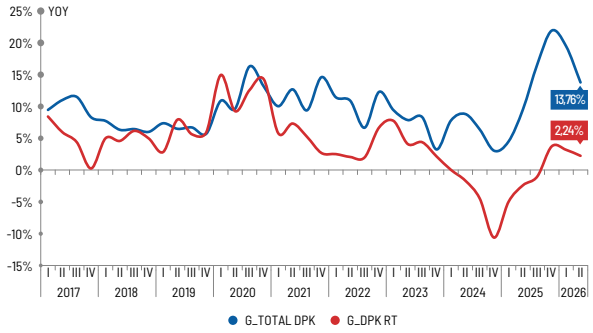

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.44 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

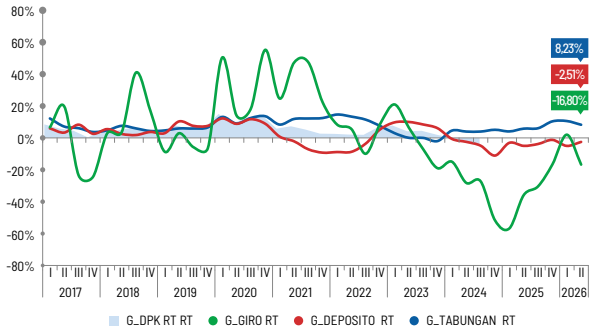

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.45 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga terhadap total DPK di DKI Jakarta cenderung menurun (Grafik 3.46). Sementara itu, pangsa DPK rumah tangga terhadap total DPK didominasi oleh tabungan sebesar 12,44%, diikuti oleh deposito dan giro masing-masing sebesar 9,54% dan 1,00% (Grafik 3.47).

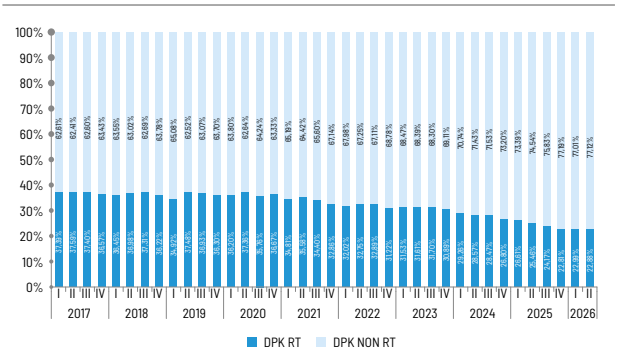

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.46 Komposisi DPK

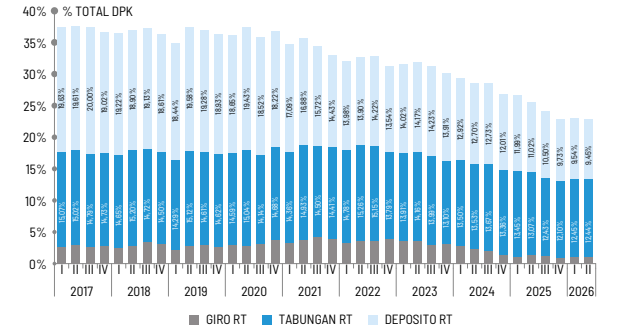

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.47 Komposisi DPK Rumah Tangga

D. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR UMKM

Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan perlambatan meskipun masih mengalami pertumbuhan yang positif. Pada triwulan II 2026, kredit UMKM tumbuh sebesar 2,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,76% (yoy)(Grafik 3.48). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 76,09% dan diikuti kredit investasi sebesar 23,91% (Grafik 3.49).

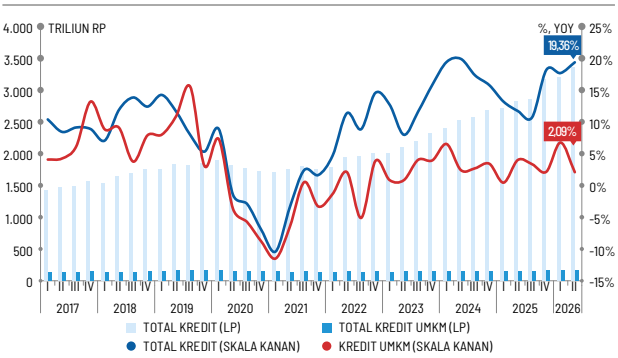

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.48 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta

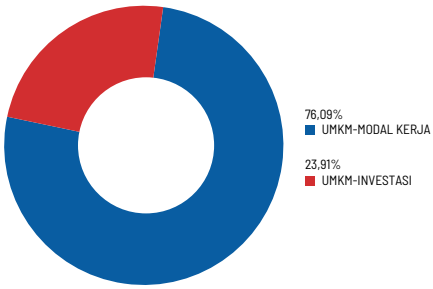

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.49 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan skala usahanya, pertumbuhan kredit UMKM ditopang oleh pertumbuhan kredit skala mikro. Pada triwulan II 2026, kredit UMKM skala mikro tumbuh sebesar 7,81% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM skala kecil (1,22% yoy) dan kredit UMKM skala menengah (0,91% yoy) (Grafik 3.50).

Secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 5,0% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi karakteristik sektor usaha di Jakarta yang lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

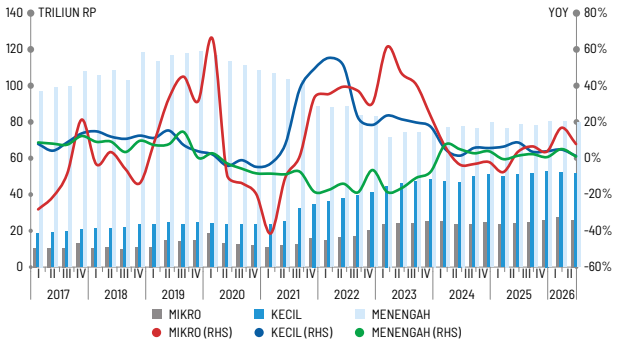

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.50 UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 39,60%, diikuti sektor *real estate* (11,00%), industri pengolahan (9,26%), sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (7,90%) dan sektor konstruksi (5,90%) (Grafik 3.51).

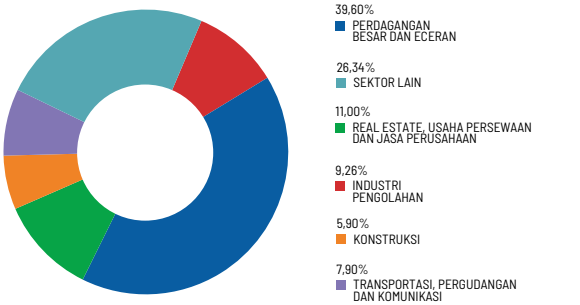

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.51 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

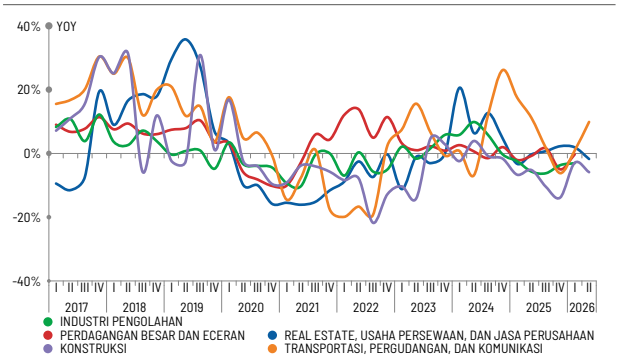

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.52 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama

Pertumbuhan kredit yang positif ini mengindikasikan perbankan masih mempunyai minat untuk membiayai kredit kepada UMKM dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini seiring dengan risiko kredit UMKM yang masih cukup tinggi meskipun mulai menunjukkan penurunan, baik jenis kredit Modal Kerja maupun Investasi (Grafik 3.53). Berdasarkan kelompok debiturnya, penurunan risiko kredit UMKM terjadi pada seluruh kelompok (Grafik 3.54).

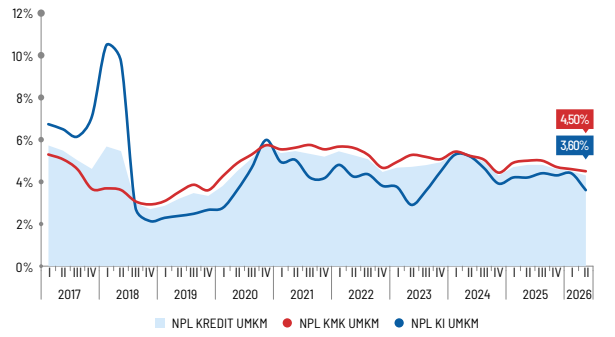

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.53 NPL Kredit UMKM

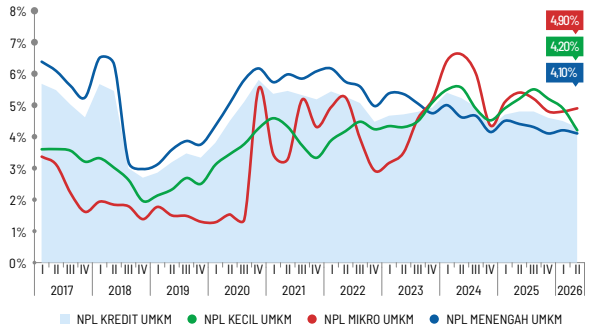

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.54 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Pada tahun 2026, dukungan pemerintah bagi UMKM tetap diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan usaha melalui perluasan akses pembiayaan, pengurangan beban usaha, serta dukungan penanganan debitur terdampak kondisi tertentu. Dari sisi pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menjadi instrumen utama dalam menyediakan kredit/pembiayaan bersubsidi bagi UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai, namun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pembiayaan komersial, sehingga diharapkan dapat memperluas akses terhadap modal kerja dan investasi serta menopang pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, pemerintah melalui PP No. 20 Tahun 2026 mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun, serta fasilitas pembebasan PPh atas bagian omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi, yang diharapkan dapat menjaga likuiditas dan mengurangi beban administrasi pelaku UMKM. Sementara itu, bagi UMKM yang masih menghadapi kesulitan pembayaran kredit, restrukturisasi tetap dapat dilakukan oleh lembaga keuangan sesuai profil risiko dan kemampuan bayar debitur, sedangkan pada wilayah terdampak bencana yang ditetapkan, OJK dapat memberikan perlakuan khusus berupa kemudahan penilaian kualitas kredit, penetapan kualitas lancar atas kredit yang direstrukturisasi, serta peluang pemberian pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas kredit sebelumnya.

Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pengembangan UMKM di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pilar kebijakan yakni korporatisasi, pengembangan kapasitas, dan akses pembiayaan. Program pengembangan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2026 (April – Juni 2026) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: i) program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) 2026, ii) Export Coaching Program (ECP) 2026, iii) promosi dan fasilitasi perdagangan.

1. Program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) 2026

Program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) merupakan program pengembangan UMKM KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global melalui penguatan kapasitas usaha, pola pikir kewirausahaan, serta perluasan akses pasar. Pada tahun 2026, program JAWARA diikuti oleh 879 UMKM pendaftar, dengan 352 UMKM lolos seleksi administrasi dan mengikuti pembinaan awal melalui JAWARA Go-Onboard yang berfokus pada penguatan dasar bisnis dan digitalisasi. Selanjutnya, masing-masing 40 UMKM terpilih, berkesempatan mengikuti pelatihan kategori Go-Export, Go-Sustain, dan Go-Tourism. Go-Export diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM memasuki pasar ekspor, Go-Sustain berfokus pada penerapan praktik bisnis berkelanjutan, sedangkan Go-Tourism mendorong pengembangan UMKM pendukung sektor pariwisata.

Memasuki triwulan II 2026, rangkaian pembinaan JAWARA dilaksanakan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan fokus masing-masing kategori. Peserta JAWARA Go-Onboard mengikuti enam sesi pelatihan daring pada Mei–Juni 2026 dengan materi *Digital Presence* dan *Digital Onboarding* untuk memperkuat kemampuan UMKM dalam membangun dan mengoptimalkan kanal digital. Sementara itu, peserta Go-Export, Go-Tourism, dan Go-Sustain mengikuti pelatihan luring pada 12–13 Mei 2026. Peserta Go-Export dan Go-Tourism memperoleh materi kewirausahaan, pengelolaan dan praktik laporan keuangan, identifikasi dan desain produk, regulasi negara tujuan ekspor serta penguatan nilai tambah produk wisata. Adapun peserta Go-Sustain memperoleh materi *mindset* UMKM berkelanjutan, prinsip *Do No Significant Harm*, dan mitigasi perubahan iklim. Seluruh rangkaian pelatihan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas dan kesiapan UMKM sesuai dengan fokus pengembangan masing-masing kategori.

Selain pelaksanaan pelatihan, monitoring terhadap peserta juga dilakukan secara berkala melalui kanal daring, antara lain melalui *WhatsApp Group* dan pertemuan secara daring. Monitoring tersebut dilakukan untuk mendukung keberlanjutan proses pembinaan serta memantau perkembangan peserta selama mengikuti rangkaian Program JAWARA.

2. Export Coaching Program (ECP) 2026

Export Coaching Program (ECP) merupakan program pendampingan bagi UMKM berorientasi ekspor yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha untuk memasuki pasar internasional. Program ECP 2026 diikuti oleh 122 UMKM pendaftar, dengan 30 UMKM terpilih untuk mengikuti rangkaian pendampingan intensif. Peserta memperoleh pembinaan yang difokuskan pada penguatan kapasitas ekspor, peningkatan kualitas dan daya saing produk, serta strategi pengembangan pasar internasional. Pada awal Mei 2026, telah dilaksanakan pembukaan pendampingan ECP sebagai penanda dimulainya rangkaian pembinaan UMKM tahun 2026.

Pada triwulan II 2026, ECP memasuki tahap *Market Development* yang berfokus pada penguatan kemampuan peserta dalam

mengembangkan pasar ekspor, dengan materi meliputi pengenalan dan praktik HS Code, riset pasar ekspor, pencarian dan *follow-up* data calon *buyer*, penentuan harga jual ekspor, persiapan bisnis ekspor, serta penyusunan *Business Model Canvas*. Peserta juga dibekali persiapan *Business Pitching & Matching*, pembuatan *company profile*, dan *digital marketing* untuk mendukung optimalisasi *marketplace*.

Selanjutnya, dilaksanakan *Training of Exporters* dalam bentuk pelatihan selama 3 hari dengan materi yang mencakup prosedur ekspor, tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, prosedur transportasi dan penanganan kargo ekspor, sistem pembayaran dan pembiayaan ekspor, simulasi ekspor, korespondensi bisnis, serta negosiasi dan kontrak dagang. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan peserta dalam melaksanakan proses ekspor secara praktis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Promosi dan Fasilitasi Perdagangan

Dalam upaya memperluas akses pasar bagi UMKM, promosi produk-produk unggulan terus diakselerasi melalui partisipasi pada berbagai pameran dan *strategic event*, baik di dalam maupun luar negeri. Pada triwulan II 2026, sejumlah UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti kegiatan promosi perdagangan sebagai bagian dari upaya peningkatan eksposur produk, perluasan jejaring bisnis, serta penjajakan peluang pasar internasional, antara lain melalui kegiatan:

a) Food and Hotel Asia Food & Beverages (FHA F&B) 2026 di Singapura (21-24 April 2026)

Kegiatan promosi perdagangan internasional ini merupakan pameran makanan, minuman, dan perhotelan terbesar di Asia. Salah satu UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT Pangan Laut Nusantara (Kanasin) berkesempatan untuk ikut serta pada kegiatan dimaksud. Melalui partisipasi ini, diharapkan UMKM dapat memperluas akses ke pasar global serta menjalin kontrak dagang internasional.

b) Salon Internasional De l'Alimentation (SIAL) di Shanghai, Tiongkok (18-20 Mei 2026)

Kegiatan promosi perdagangan internasional ini diikuti oleh salah satu UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kultiva Indonesia Makmur (Kultiva Co.). SIAL Shanghai merupakan pameran produk *food and beverage* berskala global yang menjadi salah satu platform strategis untuk memperluas akses pasar, khususnya ke Tiongkok dan kawasan Asia. Keikutsertaan pada kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan eksposur produk, memperluas jejaring bisnis, serta membuka peluang kerja sama dan akses pasar internasional.

c) Korea Import Expo di Seoul, Korea Selatan (23-25 Juni 2026)

UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT Crispy Salad Moonbite dan Casa Grata turut ikut serta dalam pameran dagang internasional yang diselenggarakan oleh Korea Importers Association (KOIMA). Kegiatan ini mempertemukan eksportir global dengan importir, distributor, retailer, dan *buyer* di Korea Selatan dan berfokus pada produk impor dengan target *Business to Business* (B2B.

d) SEMASA Piknik 2026 di Jakarta (26-28 Juni 2026)

Sebanyak 10 UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta turut berpartisipasi pada SEMASA Piknik 2026, yaitu Strawberry Patch, Sancraft, Birru Jewelry, Rhoerhy Craft, Hijasmita, Karina Design, Risyah, Royal Health Food, Crispy Salad, dan Cangcomak. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Lapangan Banteng ini mengusung konsep *creative market* di ruang terbuka dengan memadukan pameran UMKM, produk kreatif, kuliner, pertunjukan musik, seni, serta berbagai aktivitas komunitas yang menjadi wadah promosi bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat.

e) Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 di Jakarta (4-5 Juli 2026)

Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 merupakan wadah kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media) dalam upaya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Jakarta. Diselenggarakan pada 4–5 Juli 2026 di Istora Senayan, JKF 2026 menghadirkan pameran UMKM, *business matching*, festival ekonomi kreatif, edukasi, layanan publik, serta berbagai kompetisi sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.

Sebanyak 377 tenant berpartisipasi dalam festival ini, terdiri atas 290 tenant UMKM dan 87 tenant layanan, edukasi, serta komunitas yang berkolaborasi dengan 67 lembaga dan instansi. Total transaksi sepanjang rangkaian JKF mencapai Rp55 miliar, termasuk *business matching* pembiayaan dan ekspor UMKM.

BOKS 4

Menutup Celah, Membuka Peluang:

Creative Financing untuk Pembiayaan Daerah

Kebutuhan pembangunan daerah terus meluas, sementara APBD harus tetap menopang layanan dasar dan belanja rutin. Pembangunan transportasi, air bersih, sanitasi, pengendalian banjir, perumahan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur digital membutuhkan biaya besar serta kesinambungan lintas periode pemerintahan. Bappeda Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan pembiayaan pembangunan 2025-2029 mencapai sekitar Rp1.064 triliun, dengan kesenjangan pendanaan sekitar Rp595 triliun apabila hanya mengandalkan kapasitas fiskal yang ada.

Kesenjangan itu tidak dapat ditutup hanya dengan menambah belanja APBD. Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem pembiayaan yang menggabungkan sumber publik, swasta, pasar modal, lembaga keuangan, serta nilai ekonomi aset dan ruang. Pemanfaatan *creative financing* menjadi kebutuhan strategis untuk mendapatkan alternatif pendanaan berbagai proyek strategis di Jakarta.

Pembiayaan kreatif tidak dapat dibangun di atas fondasi fiskal yang rapuh. Investor dan mitra usaha menilai bukan hanya kelayakan proyek, tetapi juga kapasitas pemerintah daerah memenuhi kewajiban, kualitas data, konsistensi kebijakan, dan transparansi pengelolaan keuangan. Karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui digitalisasi merupakan bagian integral dari strategi *creative financing*. Sampai dengan 7 Agustus 2026, realisasi pajak daerah di DKI Jakarta mencapai Rp28,864 triliun atau 57,85 persen dari target Rp49,898 triliun, tumbuh 2,07% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di balik angka agregat itu terdapat agenda transformasi: integrasi aplikasi, data, dan infrastruktur; perluasan kanal layanan; penguatan pengawasan dan pemeriksaan; serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi memberi dampak pada dua sisi sekaligus. Pada sisi layanan, implementasi Coretax, e-BPHTB, e-Reklame, pembayaran pajak melalui QRIS, dan kanal digital mengurangi antrean, dokumen berganda, biaya cetak, proses manual, serta ruang terjadinya *fraud*. Sebagai contoh, inovasi pembayaran QRIS TAP untuk Pajak Kendaraan Bermotor memangkas waktu layanan dari sekitar enam menit menjadi satu menit per transaksi. Pada sisi pengawasan, integrasi data kependudukan, NPWP, transaksi, serta data spasial PBB-P2 dan BPHTB memperbaiki kualitas basis pajak dan ketepatan penilaian. Porsi kanal pembayaran digital pajak dan retribusi daerah juga mencapai 58,96% pada 2025, menunjukkan pergeseran nyata dalam perilaku pembayaran.

Terdapat berbagai instrumen pembiayaan daerah mengikuti karakteristik proyek. Obligasi atau sukuk daerah dapat digunakan untuk infrastruktur berumur panjang yang memberi manfaat lintas generasi. Jakarta merencanakan persiapan penerbitan obligasi daerah pada tahun 2027 dengan nilai indikatif Rp5,6 triliun untuk sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, sumber daya air, dan pengendalian banjir. Instrumen ini dapat menyediakan tenor yang lebih sesuai dengan umur layanan aset, tetapi tetap menuntut kemampuan membayar, disiplin pengungkapan, serta seleksi proyek yang ketat.

Untuk proyek yang memerlukan keahlian desain, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, pemerintah dapat menggunakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Nilai KPBU bukan sekadar memindahkan pembiayaan dari APBD, melainkan membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya dan mengaitkan pembayaran dengan kinerja layanan. Namun, persiapannya cukup kompleks. Kelayakan finansial sering kali bergantung pada dukungan pemerintah dan perubahan prioritas dapat mengganggu kesinambungan proyek. Karena itu, KPBU memerlukan studi kelayakan yang matang, penasihat transaksi, dan kepastian komitmen lintas periode.

Proyek pengendalian banjir, transportasi rendah emisi, air limbah, dan pengelolaan sampah juga dapat memanfaatkan *climate finance* atau *blended finance* dengan menggabungkan hibah, pembiayaan lunak, penjaminan, dan modal komersial. Sementara itu, pembangunan kawasan dapat menangkap kenaikan nilai lahan melalui optimalisasi aset, *naming rights*, pemanfaatan ruang, atau *land value capture*. Setiap skema tetap harus menjaga transparansi, nilai manfaat terbaik, dan perlindungan kepentingan publik.

Pada akhirnya, keberhasilan *creative financing* bukan diukur dari besarnya dana yang dihimpun, melainkan selesainya infrastruktur, membaiknya layanan, terkendalinya risiko fiskal, dan meluasnya manfaat pembangunan. APBD tetap menjadi jangkar, tetapi digunakan lebih strategis untuk menyiapkan proyek, menyediakan dukungan yang terukur, dan menarik modal lain secara bertanggung jawab.

10.28
LTE
Scan QRIS
SAYUR DOWI
A01
SATU QRIS UNTUK SEMUA
QRIS READY
Generate QRIS
Payment
Transfer

Bab 4

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2026, peredaran uang kartal di DKI Jakarta tercatat mengalami net inflow sejalan pola historis setelah periode HBKN Ramadan Idulfitri pada triwulan sebelumnya. Transaksi pembayaran nontunai tetap tumbuh yang didukung perluasan akseptasi QRIS. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) tumbuh sebesar 56,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 30,78% (yoy). Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan permintaan valuta asing masyarakat pada KUPVA BB seiring peningkatan kebutuhan, baik karena faktor musiman maupun antisipasi permintaan ke depan. Dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,57% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,44% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh menurunnya transaksi *outgoing* (di dalam maupun ke luar negeri) di tengah meningkatnya transaksi *incoming* (dari luar ke dalam negeri) dibandingkan triwulan sebelumnya.

PERTUMBUHAN *INFLOW* TRANSAKSI UANG KARTAL (yoy)

27,75% Triwulan I 2026 → **-24,90%** Triwulan II 2026

PERTUMBUHAN *OUTFLOW* TRANSAKSI UANG KARTAL (yoy)

-12,96% Triwulan I 2026 → **15,96%** Triwulan II 2026

PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI BI-RTGS (yoy)

42,10% Triwulan I 2026 → **27,16%** Triwulan II 2026

PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI SKN-BI (yoy)

-12,18% Triwulan I 2026 → **11,34%** Triwulan II 2026

A. KONDISI UMUM

Pada triwulan II 2026, arus kas di DKI Jakarta tercatat pada posisi *net inflow* yang sejalan dengan pola historis setelah periode musiman bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri di triwulan sebelumnya. Adapun indikator sistem pembayaran nontunai pada triwulan II 2026 tercatat tetap tumbuh, baik bernilai besar maupun ritel (kliring kredit, kartu kredit, dan uang elektronik). Sementara itu, akseptasi QRIS terus meningkat dengan kontribusi volume transaksi QRIS DKI Jakarta terhadap nasional sebesar 35,47% serta perluasan fitur QRIS *cross border*.

B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Peredaran uang kartal di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 mengalami *net inflow* sebesar Rp4,57 triliun. Hal ini menunjukkan jumlah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia *(cash inflow)* lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia *(cash outlow)* seiring dengan normalisasi setelah tingginya permintaan uang kartal pada periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di triwulan sebelumnya. Secara rinci, *cash outflow* dan *cash inflow* DKI Jakarta pada triwulan II 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp24,36 triliun dan Rp28,94 triliun. Pertumbuhan *cash outflow* pada triwulan II 2026 meningkat menjadi 15,29% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 12,96%. Di sisi lain, *cash inflow* terkontraksi 24,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,75% (yoy).

Sementara itu, jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat sebanyak 14.623 lembar. Jumlah temuan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang mencapai 8.670 lembar. Sebagai tindak lanjut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pelaksanaan kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) sebagai upaya menjaga kualitas dan keaslian uang Rupiah yang beredar di masyarakat. Penguatan kampanye dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menjaga kualitas uang Rupiah agar tetap layak edar melalui prinsip 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi).

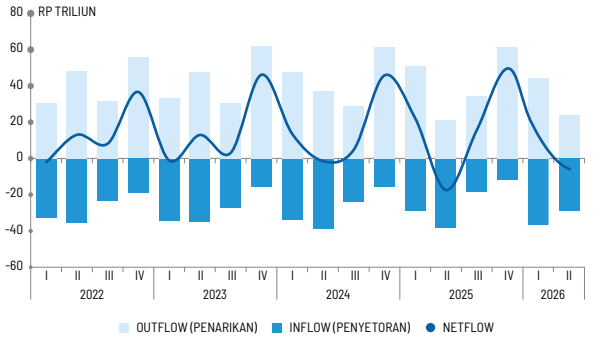

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal

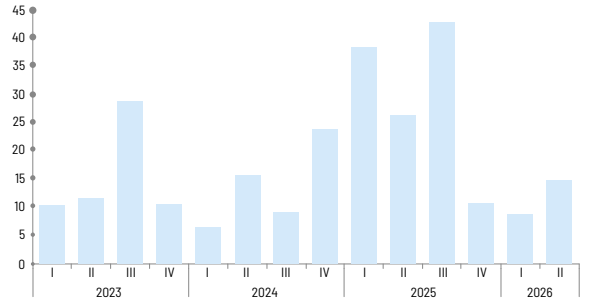

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya

C. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Pada triwulan II 2026, transaksi BI RTGS di DKI Jakarta tercatat mengalami pertumbuhan, baik dari sisi nilai maupun volume. Volume transaksi BI-RTGS mengalami akselerasi dari 4,52% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 13,36% (yoy) atau tercatat 1,20 juta transaksi pada triwulan II 2026. Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS di triwulan II 2026 mencapai Rp12.237 triliun atau tumbuh 27,16% (yoy). Pertumbuhan nilai transaksi BI-RTGS tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 42,10% (yoy). Perlambatan pertumbuhan nilai transaksi mengindikasikan moderasi aktivitas bisnis berskala besar, sejalan dengan sikap pelaku usaha dan industri yang semakin selektif dan berhati-hati dalam melakukan ekspansi di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global

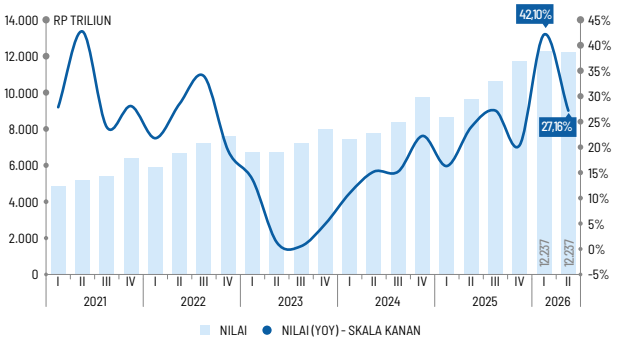

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS

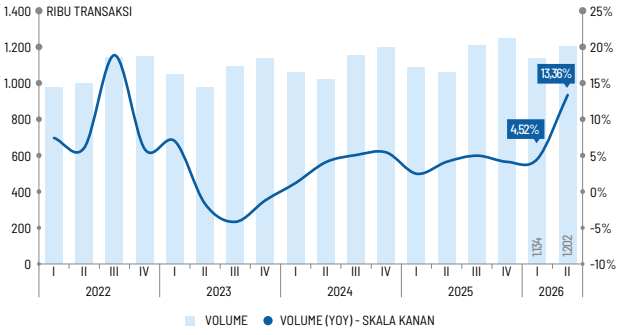

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS

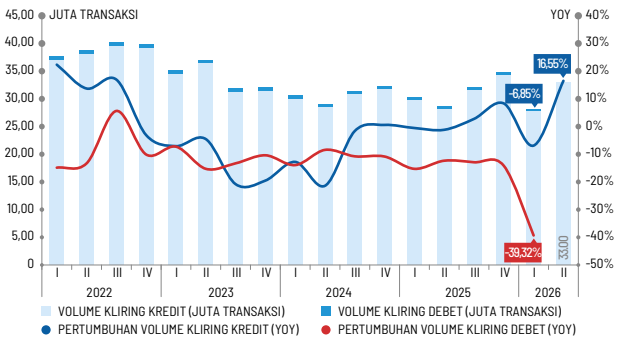

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Kinerja transaksi kliring di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara total, nilai transaksi melalui SKNBI di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 mencapai Rp1.018,64 triliun dengan volume sebesar 33,39 juta warkat. Pertumbuhan nilai dan volume transaksi SKNBI pada triwulan II 2026 tercatat masing-masing sebesar 11,34% (yoy) dan 16,22% (yoy). Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2026 dengan nilai dan volume transaksi SKNBI yang terkontraksi masing-masing sebesar 12,18% (yoy) dan 7,32% (yoy).

Nilai transaksi SKNBI di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 didominasi oleh kliring kredit dengan pangsa 98,03%. Nilai transaksi kliring kredit mencapai Rp998,55 triliun dengan volume sebesar 33 juta warkat. Secara tahunan, nilai dan volume transaksi kliring kredit tersebut meningkat masing-masing sebesar 12,61% (yoy) dan 16,55% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang mengalami kontraksi dengan nilai transaksi sebesar 12,02% (yoy) dan volume transaksi sebesar 6,85% (yoy).

Di sisi lain, transaksi kliring debet tercatat mengalami kontraksi baik nilai maupun volume pada triwulan II 2026. Nilai transaksi kliring debet mencapai Rp20,08 triliun dengan volume sebanyak 391.246 warkat. Nilai dan volume tersebut masing-masing mengalami kontraksi 28,54% (yoy) dan 6,33% (yoy), sejalan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 17,36% (yoy) dan 39,32% (yoy).

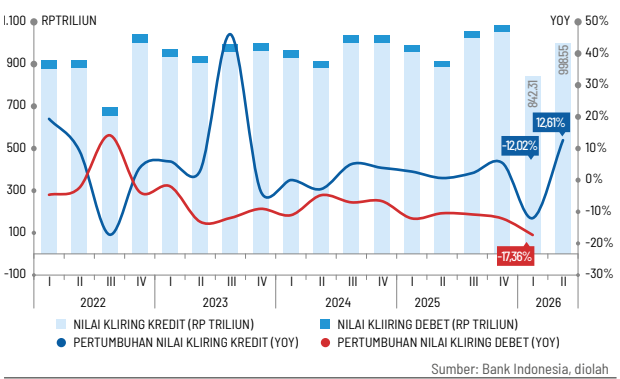

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Kinerja transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi kartu kredit tercatat Rp72,84 triliun atau tumbuh 17,08% (yoy). Capaian ini meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh 8,99% (yoy). Sementara itu, volume transaksi kartu kredit mencapai 79,50 juta yang didominasi oleh transaksi belanja dengan pangsa 95,12%. Volume transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 tumbuh 10,20% (yoy) atau meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 5,46% (yoy). Jumlah kartu kredit pada triwulan II 2026 di DKI Jakarta tercatat sebesar 5,50 juta kartu atau tumbuh terkontraksi sebesar 3,08% (yoy).

Meskipun jumlah kartu kredit di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi 3,08% (yoy) menjadi 5,50 juta kartu, kinerja transaksi kartu kredit justru menunjukkan penguatan. Hal ini tercermin dari nilai transaksi yang tumbuh 17,08% (yoy) menjadi Rp72,84 triliun dan volume transaksi yang tumbuh 10,20% (yoy) menjadi 79,50 juta transaksi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan jumlah kartu lebih mencerminkan berkurangnya kartu yang tidak atau kurang aktif, sementara kartu yang tetap digunakan menunjukkan frekuensi dan nilai transaksi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, terjadi peningkatan intensitas penggunaan kartu kredit oleh pengguna aktif.

Di sisi lain, transaksi kartu ATM/ debit pada triwulan II 2026 terkontraksi baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi kartu ATM/ debit tercatat sebesar Rp136,31 triliun dengan volume sebanyak 162,35 juta transaksi. Nilai dan volume transaksi kartu ATM/ debit terkontraksi masing-masing 8,02% (yoy) dan 10,79% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 13,26% (yoy) untuk nilai transaksi dan 16,20% (yoy) untuk volume transaksi. Berdasarkan jenis transaksinya, volume kartu ATM/ debit terdiri dari transaksi tunai (56,14%), transaksi belanja (30,31%), dan interbank (8,31%). Jumlah kartu ATM dan kartu debit masing-masing tercatat sebesar 617.527 kartu dan 28,55 juta kartu. Kartu ATM tumbuh 19,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 18,76% (yoy). Sementara itu, kartu debit tumbuh 2,73% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2026 sebesar 1,35% (yoy). Adapun mesin ATM sebagai infrastruktur pendukung tercatat mengalami kontraksi 0,86% (yoy) menjadi 23.555 unit.

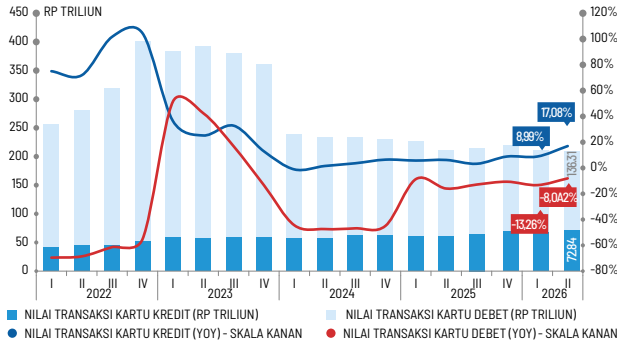

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet

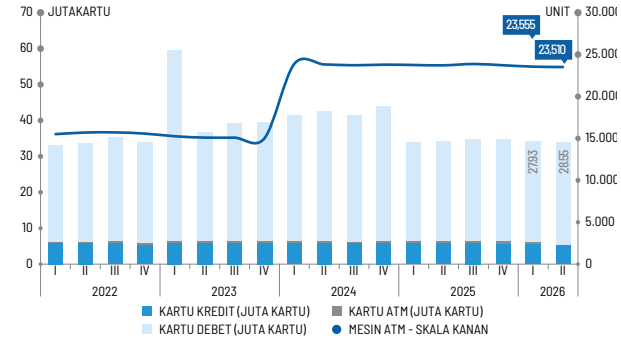

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet, ATM dan Mesin ATM

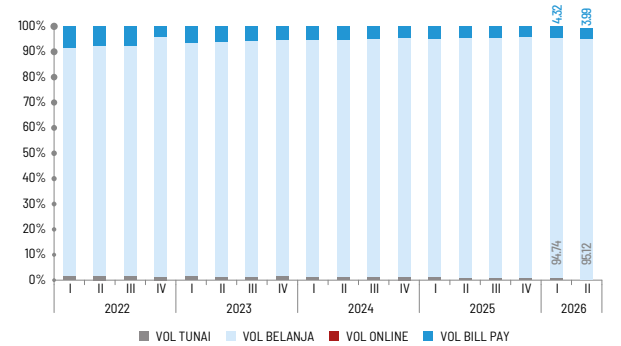

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pangsa Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi

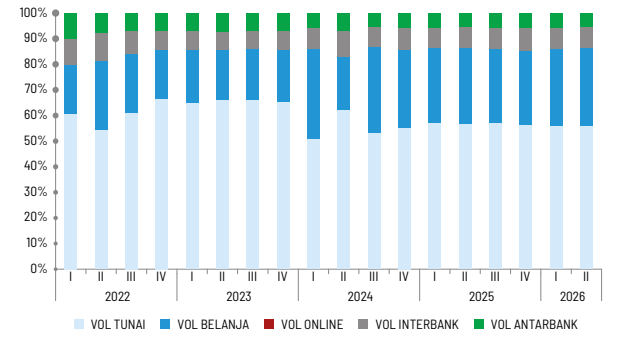

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Pangsa Volume Transaksi Kartu ATM/ Debit Berdasarkan Jenis Transaksi

Uang Elektronik

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik baik yang berbasis *server* maupun berbasis *chip* pada triwulan II 2026 tetap tumbuh. Nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp372,03 juta dengan volume 6,13 miliar transaksi. Pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik pada triwulan II 2026 mencapai 31,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 44,62% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi uang elektronik tumbuh 31,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 45,27% (yoy). Volume transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja (79,91%) dan transfer (20,03%). Sementara itu, jumlah uang elektronik pada triwulan II 2026 tercatat 700,43 juta dengan jumlah mesin *reader* 175.274 unit. Adapun pertumbuhan jumlah uang elektronik meningkat menjadi 10,38% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,41% (yoy). Mesin *reader* juga meningkat dari 11,23% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 104,16% (yoy) pada triwulan II 2026.

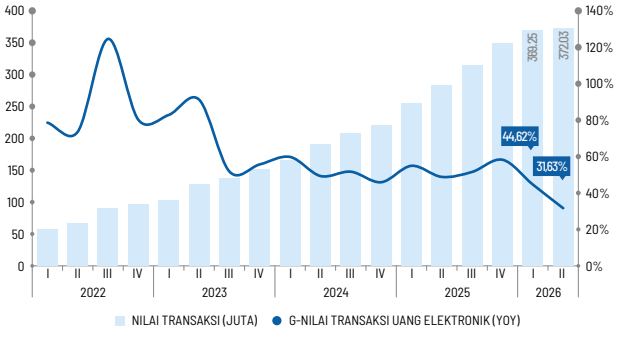

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

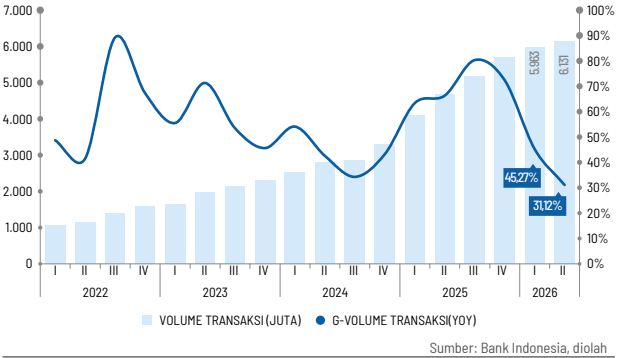

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik

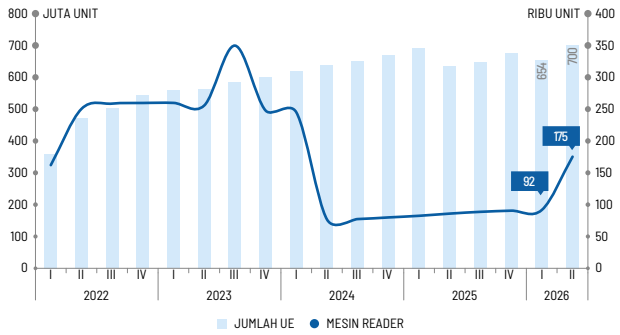

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik

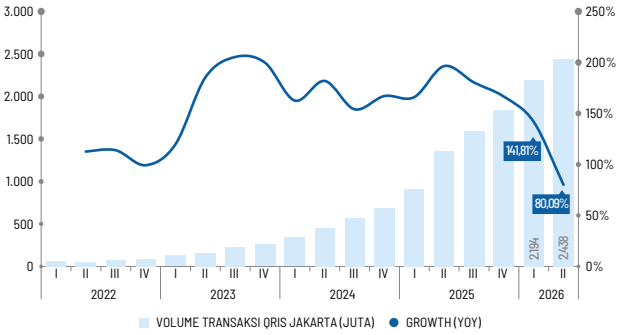

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta

Quick Responde Code Indonesian Standard (QRIS)

Adopsi QRIS di DKI Jakarta terus meluas didukung pelaksanaan edukasi dan sosialisasi QRIS, pendalaman user experience pada pusat perbelanjaan, transportasi, dan layanan pemerintah daerah, serta sinergi penyelenggaraan berbagai event strategis dengan stakeholder, termasuk QRIS Jelajah Indonesia dan Pekan QRIS Nasional. Hal ini tecermin dari volume transaksi QRIS di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 yang mengalami pertumbuhan sebesar 80,09% (yoy) atau tercatat 2,44 miliar transaksi. Adapun jumlah pengguna QRIS di DKI Jakarta pada triwulan II 2026 mencapai 6,63 juta pengguna QRIS atau bertambah 450.528 pengguna dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025. Sementara itu, jumlah *merchant* QRIS di Jakarta pada triwulan II 2026 mencapai 5,40 juta *merchant*.

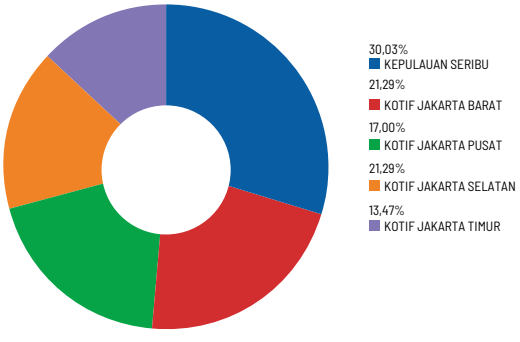

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15 Pangsa merchant QRIS per Wilayah

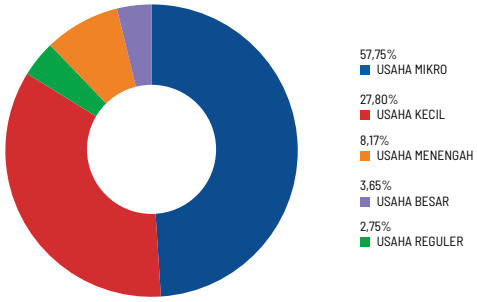

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Pangsa merchant QRIS per Jenis Usaha

Transaksi QRIS mendukung inklusivitas perekonomian DKI Jakarta. Hal ini tecermin dari jenis usaha merchant QRIS yang didominasi oleh usaha mikro dengan share 57,75% dan usaha kecil dengan share 27,80%. Adapun sebaran merchant QRIS cenderung merata di kota administratif DKI Jakarta dengan pangsa terbesar adalah Jakarta Selatan dengan share 30,03%. Selanjutnya, pangsa merchant QRIS terbesar juga dicapai oleh Jakarta Barat (18,10%) dan Jakarta Pusat (17,00%). Merchant QRIS di Kepulauan Seribu tercatat memiliki pangsa terkecil yakni 0,11%.

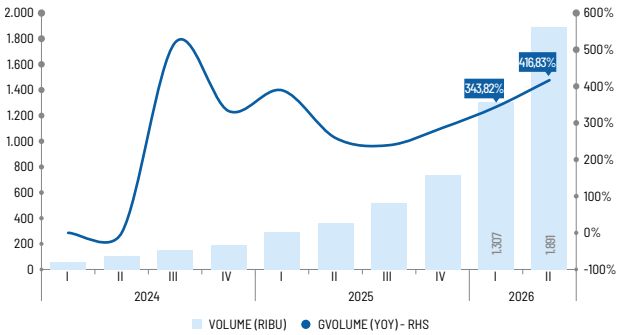

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Nilai Transaksi QRIS *Cross Border*

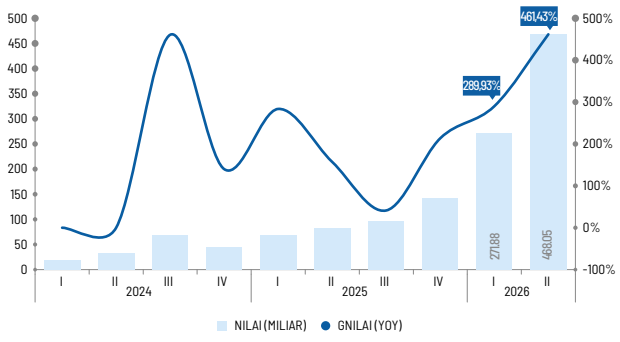

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Volume Transaksi QRIS *Cross Border*

Di sisi lain, pengembangan fitur QRIS *cross border* menjadi solusi pembayaran digital yang memudahkan transaksi lintas negara bagi wisatawan dan pelaku usaha. Pada triwulan II 2026, transaksi *inbound* QRIS *cross border* di DKI Jakarta mencapai Rp468,05 miliar atau meningkat 461,43% (yoy). Dari sisi volume, pertumbuhan transaksi *inbound* QRIS *cross border* tercatat 416,83% (yoy) menjadi 1,89 juta transaksi. Kenaikan signifikan pertumbuhan nilai dan volume transaksi QRIS *cross border* ini sejalan dengan perluasan implementasi di Korea Selatan (mulai 1 April 2026) dan Tiongkok (mulai 30 April 2026). Sebelumnya, QRIS *cross border* telah terhubung dengan 4 (empat) negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Adapun Malaysia dan Tiongkok mendominasi penggunaan transaksi QRIS *cross border* pada triwulan II 2026 dengan pangsa masing-masing 54,25% dan 41,58%.

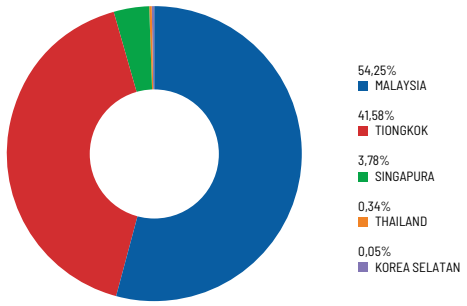

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Pangsa Negara Transaksi QRIS Cross Borde

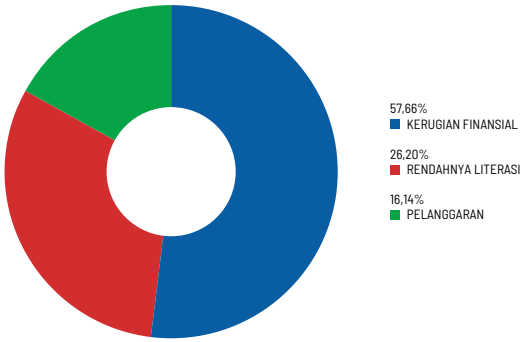

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Pangsa Pengaduan Konsumen di DKI Jakarta Triwulan II 2026

Upaya Pelindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Dalam rangka memperkuat kualitas layanan sekaligus memitigasi risiko *fraud* pada konsumen jasa sistem pembayaran, KPwBI Provinsi DKI Jakarta secara konsisten mengintegrasikan edukasi pelindungan konsumen dalam program perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital DKI Jakarta melalui berbagai kanal dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*. Pada triwulan II 2026, kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan antara lain: edukasi pada peringatan Hari Konsumen Nasional yang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta melalui Festival Jakarta Great Sale, edukasi aman bertransaksi kepada pendamping dan penerima bansos APBN dan APBD dalam rangka sosialisasi elektronifikasi bansos di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, kampanye implementasi QRIS TAP di Gerai Samsat Jakarta Barat, *Pace The City 5K* dalam rangka QRIS Jelajah Kuliner Indonesia, edukasi kepada pelajar dalam rangkaian kegiatan Bank Indonesia *Goes to School,* serta konten media sosial. Adapun sasaran edukasi adalah meningkatkan *awareness* konsumen jasa sistem pembayaran terkait langkah aman bertransaksi nontunai, pelindungan data pribadi, serta pengetahuan untuk mengantisipasi berbagai modus penipuan digital.

Di samping itu, KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan konsultasi dan fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen jasa sistem pembayaran. Sepanjang triwulan II 2026, kerugian finansial menjadi penyebab terbesar pengaduan konsumen. Adapun modus utama yang ditemui adalah *fraud mobile banking* dan *surcharge*.

D. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan II 2026, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB mengalami peningkatan. Nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB tercatat mencapai Rp173,22 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar **56,40% (yoy)** dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar **30,78% (yoy)**. Sejalan dengan pertumbuhan tahunan, pertumbuhan secara triwulanan turut mengalami peningkatan sebesar **16,81% (qtq) meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulanan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 6,90% (qtq)** (Grafik 4. 21). Peningkatan transaksi tersebut terdiri atas transaksi beli sebesar Rp86,613 triliun dan transaksi jual sebesar Rp86,606 triliun.

Peningkatan transaksi valuta asing oleh Penyelenggara KUPVA BB pada triwulan II 2026 dipengaruhi oleh tekanan pasar global serta meningkatnya permintaan valuta asing seiring peningkatan kebutuhan, baik karena faktor musiman maupun antisipasi permintaan ke depan. Eskalasi konflik AS-Israel-Iran yang mendorong lonjakan harga minyak dunia, kebijakan suku bunga AS yang tetap tinggi dan penguatan dollar AS, telah memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Merespon kondisi tersebut dan mengurangi tekanan pada nilai tukar, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate secara kumulatif 100 bps pada Mei-Juni 2026 dan menurunkan *threshold* pembelian valas tunai tanpa *underlying* dari sebelumnya USD100.000 per bulan di awal tahun 2026, menjadi USD25.000 per bulan di bulan Juni 2026 dan USD10.000 per bulan mulai bulan Juli 2026.

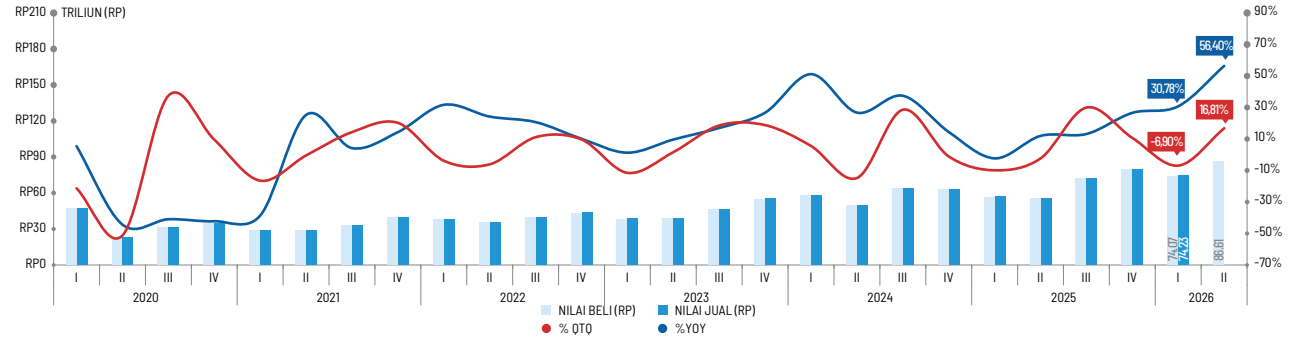

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Adapun dari sisi permintaan valas pada triwulan II 2026 juga mengalami peningkatan, sejalan dengan faktor musiman periode musim haji dan liburan sekolah serta peningkatan aktivitas impor untuk mendukung aktivitas investasi dan produksi. Peningkatan impor terutama bersumber dari kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis, aktivitas konstruksi, serta kebutuhan sektor industri dan jasa perkotaan.

Pada triwulan II 2026, terdapat 304 (Kantor Pusat) dan 171 (Kantor Cabang) Penyelenggara KUPVA BB yang telah diberikan izin operasional dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Tabel 4. 1). Industri KUPVA BB saat ini masih dominan beroperasi di wilayah Jakarta Selatan (27,96%) dan Jakarta Pusat (24,34%). Adapun market share valuta asing yang ditransaksikan di wilayah pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh mata uang USD dan SGD dengan persentase masing-masing sebesar 53,98% dan 26,52% (Grafik 4. 22).

Tabel 4.1 Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	271	92	363
2	Bogor	9	8	17
3	Depok	7	4	11
4	Bekasi	14	5	19
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang		13	13
7	Pulau Jawa (Lainnya)		26	26
8	Pulau Bali		11	11
9	Pulau Sulawesi		2	2
10	Pulau Sumatera		8	8
11	Pulau Kalimantan		1	1
	TOTAL	**304**	**171**	**475**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

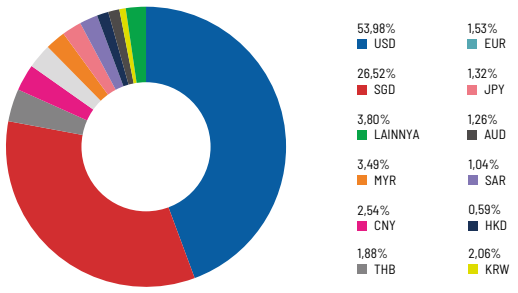

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 *Market Share* Valuta Asing

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan nilai transaksi transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP pada triwulan II 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi *outgoing* dan domestik tercatat mengalami pertumbuhan positif, meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sementara transaksi *incoming* mengalami kontraksi. Rincian pergerakan transaksi sebagai berikut:

a. Nilai transaksi *outgoing* PJP di wilayah kerja KPwBI Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,51% (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp22,98 triliun, tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,60% (yoy) dengan nominal sebesar Rp17,09 triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi *outgoing* tercatat tumbuh sebesar 27,91% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 757.024 transaksi, pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 22,70% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 645.986 transaksi.

b. Nilai transaksi *incoming* PJP di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 26,92% (yoy) dengan nominal sebesar Rp29,87 triliun, mengalami perbaikan pertumbuhan setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,49% (yoy) dengan nominal sebesar Rp29,38 triliun. Sementara dari sisi volume transaksi mengalami pertumbuhan

sebesar 37,22% (yoy) dengan frekuensi sebesar 4,86 juta transaksi, tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 1,87% (yoy) dengan frekuensi sebesar 4,94 juta transaksi.

c. Nilai transaksi domestik PJP pada triwulan II 2026 tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 18,51% (yoy) dengan nominal sebesar Rp158,98 triliun, dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh lebih tinggi sebesar 32,07% (yoy) dengan nominal sebesar Rp182,46 triliun. Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,80% (yoy) dengan frekuensi sebesar 93,30 juta transaksi, pertumbuhan ini mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 7,65% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 84,22 juta transaksi.

Secara keseluruhan terjadi pertumbuhan yang positif pada total nilai transaksi *outgoing*, *incoming*, dan domestik transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp203,69 triliun atau tumbuh 6,57% (yoy). Sementara, total frekuensi transaksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 95,21 juta transaksi atau sebesar 7,98% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 4.23).

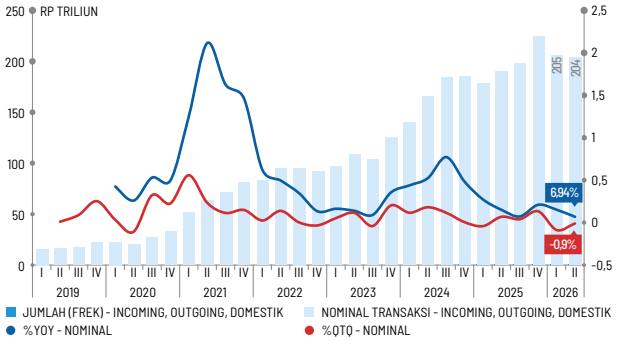

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Perkembangan Transaksi PJP LR

Tabel 4.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE		*OUTGOING*		*INCOMING*		*DOMESTIK*		TOTAL	
		Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.581	11.536.770.574.232	7.549.080	16.269.385.293.107
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229	7.838.359	16.126.977.404.248
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091	8.830.388	19.050.748.624.217
	Total	**67.455**	**5.263.457.646.331**	**1.987.596**	**10.398.209.605.689**	**22.162.776**	**35.785.444.069.552**	**24.217.827**	**51.447.111.321.572**
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794	9.249.021	20.940.961.975.858
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234	9.686.263	21.651.662.703.633
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151	10.290.422	20.919.619.036.885
	Total	**76.628**	**5.637.880.175.501**	**2.273.604**	**12.261.451.509.696**	**26.875.474**	**45.612.912.031.179**	**29.225.706**	**63.512.243.716.376**
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306	11.721.972	22.929.870.675.186
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328	12.311.411	23.796.208.613.317
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666	11.454.075	24.051.919.077.932
	Total	**97.632**	**5.835.657.566.296**	**2.176.073**	**11.495.068.339.839**	**33.213.753**	**53.447.272.460.300**	**35.487.458**	**70.777.998.366.435**
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247	12.811.294	26.061.923.760.391
	Nov-21	47.330	2.280.183.690.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543	13.204.031	26.390.554.919.310
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286	14.816.056	28.916.320.867.017
	Total	**143.369**	**6.300.451.379.147**	**2.625.074**	**13.578.376.913.495**	**38.062.938**	**61.489.971.254.076**	**40.831.381**	**81.368.799.546.718**
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.453	13.945.338	21.276.650.265.317	14.853.863	28.426.772.774.520
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277	14.075.420	24.785.900.546.997
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313	16.837.542	30.241.640.805.237
	Total	**163.400**	**7.373.774.034.626**	**2.484.401**	**12.872.980.050.221**	**43.119.024**	**63.207.560.041.907**	**45.766.825**	**83.454.314.126.754**
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935	18.399.930	34.598.962.111.949
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.641.826.505	15.851.008	28.574.484.960.920
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629	17.976.238	30.695.706.429.199
	Total	**276.908**	**9.049.494.321.218**	**2.914.434**	**12.731.612.320.781**	**49.035.834**	**72.088.046.860.069**	**52.227.176**	**93.869.153.502.068**
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.674.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080	19.499.382	33.466.428.090.780
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.553.090	24.691.222.695.268	18.699.835	31.379.650.817.615
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235	18.096.455	29.858.242.643.796
	Total	**1.033.193**	**9.963.395.156.232**	**2.676.518**	**11.759.415.849.376**	**52.585.961**	**72.981.510.546.583**	**56.295.672**	**94.704.321.552.191**
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.688	826.067	3.498.815.511.210	16.657.239	21.432.734.318.000	17.830.654	28.141.454.595.898
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705	17.997.040	29.701.779.568.654
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594	18.993.791	33.367.736.125.117
	Total	**872.277**	**9.329.642.084.380**	**2.946.050**	**13.123.827.550.990**	**51.003.158**	**68.757.500.654.299**	**54.821.485**	**91.210.970.289.669**
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867	18.434.219	30.626.615.004.391
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967	17.157.119	29.162.569.978.821
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361	19.563.508	38.228.052.498.790
	Total	**601.008**	**11.844.809.980.387**	**3.687.439**	**14.789.258.847.420**	**50.866.399**	**71.383.168.654.195**	**55.154.846**	**98.017.237.482.002**
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041	19.233.723	32.875.710.981.664
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113	19.130.026	33.497.897.931.427
	Jun-23	247.246	2.675.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855	21.748.244	40.566.552.197.160
	Total	**699.004**	**8.501.127.052.747**	**4.010.528**	**15.966.497.142.495**	**55.402.461**	**82.472.536.915.009**	**60.111.993**	**106.940.161.110.251**
TW III 2023	Jul-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742	19.697.908	33.942.070.638.863
	Aug-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395	20.442.436	32.610.171.015.754
	Sep-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086	19.500.390	34.105.033.359.834
	Total	**799.400**	**8.623.526.841.571**	**3.624.421**	**16.220.975.566.657**	**55.216.913**	**75.812.772.606.223**	**59.640.734**	**100.657.275.014.451**
TW IV 2023	Oct-23	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.091	23.441.197	30.412.963.804.944	25.083.789	39.876.447.971.416
	Nov-23	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.171	20.364.548	30.652.789.833.843	21.600.320	39.268.213.814.888
	Dec-23	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490	22.274.028	42.413.069.984.436
	Total	**614.882**	**9.753.625.146.263**	**3.630.718**	**17.777.375.668.200**	**64.712.537**	**94.026.730.956.277**	**68.958.137**	**121.557.731.770.740**
TW I 2024	Jan-24	164.853	3.542.320.689.096	1.149.198	6.546.289.317.870	20.134.309	33.308.830.591.428	21.448.360	43.397.440.598.394
	Feb-24	146.838	3.155.098.647.522	1.122.486	7.069.174.073.388	19.490.424	33.262.462.144.272	20.759.748	43.486.734.865.182
	Mar-24	151.913	3.347.482.549.612	1.319.088	8.068.088.794.892	22.434.290	35.324.096.189.978	23.905.291	46.739.667.534.482
	Total	**463.604**	**10.044.901.886.230**	**3.590.772**	**21.683.552.186.150**	**62.059.023**	**101.895.388.925.678**	**66.113.399**	**133.623.842.998.058**
TW II 2024	Apr-24	152.595	3.116.325.807.983	1.513.702	8.963.120.524.159	21.991.219	34.707.823.244.702	23.657.516	46.787.269.576.844
	May-24	159.208	3.684.703.251.154	1.360.498	8.267.486.900.714	24.025.918	38.363.701.519.121	25.545.624	50.315.891.670.989
	Jun-24	152.825	3.677.435.279.743	1.311.905	7.913.112.578.674	24.564.070	40.997.949.584.626	26.028.800	52.588.497.443.043
	Total	**464.628**	**10.478.464.338.880**	**4.186.105**	**25.143.720.003.547**	**70.581.207**	**114.069.474.348.449**	**75.231.940**	**149.691.658.690.876**
TW III 2024	Jul-24	170.844	4.286.252.310.689	1.254.388	7.253.837.600.268	23.608.049	47.785.360.191.808	25.033.281	59.325.450.102.765
	Aug-24	165.438	4.769.314.105.747	1.249.523	7.540.207.796.939	24.627.251	45.731.778.010.778	26.042.212	58.041.299.913.464
	Sep-24	167.964	4.755.459.387.757	1.027.373	6.156.438.717.382	29.202.399	45.840.712.560.218	30.397.736	56.752.610.665.357
	Total	**504.246**	**13.811.025.804.193**	**3.531.284**	**20.950.484.114.589**	**77.437.699**	**139.357.850.762.804**	**81.473.229**	**174.119.360.681.586**
TW IV 2024	Oct-24	156.281	4.406.153.123.565	1.136.260	6.970.586.639.211	31.126.073	45.334.021.099.509	32.418.614	56.710.760.862.285
	Nov-24	170.656	4.617.925.897.335	1.092.969	6.713.456.411.351	26.491.850	40.682.410.626.798	27.755.475	52.013.792.935.484
	Dec-24	181.990	5.316.793.381.989	1.234.435	7.527.339.722.595	33.585.398	52.178.026.458.269	35.001.823	65.022.159.562.853
	Total	**508.927**	**14.340.872.402.889**	**3.463.664**	**21.211.382.773.157**	**91.203.321**	**138.194.458.184.576**	**95.175.912**	**173.746.713.360.622**

PERIODE		*OUTGOING*		*INCOMING*		*DOMESTIK*		TOTAL	
		Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)
TW I 2025	Jan-25	177.878	4.842.827.046.010	1.191.286	7.459.985.998.064	11.107.408	18.153.606.119.248	12.476.572	30.456.419.163.322
	Feb-25	164.374	4.799.437.496.484	1.273.485	7.874.464.076.194	33.299.993	41.890.550.432.665	34.737.852	54.564.452.005.343
	Mar-25	184.244	4.655.793.930.793	1.664.259	10.110.398.671.016	31.676.346	48.078.446.498.877	33.524.849	62.844.639.100.686
	Total	**526.496**	**14.298.058.473.287**	**4.129.030**	**25.444.848.745.274**	**76.083.747**	**108.122.603.050.790**	**80.739.273**	**147.865.510.269.351**
TW II 2025	Apr-25	184.176	5.169.460.395.115	1.241.857	7.783.997.649.627	26.538.783	45.865.543.463.830	27.964.816	58.819.001.508.572
	May-25	207.449	11.714.605.422.440	1.286.246	8.316.406.201.392	29.642.291	45.940.199.453.098	31.135.986	65.971.211.076.930
	Jun-25	200.219	4.897.355.799.238	1.013.970	7.440.197.023.456	27.857.548	54.009.398.363.060	29.071.737	66.346.951.185.754
	Total	**591.844**	**21.781.421.616.793**	**3.542.073**	**23.540.600.874.475**	**84.038.622**	**145.815.141.279.988**	**88.172.539**	**191.137.163.771.256**
TW III 2025	Jul-25	223.431	5.308.166.493.760	1.037.551	7.551.937.505.375	28.114.667	54.602.217.919.182	29.375.649	67.462.321.918.317
	Aug-25	226.009	5.592.132.487.108	1.132.175	7.935.151.829.562	28.382.556	55.315.588.699.999	29.740.740	68.842.873.016.669
	Sep-25	217.257	4.750.599.974.475	984.898	7.092.132.952.613	25.228.716	50.016.783.355.135	26.430.871	61.859.516.282.223
	Total	**666.697**	**15.650.898.955.343**	**3.154.624**	**22.579.222.287.550**	**81.725.939**	**159.934.589.974.316**	**85.547.260**	**198.164.711.217.209**
TW IV 2025	Oct-25	230.854	6.504.569.084.792	1.442.079	8.636.886.742.162	26.747.591	55.331.073.909.601	28.420.524	70.472.529.736.555
	Nov-25	225.553	5.333.663.836.420	1.241.572	7.531.618.871.268	27.343.455	64.319.484.062.492	28.810.580	77.184.766.770.180
	Dec-25	242.017	5.481.824.490.007	1.301.293	9.149.082.529.289	30.131.478	62.804.855.517.284	31.674.788	77.435.762.536.580
	Total	**698.424**	**17.320.057.411.219**	**3.984.944**	**25.317.588.142.719**	**84.222.524**	**182.455.413.489.377**	**88.905.892**	**225.093.059.043.315**
TW I 2026	Jan-26	245.807	6.424.199.124.866	1.622.620	9.438.013.259.970	31.841.327	56.187.239.751.442	33.709.754	72.049.452.136.278
	Feb-26	217.765	6.019.251.634.343	1.649.127	9.779.655.154.875	29.784.565	54.719.060.630.350	31.651.457	70.517.967.419.568
	Mar-26	182.414	4.656.436.382.863	1.664.320	10.162.187.767.268	31.676.349	48.078.449.317.357	33.523.083	62.897.073.467.488
	Total	**645.986**	**17.099.887.142.072**	**4.936.067**	**29.379.856.182.113**	**93.302.241**	**158.984.749.699.149**	**98.884.294**	**205.464.493.023.334**
TW II 2026	Apr-26	250.151	5.794.278.687.787	1.635.461	9.983.282.593.297	30.886.131	58.599.778.089.611	32.771.743	74.377.339.370.695
	May-26	257.465	10.217.625.969.412	1.676.297	10.262.971.660.549	31.346.030	52.068.020.999.486	33.279.792	72.548.618.629.447
	Jun-26	249.408	6.970.390.209.750	1.548.579	9.631.648.009.000	27.360.634	40.164.779.601.284	29.158.621	56.766.817.820.034
	Total	**757.024**	**22.982.294.866.949**	**4.860.337**	**29.877.902.262.846**	**89.592.795**	**150.832.578.690.381**	**95.210.156**	**203.692.775.820.176**
Grand Total		**11.273.691**	**255.393.325.861.183**	**81.244.881**	**455.588.284.485.572**	**1.374.428.166**	**2.222.762.903.268.460**	**1.449.809.894**	**2.799.561.182.290.730**

Halaman ini sengaja dikosongkan

BOKS 5

QRIS Jelajah Indonesia dan Pekan QRIS Nasional:

Mendorong Inklusivitas Digitalisasi Pembayaran Ritel di Jakarta

Provinsi DKI Jakarta secara konsisten memegang peran sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus barometer transformasi digital nasional. Hal ini tercermin dari *Digital Competitiveness Index* sebagai indikator daya saing digital yang menunjukkan Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama nasional dengan nilai 79,6 atau di atas rata-rata nasional sebesar 42,2. Akseptasi QRIS yang hadir sebagai *game changer* pembayaran digital yang inklusif di DKI Jakarta juga terus meningkat. Secara kumulatif, volume transaksi QRIS di DKI Jakarta hingga semester I 2026 tercatat sebesar 4,63 miliar transaksi atau 36,92% dari total transaksi nasional.

Sejalan dengan momentum akselerasi digital tersebut dan upaya memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan 2 (dua) *flagship event* yakni **QRIS Jelajah Indonesia (QJI) dan Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026.** Kedua *event* ini dirancang untuk memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital di DKI Jakarta yang semakin inklusif dan terintegrasi melalui peningkatan literasi dan perluasan adopsi, baik dari sisi *merchant* maupun pengguna QRIS terutama pada sektor-sektor prioritas perekonomian. Penyelenggaraan *event* ini juga menjadi wujud konkrit sinergi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Bank dan Non Bank, Perumda Pasar Jaya, Operator Moda Transportasi (KRL *Commuter*, MRT Jakarta, TransJakarta, LRT Jakarta), Pengelola Wisata, Asosiasi/ Akademisi, Pelaku Usaha lainnya, serta Media.

QJI 2026 Wilayah Jakarta yang mengambil tema **"Semarakkan Digitalisasi Cita Rasa Kuliner Jakarta, Makin Praktis dengan QRIS,"** diikuti oleh 10 (sepuluh) tim yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang. Setiap tim akan melaksanakan misi, baik yang berkaitan dengan kampanye secara langsung maupun pembuatan konten digital kreatif mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Pelindungan Konsumen, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sektor transportasi, serta promosi pariwisata dan kuliner DKI Jakarta. Kegiatan ini resmi dibuka pada 14 Juli 2026 di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Adapun misi dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang terdiri dari **segmen kuliner pasar tradisional** (14 s.d. 15 Juli 2026) di Pasar Santa, Pasar Mayestik, Pasar Koja, Pasar Baru, Pasar Jatinegara, dan Pasar Kramat Jati; **segmen kuliner legendaris dan *hidden gem*** (16 Juli 2026); serta **segmen kuliner wisata** (18 Juli 2026) di Monas, TMII, PIK, Ragunan, dan Kota Tua. Penyelenggaraan QJI Jakarta 2026 mencatatkan *outcome* berupa jumlah akuisisi QRIS pada 89 *merchant*, jumlah masyarakat yang diedukasi secara langsung sebanyak >1500 orang, serta 50 konten edukasi melalui media sosial dengan *engagement* 184 ribu *viewers* di Instagram dan 250 ribu *viewers* di TikTok.

Selanjutnya, PQN 2026 Wilayah Jakarta dengan tema **"Rayakan Digitalisasi! QRISnya Satu, Menangnya Banyak!,"** diselenggarakan pada 11 s.d. 16 Agustus 2026 yang berfokus pada pasar tradisional

sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang bersifat inklusif. PQN 2026 Wilayah Jakarta secara resmi dibuka pada 11 Agustus 2026 di Pasar Rawa Bening, Jakarta Timur yang ditandai dengan peluncuran **Pasar Jakarta TOKCER (Digital, Kolaboratif, Kalcer)** sebagai visi bersama dalam mewujudkan ekosistem pasar tradisional yang semakin inovatif, adaptif, dan relevan di era digital yang selaras dengan tema besar stabilitas harga dan ketahanan pangan, kewirausahaan, pelindungan konsumen, dan keberlanjutan. Berbagai program yang dilaksanakan selama PQN 2026 Wilayah Jakarta dikemas dengan pendekatan *edutainment* melalui perlombaan dan sosialisasi yang bersifat praktikal antara lain:

a. **Lomba batu bacan favorit,** dilaksanakan setelah upacara pembukaan di Pasar Rawa Bening. Perlombaan ini turut memperkuat *brand awareness* Jakarta sebagai Gems Center dan sekaligus mengenalkan QRIS melalui aktivitas *voting* QRIS;

b. ***Mural Battle***, menjadi wadah penyaluran minat bakat seni generasi muda sekaligus berpartisipasi dalam edukasi bertema QRIS, CBP Rupiah, dan Pelindungan Konsumen di Pasar Santa, Pasar Mayestik, dan Pasar Rawa Bening;

c. ***Barista Battle***, mendorong kreasi penyajian kopi yang merupakan komoditas unggulan nasional;

d. ***Cooking Challenge,*** menjadi wujud komunikasi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan sumber alternatif karbohidrat selain beras serta cabai dan bawang olahan;

e. ***Workshop Digital Marketing* dan *Digital Office,*** dilaksanakan di Pasar Rumput dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi promosi dan penjualan melalui *platform digital* serta pemanfaatan *tools* digital untuk operasional usaha; serta

f. Edukasi lainnya bertemakan **digitalisasi pembayaran** (QRIS dan Pelindungan Konsumen) serta ***green sustainability*** (Pemilahan dan Pengolahan Sampah).

PQN 2026 Wilayah Jakarta juga menjadi momentum keberlanjutan **perluasan kampanye fitur QRIS TAP dan QRIS Antarnegara**. Program edukasi juga dilaksanakan secara masif di berbagai sektor seperti kereta *commuter line* di Stasiun Jatinegara dan Kebayoran, Samsat Keliling untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, festival kuliner, serta wisatawan *Open Top Tour* TransJakarta. Kehadiran QRIS mendorong transaksi keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta terutama sektor perdagangan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif lainnya yang menjadi *new engine of economic growth* di Jakarta.

Gambar B5.1 *Opening Ceremony* QRIS Jelajah Indonesia 2026 Wilayah Jakarta

Gambar B5.2 Kegiatan QRIS Jelajah Indonesia 2026 Wilayah Jakarta

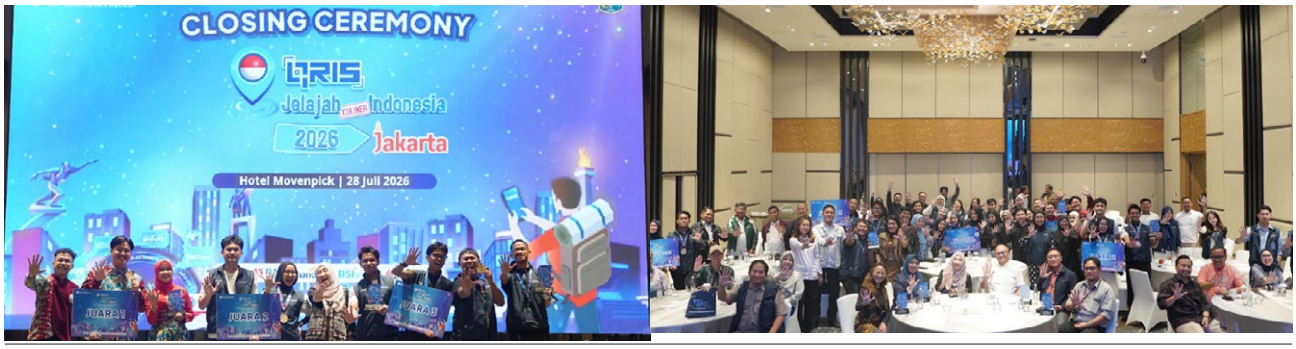

Gambar B5.3 *Closing Ceremony* QRIS Jelajah Indonesia 2026 Wilayah Jakarta

Gambar B5.4 *Opening Ceremony* Pekan QRIS Nasional 2026 Wilayah Jakarta

Gambar B5.5 Kegiatan Pekan QRIS Nasional 2026 Wilayah Jakarta

Gambar B5.6 *Closing Ceremony* Pekan QRIS Nasional 2026 Wilayah Jakarta

rang

Bab 5

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Mei 2026 relatif stabil pada level 94,21% meningkat dibandingkan Februari 2026 sebesar 93,97%. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Lainnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 3,96% pada Maret 2026, dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,28%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2026 berada pada level 8,07%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.

TINGKAT KESEMPATAN KERJA

93,97% Februari 2026 → **94,21%** Mei 2026

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

6,03% Februari 2026 → **5,79%** Mei 2026

UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

Rp 5.396.791 2025 → **Rp 5.729.876** 2026

INDEKS PENGHASILAN KONSUMEN

149,81 Triwulan I 2026 → **149,60** Triwulan II 2026

PRENSENTASE PENDUDUK MISKIN

4,28% Maret 2025 → **3,96%** Maret 2026

Tabel 5.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2023		2024		2025			2026	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	NOVEMBER	FEBRUARI	MEI
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	8.332,26	8.322,91	8.339,08	8.364,83	8.373,46	8.430,62	8.440,62	8.450,50	8.460,52
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.255,24	5.427,23	5.434,37	5.445,77	5.476,00	5.458,80	5.526,10	5.533,64	5.587,85
Bekerja (ribu orang)	4.857,62	5.072,74	5.106,78	5.107,78	5.137,60	5.128,46	5.177,13	5.199,78	5.264,19
Pengangguran (ribu orang)	397,62	354,49	327,59	337,99	338,39	330,34	348,97	333,86	323,66
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	3.077,02	2.895,68	2.904,71	2.919,06	2.897,46	2.971,82	2.914,52	2.916,86	2.872,67
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98	3.283,77	3.216,87	3.245,87
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48	1.893,36	1.982,91	2.018,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,07	65,21	65,17	65,10	65,40	64,75	65,47	65,48	66,05
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	92,43	93,47	93,97	93,79	93,82	93,95	93,69	93,97	94,21
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,57	6,53	6,03	6,21	6,18	6,05	6,31	6,03	5,79

Sumber: BPS, diolah

A. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Mei 2026, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,59 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 54,21 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah angkatan kerja yang bekerja di DKI Jakarta pada Mei 2026 sebanyak 5,26 juta orang, meningkat 64,41 ribu orang dibandingkan periode Februari 2026 yang sebesar 5,20 juta orang. Sementara itu, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 323,66 ribu orang, menurun 10,19 ribu orang dibandingkan Februari 2026 (Tabel 5. 1). Dari sisi serapan tenaga kerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tercatat sebesar 94,21%, meningkat dibandingkan periode Februari 2026 yang sebesar 93,97% (Grafik 5. 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tetap terjaga dengan baik.

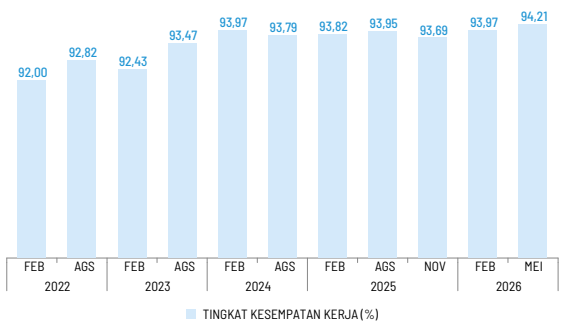

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.1 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan semakin diperkuat oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang disertai peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPT DKI Jakarta pada Mei 2026 tercatat sebesar 5,79%, lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 6,03%. Namun demikian, level TPT di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan berada di posisi ketiga tertinggi di wilayah Jawa setelah Banten dan Jawa Barat (Grafik 5.2).

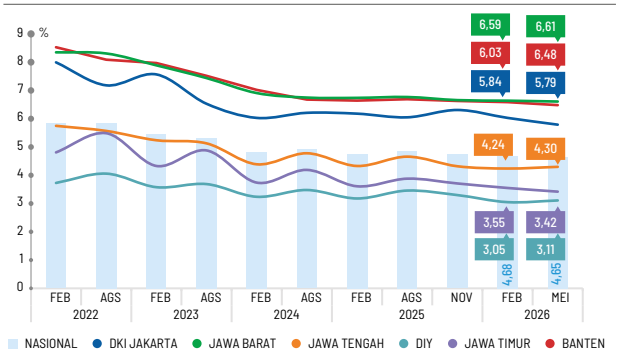

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta, Regional Jawa, dan Nasional

Kondisi pekerja di DKI Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu, dengan persentase sebesar 82,77% pada Mei 2026. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh (penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu), dengan persentase sebesar 17,23%. Dibandingkan Februari 2026, persentase pekerja penuh mengalami peningkatan sebesar 1,65 persen poin (Grafik 5.3).

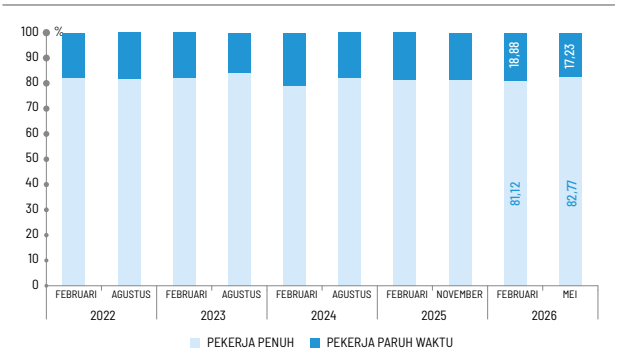

Sumber: BPS , diolah

Grafik 5.3 Presentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja

Di sisi lain, pangsa penduduk yang bekerja di sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebesar 61,66% dari total pekerja, sedangkan sisanya sebesar 38,34% bekerja pada sektor informal. Pangsa penduduk yang bekerja di sektor formal relatif stabil meskipun sedikit mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin dari Februari 2026 (Grafik 5.4).

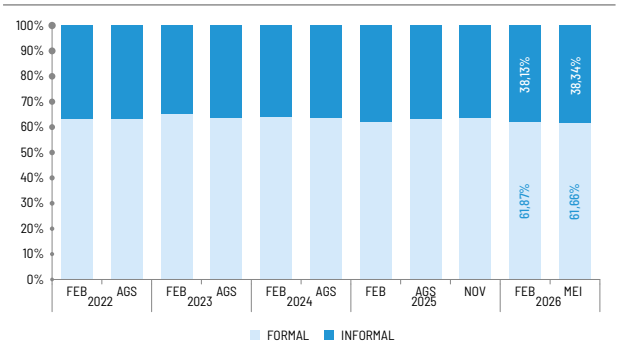

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.4 Pangsa Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal

Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 3 juta orang. Sementara itu, status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,2 juta orang (Tabel 5.2).

Berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga kerja lulusan SMA mendominasi penduduk bekerja pada periode laporan dengan pangsa sebesar 26,10%. Sementara itu, peringkat kedua diduduki oleh tenaga kerja lulusan SMK dengan pangsa sebesar 23,20% (Grafik 5.5).

Pada Mei 2026, pangsa tenaga kerja lulusan Diploma I/II/III, Universitas (S1 atau lebih) serta SMK meningkat paling besar dibandingkan periode Februari 2026, masing-masing sebesar 1,93 persen poin, 1,92 persen poin dan 0,84 persen poin. Sementara itu, pangsa tenaga kerja lulusan SMP, SMA serta SD ke bawah masing-masing menurun sebesar 2,31 persen poin, 1,61 persen poin dan 0,77 persen poin.

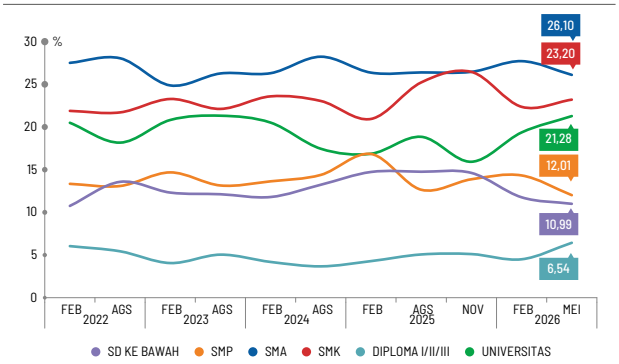

Sumber: BPS , diolah

Grafik 5.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun TPT pada Mei 2026 masih didominasi oleh lulusan SMK, yaitu sebesar 8,06%. Peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh lulusan SMA dan SMP, masing-masing sebesar 6,62% dan 6,06%. Sementara itu, TPT terendah dicatatkan oleh lulusan Diploma I/II/III sebesar 2,49%, diikuti lulusan SD ke bawah (3,82%) dan lulusan Universitas (4,00%)

Dibandingkan dengan Februari 2026, TPT pada kelompok lulusan SMP dan Universitas mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 2,19 persen poin dan 0,21 persen poin. Sebaliknya, penurunan TPT terbesar terjadi pada kelompok lulusan SD ke bawah sebesar 1,50 persen poin, diikuti lulusan Diploma I/II/III (1,09 persen poin), SMA (0,96 persen poin), serta SMK (0,09 persen poin) (Grafik 5.6).

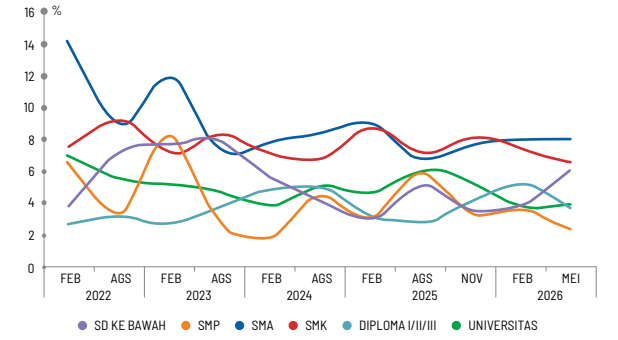

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.6 Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2023		2024		2025			2026	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	NOVEMBER	FEBRUARI	MEI
Pekerja Sektor Formal	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98	3.283,77	3.216,87	3.245,87
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	269,38	186,11	306,94	193,65	192,65	166,87	170,38	205,54	218,80
Buruh/karyawan/pegawai	2.898,61	3.048,53	2.958,23	3.059,74	2.995,14	3.083,12	3.113,39	3.011,33	3.027,07
Pekerja Sektor Informal	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48	1.893,36	1.982,91	2.018,32
Berusaha sendiri	1.084,94	1.162,88	1.115,36	1.173,98	1.200,29	1.211,85	1.229,45	1.221,04	1.227,60
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	253,32	248,45	343,32	267,78	337,16	300,82	302,22	338,18	354,10
Pekerja bebas pertanian	-	1,55	-	1,49	-	0,78	-	0,19	-
Pekerja bebas non pertanian	90,72	140,26	121,92	127,23	123,51	114,42	114,94	131,71	136,70
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	260,65	284,95	261,01	283,91	288,85	250,62	246,75	291,80	299,92

Sumber: BPS, diolah

Lebih lanjut, perbaikan tingkat pendidikan tenaga kerja turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2025, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp440,00 juta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp421,13 juta (Grafik 5.7).

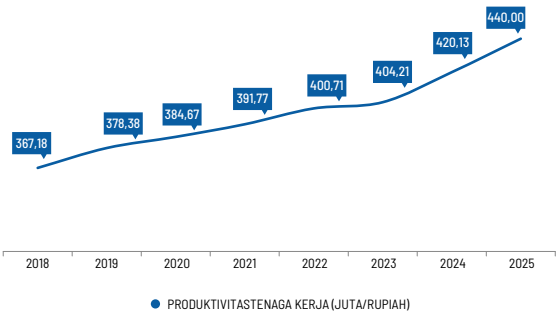

Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

Grafik 5.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)

Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan relatif kuatnya pertumbuhan pada sektor tersebut dan menjadi LU penopang utama ekonomi DKI Jakarta. Pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 22,30% terhadap total penduduk bekerja Mei 2026. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (13,29%), LU Transportasi dan Pergudangan (11,81%), LU Industri Pengolahan (10,61%), dan LU Jasa Lainnya (10,50%) (Grafik 5.8).

Di sisi lain, hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tecermin dari indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan II 2026 yang tetap berada pada level optimis sebesar 116,57, meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 116,93. Adapun Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan indeks penghasilan konsumen juga tetap berada di atas level optimis (100) pada triwulan II 2026, masing-masing sebesar 134,97 dan 149,60 (Grafik 5.9).

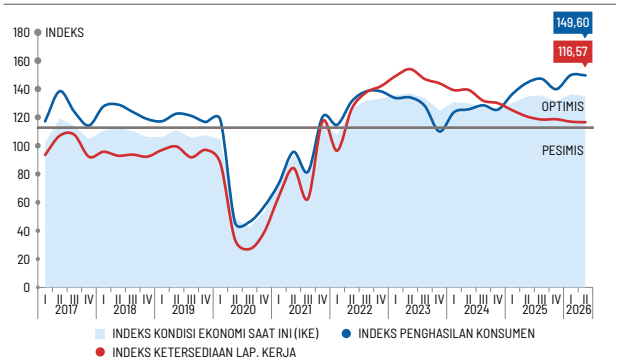

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja

B. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat mengalami penurunan. Berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 3,96%, menurun 0,32 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 4,28% (Tabel 5. 3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2026 berada pada level 8,07% (Grafik 5. 10). Pada periode Maret 2020 hingga Maret 2026, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan tren penurunan, meskipun sempat meningkat pada Maret 2021 akibat dampak lanjutan pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2022 hingga mencapai level terendah sebesar 3,96 persen pada Maret 2026. Selama periode tersebut, tingkat kemiskinan DKI Jakarta berada di bawah rata-rata nasional. Menurunnya tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2026 yang tumbuh 5,59% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 4,95% (yoy) (Grafik 5. 11). Penurunan kemiskinan tersebut juga didorong oleh berbagai program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjaga daya beli masyarakat, antara lain:

1. Program Bantuan dari Pemerintah Pusat, meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen penguatan jaring pengaman sosial dasar bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

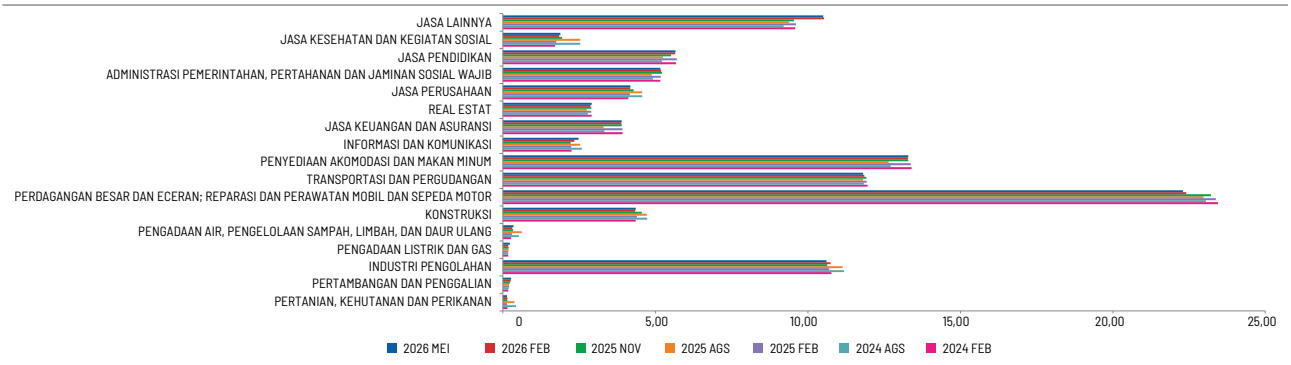

Sumber: BPS , diolah

Grafik 5.8 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

2. Program Pengentasan dan Perlindungan Sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dialokasikan melalui Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Program Bantuan Pangan, serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) meliputi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), serta Subsidi Rusunawa.

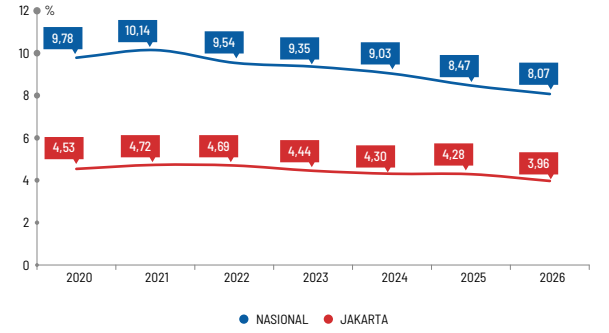

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.10 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional

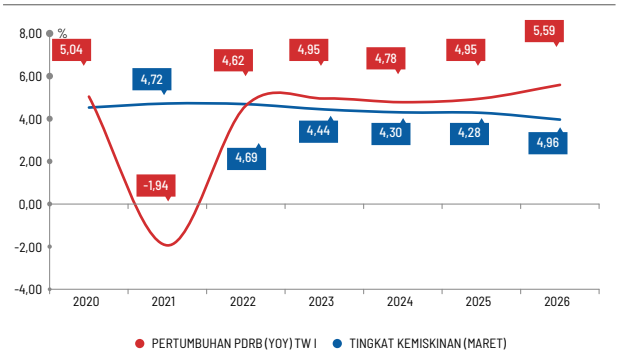

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.11 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

Seiring dengan inflasi, angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka Garis Kemiskinan (GK) Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp925.525 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 8,53% (yoy) dari angka GK Maret 2025 yang tercatat Rp852.768 per kapita per bulan (Grafik 5. 12 dan Grafik 5. 13).

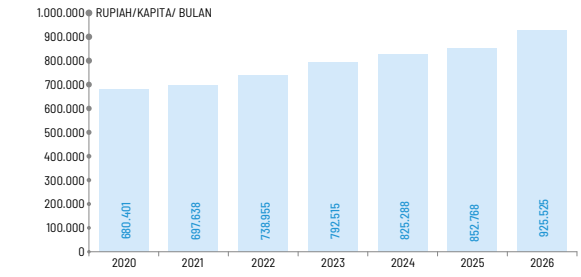

Sumber: BPS , diolah

Grafik 5.12 Garis Kemiskinan DKI Jakarta

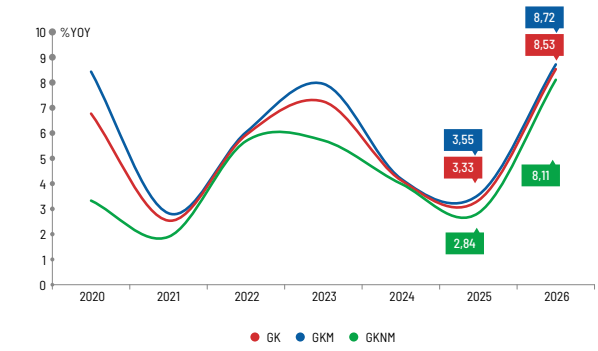

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.13 Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan

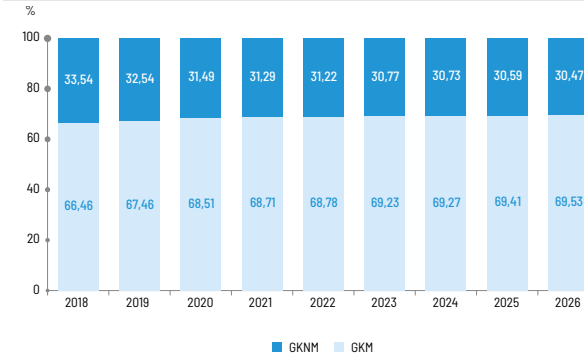

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.14 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan

Tabel 5.3 Profil Kemiskinan DKI Jakarta

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA	2021		2022		2023	2024		2025		2026
	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	501,92	498,29	502,04	494,93	477,83	464,93	449,07	464,87	439,12	432,62
Presentase Penduduk Miskin (%)	4,72	4,67	4,69	4,61	4,44	4,30	4,14	4,28	4,03	3,96
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	697.638	715.052	738.955	773.370	792.515	825.288	846.085	852.768	897.768	925.525
Makanan	479.332	490.918	508.239	534.819	548.628	571.647	590.704	591.933	622.175	643.531
Non Makanan	218.306	224.134	230.716	238.551	243.887	253.641	255.381	260.835	275.593	281.994
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,64	0,75	0,77	0,68	0,70	0,65	0,55	0,57	0,49	0,61
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	0,18	0,19	0,16	0,18	0,13	0,11	0,11	0,10	0,14

Sumber: BPS, diolah

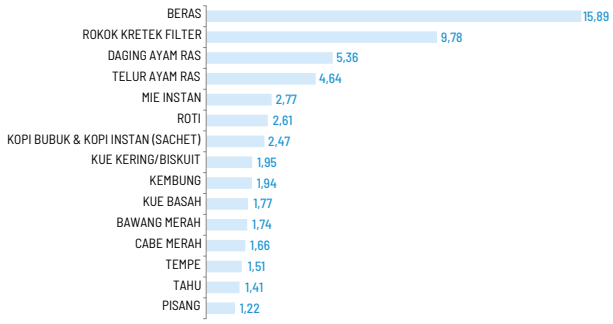

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.15 Komoditas Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan (%)

Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan dibandingkan peranan komoditas non makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK pada Maret 2026 sebesar 69,53% sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terhadap GK sebesar 30,47% (Grafik 5. 14). Komoditi makanan didominasi oleh beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras dan mie instan masing-masing sebesar 15,89%, 9,78%, 5,36%, 4,64%, dan 2,77% (Grafik 5. 15). Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat DKI Jakarta pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi oleh komoditi makanan. Sementara itu, komoditas non makanan didominasi oleh perumahan, listrik, pendidikan, bensin, dan perlengkapan mandi masing-masing sebesar 11,99%, 4,19%, 2,38%, 2,26% dan 1,29% (Grafik 5. 16).

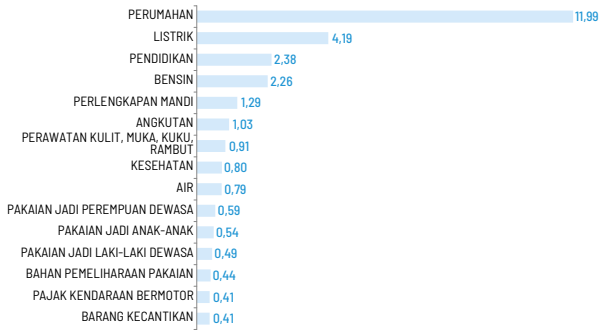

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.16 Komoditas Non Makanan Penyumbang Garis Kemiskinan (%)

Tingkat kemiskinan di semua provinsi di Jawa tercatat menurun pada periode Maret 2026. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah di pulau Jawa yang kemudian diikuti oleh Provinsi Banten dan Jawa Barat (Grafik 5. 17). Garis kemiskinan di Jakarta tercatat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, sementara Jawa Tengah merupakan provinsi di Jawa dengan level garis kemiskinan terendah pada Maret 2026 (Grafik 5.18).

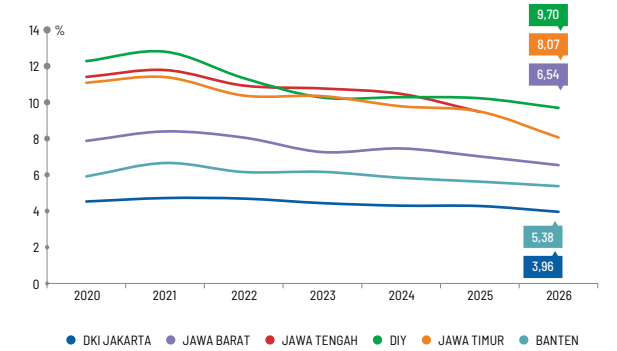

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.17 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa

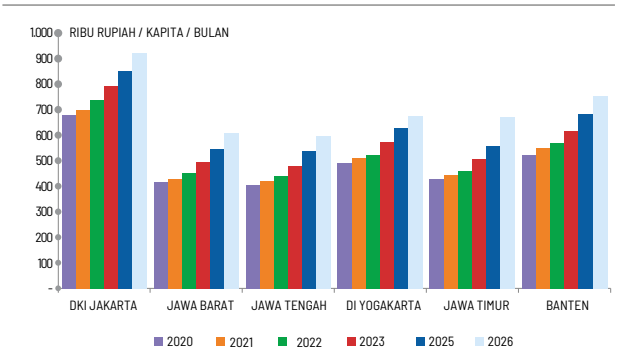

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.18 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa

Di tengah penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2026 justru mengalami kenaikan. Kedua indeks tersebut masing-masing tercatat sebesar 0,61 dan 0,14 lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang masing-masing sebesar 0,57 dan 0,11 (Grafik 5. 19). Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sedangkan kenaikan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar. Dengan demikian, meskipun persentase penduduk miskin menurun, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami kenaikan.

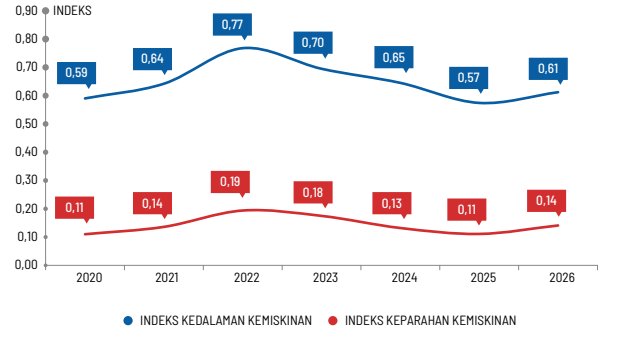

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2026, ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) juga mengalami penurunan. Indeks Gini Ratio DKI Jakarta tercatat sebesar 0,435, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,441 (Grafik 5. 20). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran antara kelompok masyarakat berpengeluaran tinggi dan rendah semakin menyempit, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang (a rentang 0,4-0,5). Meskipun demikian, indeks rasio gini tersebut juga berada di atas capaian nasional yang sebesar 0,368.

Sejalan dengan tren yang menyempit, ketimpangan pengeluaran antara kelompok pengeluaran terendah dan kelompok pengeluaran tertinggi menunjukkan perbaikan sebagaimana tecermin dari distribusi pengeluaran penduduk. Proporsi pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk, yakni sebesar 16,71% pada Maret 2026 (Grafik 5. 21). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2025 yakni sebesar 16,12%. Sementara itu, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan dari 52,45% menjadi 52,20%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi kepada 40% masyarakat dengan pengeluaran terendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan perlahan dapat membaik.

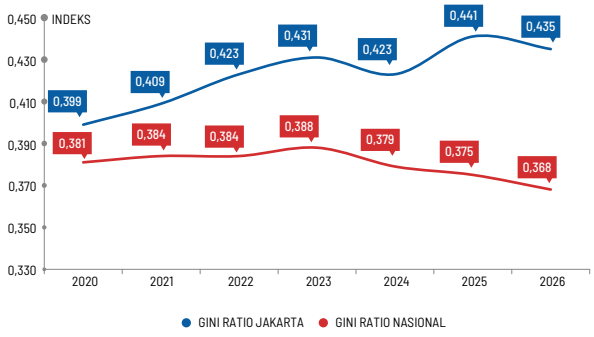

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.20 Rasio Gini Jakarta dan Nasional

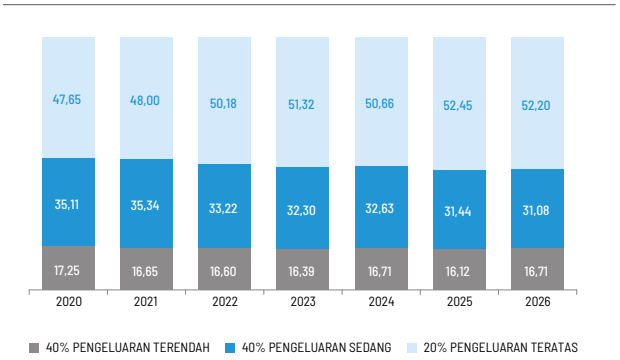

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.21 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta

C. UPAH TENAGA KERJA

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta 2026 telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876, meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2025 (Rp5.396.761) (Grafik 5. 22). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 1142/2025 tentang UMP Jakarta 2026 tanggal 23 Desember 2025.

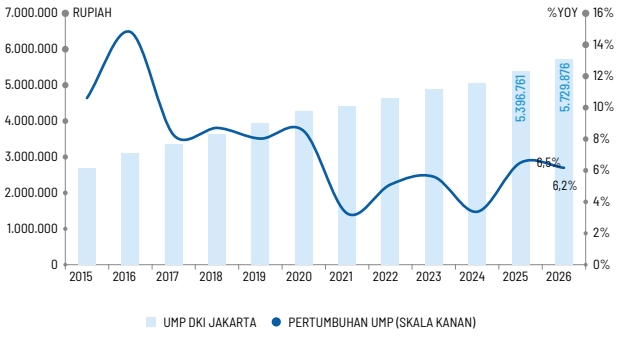

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.22 Perkembangan UMP DKI Jakarta

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2025 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi.

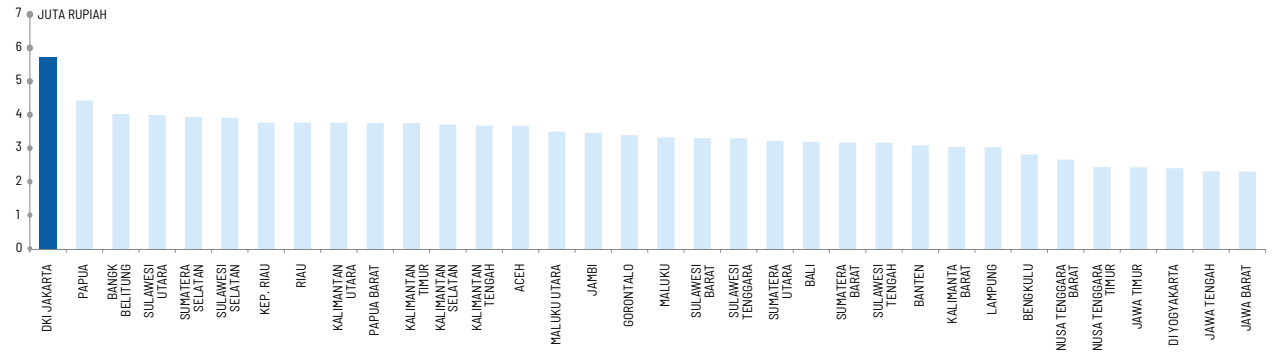

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.23 UMP Provinsi di Indonesia

2026

Bab 6

Prospek Ekonomi Daerah

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diprakirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy). Prospek tersebut didukung oleh kinerja perekonomian pada semester I 2026 yang tetap kuat serta berlanjutnya permintaan domestik baik aktivitas konsumsi maupun investasi pemerintah dan swasta. Meski demikian, ketidakpastian global yang masih tinggi, berlanjutnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta dinamika nilai tukar Rupiah tetap menjadi faktor yang perlu dicermati karena dapat memengaruhi permintaan eksternal, biaya input, dan keputusan investasi pelaku usaha.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi pada semester II diprakirakan tetap resilien meskipun lebih moderat, didukung oleh mobilitas masyarakat, penyelenggaraan berbagai kegiatan, MICE, konser, dan sportainment, serta momentum HBKN Nataru di akhir tahun. Investasi diprakirakan menguat didukung kelanjutan dan penyelesaian proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat *multiyears* seperti MRT Fase 2A, LRT Jakarta Fase 1B, pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD), serta proyek infrastruktur perkotaan lainnya. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh kuat didukung belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan realisasi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh program prioritas Pemerintah. Sementara itu, ekspor tetap tumbuh moderat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan permintaan global. Di sisi lain, impor tetap tinggi sejalan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung kegiatan produksi dan investasi, sehingga menahan kontribusi net ekspor.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan ditopang oleh LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi. LU Perdagangan tetap kuat ditopang aktivitas konsumsi, perdagangan antarwilayah, serta penyelenggaraan MICE. LU Industri Pengolahan didukung permintaan domestik, sementara LU Konstruksi menguat sejalan berlanjutnya proyek strategis Pemerintah dan swasta. LU Informasi dan Komunikasi tetap tumbuh kuat seiring peningkatan transaksi digital dan kebutuhan layanan data yang terus berkembang. Di sisi lain, LU Jasa Keuangan diprakirakan tumbuh lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

PROYEKSI EKONOMI GLOBAL WEO IMF (yoy)

3,5% Tahun 2025, yoy → **3,0%** Tahun 2026, yoy

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA

4,9% - 5,7%
Tahun 2026, yoy

PROYEKSI PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN DUNIA WEO IMF

5,0% Tahun 2025, yoy → **3,5%** Tahun 2026, yoy

PROYEKSI INFLASI IHK DKI JAKARTA

2,5% ± 1%
Tahun 2026, yoy

A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diprakirakan masih dibayangi ketidakpastian global yang tinggi. Prospek tersebut terutama dipengaruhi berlanjutnya konflik geopolitik di Kawasan Timur Tengah yang memicu gangguan pasokan energi dan distribusi perdagangan global, serta mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya. Di sisi lain, investasi dan perdagangan terkait *artificial intelligence* (AI) tetap kuat dan menahan perlambatan ekonomi global yang lebih dalam. IMF dalam *World Economic Outlook* Juli 2026 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0% pada 2026, sementara World Bank dan OECD masing-masing memprakirakan sebesar 2,5% dan 2,8%. Secara umum, ketiga lembaga masih melihat pertumbuhan global pada 2026 lebih lemah dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum membaik secara bertahap pada 2027 (Tabel 6.1).

Dari sisi perdagangan, prospek global masih dibayangi tarif, *trade barriers*, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan, meskipun tarif efektif Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan asumsi sebelumnya. Perdagangan dunia juga menghadapi tekanan dari tingginya biaya energi dan transportasi serta gangguan pada jalur distribusi di Kawasan Timur Tengah. Namun demikian, kuatnya permintaan terhadap produk teknologi dan *AI-related*, termasuk semikonduktor dan perangkat komputasi, memberikan dukungan terhadap aktivitas perdagangan global. IMF memprakirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat menjadi 3,5% pada 2026 dari 5,0% pada 2025, sementara World Bank dan OECD masing-masing memprakirakan sebesar 2,9% dan 3,1%. Dengan demikian, prospek perdagangan global tetap rentan terhadap eskalasi kembali konflik geopolitik maupun kebijakan tarif dan retaliasi yang dapat meningkatkan friksi rantai pasok dan menekan sentimen dunia usaha.

Perekonomian Amerika Serikat diprakirakan tetap tumbuh solid pada 2026, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ditopang oleh investasi teknologi dan AI yang tetap kuat serta dukungan kebijakan fiskal. IMF memprakirakan pertumbuhan AS sebesar 2,3% pada 2026. Namun demikian, peningkatan investasi teknologi turut mendorong impor barang modal dan bahan baku sehingga menahan kontribusi net ekspor. Di sisi lain, kenaikan harga energi akibat konflik di Kawasan Timur Tengah meningkatkan tekanan inflasi dan menyebabkan ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menjaga yield US Treasury tetap tinggi dan menahan aliran modal ke negara *emerging markets*, termasuk Indonesia. Bagi Jakarta, kondisi ini dapat ditransmisikan melalui pasar keuangan, biaya pendanaan korporasi, serta kenaikan biaya barang modal dan bahan baku impor.

Sementara itu di Kawasan Euro, pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap lemah pada 2026. IMF memprakirakan pertumbuhan sebesar 0,9%, sementara World Bank dan OECD sebesar 0,8%. Aktivitas ekonomi masih tertahan oleh tingginya harga energi, lemahnya keyakinan konsumen, serta kinerja manufaktur dan ekspor yang belum kuat. Namun demikian, konsumsi rumah tangga yang relatif resilien dan peningkatan belanja publik memberikan bantalan terhadap perlambatan ekonomi. Tingginya ketergantungan Kawasan Euro terhadap impor energi menyebabkan kawasan ini tetap rentan terhadap berlanjutnya gangguan pasokan dan kenaikan harga energi global. Masih lemahnya perekonomian di Kawasan Euro berpotensi menahan aktivitas perdagangan internasional, serta dapat memengaruhi kinerja korporasi di Jakarta yang memiliki keterkaitan dengan pasar Eropa.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diprakirakan tumbuh terbatas pada 2026. IMF dan OECD masing-masing memprakirakan pertumbuhan sebesar 0,6%, sementara World Bank sebesar 0,7%. Konsumsi domestik tetap ditopang pertumbuhan upah dan dukungan subsidi energi. Namun, kenaikan biaya impor energi serta tertahannya

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy)

	REALISASI		IMF			WORLD BANK			OECD			PROYEKSI BI
	2024	2025	APR-26	JUL-26		JAN-25	JUN-26		MAR-26	JUN-26		FEB-26
			2026	2026		2026	2026		2026	2026		2026
Dunia	**3,5**	**3,5**	**3,1**	**3,0**	↓	**2,6**	**2,5**	↓	**2,9**	**2,8**	↓	**3.2**
Negara Maju	**1,9**	**1,9**	**1,8**	**1,7**	↓	**1,6**	**1,5**	↓	-	-		**1.8**
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,3	2,3	→	2,2	2,2	→	2,0	2,0	→	2.3
Kawasan Euro	1	1,4	1,1	0,9	↓	0,9	0,8	↓	0,8	0,8	→	1.3
Jepang	-0,2	1,1	0,7	0,6	↓	0,8	0,7	↓	0,9	0,6	↓	0.8
Negara Berkembang	**4,5**	**4,5**	**3,9**	**3,8**	↓	**4,0**	**3,6**	↓	-	-		-
Tiongkok	5,0	5,0	4,4	4,6	↑	4,4	4,2	↓	4,4	4,5	↑	4.1
India	7,1	7,7	6,5	6,4	↓	6,5	6,6	↑	6,1	6,3	↑	6.8
Volume Perdagangan Dunia	**3,7**	**5,0**	**2,8**	**3,5**	↑	**2,2**	**2,9**	↑	-	**3,1**		-
Harga Minyak (USD)	**81[1]**	**68[1]**	**82[2]**	**89[2]**	↑	**60[3]**	**94[3]**	↑	-	**92[3]**		-

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

produksi industri semikonduktor dan otomotif diprakirakan membatasi kinerja manufaktur dan ekspor. Dengan struktur ekonomi yang relatif bergantung pada impor energi, Jepang tetap sensitif terhadap perkembangan konflik di Kawasan Timur Tengah. Bagi Jakarta, perlambatan ekonomi Jepang dapat memengaruhi aktivitas perdagangan, jasa korporasi, serta rantai pasok manufaktur yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan Jepang.

Adapun pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2026 diprakirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. IMF memprakirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 4,6%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi World Bank sebesar 4,2% dan OECD sebesar 4,5%. Pertumbuhan tetap ditopang oleh ekspor dan produksi *high-tech manufacturing,* termasuk produk *AI-related,* kendaraan listrik, dan *green technology,* serta dukungan kebijakan Pemerintah. Namun demikian, permintaan domestik masih relatif lemah, terutama akibat berlanjutnya koreksi pada sektor properti dan tertahannya konsumsi serta investasi swasta. Diversifikasi tujuan ekspor membantu menjaga kinerja perdagangan, meskipun meningkatnya proteksionisme dan *trade remedies* di sejumlah negara tetap menjadi faktor risiko. Bagi Jakarta, lemahnya permintaan domestik Tiongkok dapat menahan aktivitas ekspor, seiring Tiongkok menjadi salah satu pasar utama. Di sisi lain, kuatnya produksi dan diversifikasi ekspor Tiongkok berpotensi meningkatkan arus impor bahan baku dan barang jadi serta tekanan persaingan terhadap industri pengolahan.

Perekonomian India diprakirakan tetap tumbuh tinggi dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan global. IMF, World Bank, dan OECD secara umum memprakirakan pertumbuhan pada kisaran 6% pada FY2026/27. Pertumbuhan terutama ditopang permintaan domestik dan investasi yang tetap kuat. Namun, kenaikan harga minyak, gas, pupuk, dan pangan diprakirakan meningkatkan tekanan inflasi serta menahan konsumsi dan investasi. Ketergantungan India terhadap impor energi juga menyebabkan prospek ekonominya relatif sensitif terhadap durasi gangguan pasokan energi global. Tetap kuatnya perekonomian India membuka peluang perluasan pasar bagi produk manufaktur dan jasa di Jakarta di tengah moderasi permintaan dari sejumlah mitra dagang utama.

Prospek Perekonomian Nasional

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan tetap kuat berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy) (Tabel 6. 2), namun demikian tekanan terhadap perekonomian akibat tingginya gejolak global seiring eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah masih perlu dicermati. Prospek ini terutama dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global terkini serta kinerja ekonomi domestik yang tetap kuat hingga semester I 2026. Setelah tumbuh 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026, terutama ditopang oleh konsumsi Pemerintah dan investasi. Ke depan, pertumbuhan pada semester II 2026 diprakirakan tetap kuat meskipun lebih moderat, sejalan dengan dorongan konsumsi Pemerintah dan peran sektor swasta yang terus diperkuat.

Dari sisi investasi, kinerja pada 2026 diprakirakan tetap positif dan kuat, terutama melalui investasi Pemerintah yang mendorong peningkatan kapasitas produksi termasuk hilirisasi serta proyek-proyek prioritas yang masih berjalan. Investasi juga ditopang kelanjutan proyek Pemerintah pada sektor energi, konektivitas, kawasan industri, dan infrastruktur lainnya, serta realisasi penanaman modal asing yang tetap kuat. Perbaikan keyakinan dunia usaha diprakirakan menopang keputusan ekspansi, meskipun peran investasi swasta domestik masih perlu terus diperkuat agar dorongan investasi Pemerintah memberikan *multiplier effect* yang lebih besar terhadap perekonomian. Pelaku usaha juga tetap mencermati dinamika ekonomi global, eskalasi geopolitik di Kawasan Timur Tengah, serta dinamika nilai tukar dan suku bunga.

Konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap terjaga sebagai penopang utama pertumbuhan, meskipun cenderung lebih moderat pada semester II 2026. Momentum HBKN di awal tahun telah memberi dorongan melalui peningkatan mobilitas dan belanja, sementara kebijakan Pemerintah melalui insentif, bantuan sosial, dan berbagai program prioritas membantu menjaga daya beli, khususnya kelompok rentan. Meski demikian, penguatan konsumsi belum sepenuhnya merata karena sebagian rumah tangga masih sensitif terhadap dinamika pendapatan dan kondisi pasar kerja. Tekanan harga pangan dan energi serta ketidakpastian ekonomi juga dapat mendorong rumah tangga lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga dan daya beli tetap menjadi kunci agar konsumsi dapat menopang pertumbuhan.

Dari sisi fiskal, dukungan Pemerintah pada 2026 diprakirakan tetap berperan sebagai penopang pertumbuhan melalui pelaksanaan program prioritas. Realisasi belanja Pemerintah yang tinggi pada semester I 2026 telah memberikan dorongan kuat terhadap pertumbuhan, sementara kontribusinya pada semester II diprakirakan lebih moderat. Namun, dampak likuiditas belanja Pemerintah diprakirakan meningkat pada semester II sesuai dengan pola realisasi anggaran. Di tengah kenaikan harga minyak dan tantangan penerimaan yang membatasi ruang fiskal, kualitas belanja yang produktif, efisien, dan tepat sasaran menjadi semakin penting untuk memperkuat dampaknya terhadap aktivitas sektor swasta dan permintaan domestik.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi nasional 2026 diprakirakan tetap ditopang sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertanian. LU Konstruksi dan Perdagangan diprakirakan tetap kuat sejalan dengan berlanjutnya proyek dan program Pemerintah serta terjaganya aktivitas konsumsi. LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Informasi dan Komunikasi tetap didukung aktivitas mobilitas dan digitalisasi. Pertanian tetap berperan penting sebagai penyangga pasokan pangan, terutama di tengah fokus ketahanan pangan yang masih menjadi perhatian serta risiko gangguan cuaca pada semester II 2026.

Dari sisi eksternal, ekspor diprakirakan tetap tumbuh di tengah lemahnya prospek ekonomi global, meskipun permintaan terhadap sejumlah komoditas dan produk terkait teknologi masih memberikan dukungan. Penguatan daya saing dan diversifikasi pasar/produk tetap relevan untuk menjaga ketahanan ekspor. Di sisi lain, impor diprakirakan meningkat seiring kebutuhan bahan baku industri dan barang modal untuk mendukung investasi dan produksi. Kenaikan impor yang lebih tinggi sejalan dengan menguatnya permintaan domestik dan investasi berpotensi menahan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan. Dengan demikian, ketahanan ekspor tetap perlu dijaga di tengah peningkatan kebutuhan impor untuk kegiatan produktif.

Dari sisi harga, inflasi nasional pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%. Prospek inflasi tetap didukung ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran dan kapasitas perekonomian yang masih memadai. Namun demikian, tekanan dari harga energi dan komoditas global, dinamika nilai tukar Rupiah, serta harga pangan tetap perlu dicermati sebagai sumber risiko inflasi. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar dan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% pada RDG Agustus 2026 untuk menjaga stabilitas Rupiah dan inflasi dalam sasaran, dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.2 Proyeksi PDB Nasional

	SATUAN	2024				2024	2025				2025	2026*
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertumbuhan Ekonomi	%	**5,11**	**5,05**	**4,95**	**5,02**	**5,03**	**4,87**	**5,12**	**5,04**	**5,39**	**5,11**	**4,9–5,7**
Inflasi IHK	%	3,05	2,51	1,84	1,57	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92	2,5±1	2,5±1
Kredit Perbankan	%	12,40	12,36	10,85	10,39	10,39	9,16	7,77	7,70	9,69	8-11	8-12

Sumber : BPS dan Proyeksi Bank Indonesia

B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

Pada 2026, prospek pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan tetap kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy) (Grafik 6. 1). Prospek tersebut mencermati perekonomian domestik terkini dan aktivitas ekonomi Jakarta yang tetap terjaga, tecermin dari pertumbuhan sebesar 5,59% (yoy) pada triwulan I 2026 dan 5,52% (yoy) pada triwulan II 2026. Pada semester II 2026, pertumbuhan diprakirakan tetap kuat meskipun mengalami moderasi, sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah tingginya aktivitas pada semester I, di tengah penguatan investasi dan dukungan belanja Pemerintah. Dengan karakter Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa nasional, pertumbuhan ekonomi 2026 diperkirakan ditopang oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi Pemerintah, sambil tetap mewaspadai risiko eksternal yang dapat memengaruhi sentimen usaha dan kinerja perdagangan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan Jakarta pada 2026. Setelah tumbuh kuat pada semester I, konsumsi pada semester II diprakirakan tetap resilien meskipun lebih moderat, sejalan dengan normalisasi aktivitas pasca-HBKN. Konsumsi tetap didukung oleh mobilitas masyarakat, penyelenggaraan berbagai kegiatan, MICE, konser, dan *sportainment*, serta periode tahun ajaran baru, yang menopang aktivitas ritel dan konsumsi jasa perkotaan. Menjelang akhir tahun, momentum HBKN Natal dan Tahun Baru serta libur sekolah diprakirakan kembali meningkatkan belanja masyarakat. Dari sisi kebijakan, keberlanjutan program dukungan Pemerintah, termasuk bantuan sosial, diprakirakan tetap membantu menjaga daya beli, terutama bagi kelompok rentan. Meski demikian, konsumsi masyarakat cenderung lebih selektif sehingga penguatan konsumsi diprakirakan tidak merata pada seluruh kelompok rumah tangga.

Sejalan dengan itu, investasi juga menjadi komponen yang menopang kuatnya pertumbuhan pada 2026. Pendorong utama investasi masih berasal dari investasi bangunan seiring berlanjutnya realisasi proyek strategis Pemerintah yang bersifat multitahun, khususnya proyek transportasi massal perkotaan dan pengembangan kawasan. Investasi pada semester II diprakirakan meningkat sejalan dengan akselerasi penyelesaian LRT Jakarta Fase 1B Velodrome–Manggarai, kelanjutan MRT Fase 2A, *Jakarta Sewerage System, National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD), Jalan Tol Harbour Road II Ancol Timur–Pluit, serta proyek Pemerintah dan swasta lainnya. Penguatan investasi juga tecermin dari meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal serta aktivitas pembiayaan proyek. Di samping itu, investasi swasta diprakirakan tetap berlanjut, terutama pada sektor properti, transportasi, dan jasa perkotaan, meskipun pelaku usaha tetap mencermati ketidakpastian global, perkembangan nilai tukar, dan biaya pembiayaan.

Selain konsumsi rumah tangga dan investasi, konsumsi Pemerintah pada 2026 diprakirakan tumbuh kuat dan memberikan dukungan yang lebih besar dibandingkan prakiraan sebelumnya. Penguatan tersebut didukung realisasi belanja APBN di Jakarta yang tinggi pada semester I 2026, disertai berlanjutnya penyaluran program prioritas Pemerintah dan bantuan sosial. Ke depan, realisasi belanja Pemerintah diprakirakan kembali meningkat menjelang akhir tahun sesuai pola musiman belanja. Dari sisi APBD, Pemerintah Daerah tetap menekankan efisiensi belanja operasional rutin, namun menjaga alokasi belanja yang berdampak langsung pada layanan publik dan pembangunan. Meski demikian, keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penurunan TKD tetap perlu dicermati sehingga kualitas dan ketepatan waktu realisasi belanja menjadi penting dalam menjaga kontribusinya terhadap perekonomian Jakarta.

Dari sisi eksternal, ekspor DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan tetap tumbuh, namun lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya di tengah prospek perekonomian global yang belum stabil. Kinerja ekspor hingga semester I lebih kuat dari prakiraan sebelumnya, termasuk didukung ekspor migas serta *front-loading* ekspor pada sejumlah produk, khususnya otomotif, untuk mengantisipasi perubahan regulasi di negara tujuan. Namun demikian, moderasi permintaan

global, ketidakpastian perdagangan, dan perkembangan geopolitik tetap menjadi faktor penahan. Diversifikasi pasar tujuan dan tetap kuatnya perdagangan dengan negara *emerging markets* diprakirakan membantu menjaga kinerja ekspor

Sejalan dengan itu, impor DKI Jakarta diprakirakan tumbuh lebih tinggi, seiring menguatnya aktivitas investasi dan produksi. Peningkatan impor terutama bersumber dari kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis, aktivitas konstruksi, serta kebutuhan sektor industri dan jasa perkotaan. Impor barang konsumsi juga berpotensi meningkat untuk persiapan periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Dengan pertumbuhan impor yang lebih tinggi, kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan diprakirakan tertahan, meskipun kinerja ekspor tetap kuat.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2026 diprakirakan akan ditopang utamanya oleh LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Informasi dan Komunikasi. LU Perdagangan diprakirakan tetap kuat sejalan dengan terjaganya konsumsi masyarakat, penyelenggaraan berbagai *event* dan MICE, serta dukungan belanja program Pemerintah terhadap aktivitas ritel. LU Industri Pengolahan diprakirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, ditopang permintaan domestik dan aktivitas produksi, termasuk produksi otomotif untuk memenuhi permintaan rumah tangga maupun korporasi/Pemerintah. LU Konstruksi diprakirakan menguat sejalan kelanjutan dan penyelesaian proyek transportasi massal, infrastruktur perkotaan, dan proyek swasta. Sementara itu, LU Informasi dan Komunikasi tetap tumbuh kuat didukung peningkatan transaksi digital dan kebutuhan layanan data. LU Jasa Keuangan tetap tumbuh positif, meskipun diprakirakan lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester II, kinerja sektor ini tetap didukung peningkatan penyaluran kredit serta aktivitas pembayaran dan pembiayaan terkait proyek. LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan turut tumbuh seiring berlanjutnya aktivitas pariwisata perkotaan, peningkatan mobilitas masyarakat, penyelenggaraan *event*, dan aktivitas perdagangan dan logistik antarwilayah.

Namun demikian, beberapa risiko yang dapat menahan pertumbuhan lebih lanjut perlu dicermati, utamanya dinamika ekonomi global, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, volatilitas nilai tukar Rupiah, serta dinamika kebijakan perdagangan AS. Fluktuasi harga energi global juga berpotensi menahan tingginya biaya bahan baku, logistik, dan barang modal impor. Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga yang lebih selektif serta belum meratanya penguatan aktivitas sektor swasta dapat menahan pertumbuhan lebih lanjut. Selain itu, risiko spesifik pada beberapa LU juga perlu diwaspadai, terutama apabila pelemahan permintaan menahan kinerja Industri Pengolahan atau ketidakpastian pasar keuangan memengaruhi aktivitas Jasa Keuangan.

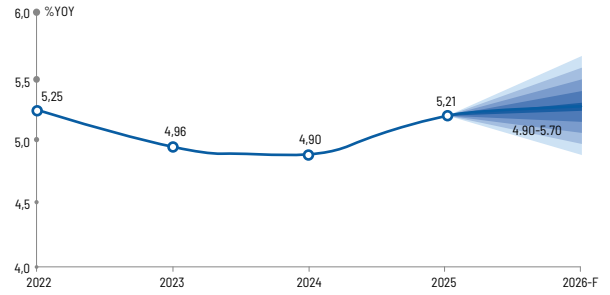

Data: BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2026

Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta 2026

Pada 2026, pagu anggaran APBD DKI Jakarta mengalami kontraksi sebesar 10,96% dari Rp91,34 triliun menjadi Rp81,32 triliun (Grafik 6. 2). Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2026 mengalami kontraksi sebesar 12,58% dibandingkan APBD 2025, yaitu dari Rp81,73 triliun menjadi Rp71,45 triliun. Penurunan pagu RAPBD DKI Jakarta 2026 dari sisi pendapatan terutama bersumber dari pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang mencapai 57,3% dibandingkan APBD 2025. Di tengah penurunan tersebut, kapasitas fiskal daerah tetap ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Dari sisi belanja, pagu APBD DKI Jakarta 2026 mengalami kontraksi sebesar 10,13% dibandingkan APBD 2025 dari Rp82,67 triliun menjadi Rp74,28 triliun. Berdasarkan komponennya, penurunan pagu belanja RAPBD DKI Jakarta 2026 terutama bersumber dari komponen belanja modal (kontraksi 33,48%) dan belanja operasional (kontraksi 2,68%). Penurunan kapasitas belanja modal ini perlu dicermati mengingat perannya yang penting dalam menopang investasi bangunan dan proyek infrastruktur daerah.

Dari sisi APBN di DKI Jakarta, alokasi anggaran tahun 2026 menunjukkan skala fiskal yang cukup kuat. Postur APBN yang dialokasikan di DKI Jakarta mencakup Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.852,55 triliun (sekitar 67,19% dari nasional) dan Belanja Negara sebesar Rp2.291,53 triliun (sekitar 51,31% dari nasional) (Grafik 6. 3). Peran DKI sebagai pusat aktivitas ekonomi dan administrasi negara menjadikan dinamika APBN di wilayah ini penting dalam membentuk prospek permintaan domestik, terutama melalui belanja K/L dan belanja barang/jasa.

Ke depan, outlook kinerja APBN 2026 diprakirakan tetap kuat. Belanja K/L diprakirakan meningkat pada semester II dan menguat pada triwulan IV sejalan dengan akselerasi program, realisasi pengadaan, serta penyelesaian kegiatan dan kontrak pada akhir tahun. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat memengaruhi pencapaian realisasi pendapatan dan belanja, antara lain kondisi

geopolitik global, kenaikan harga energi, keterbatasan ruang fiskal, serta risiko keterlambatan pelaksanaan program dan pengadaan. Dengan demikian, kualitas dan ketepatan waktu belanja menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya dukungan fiskal terhadap perekonomian Jakarta pada semester II 2026.

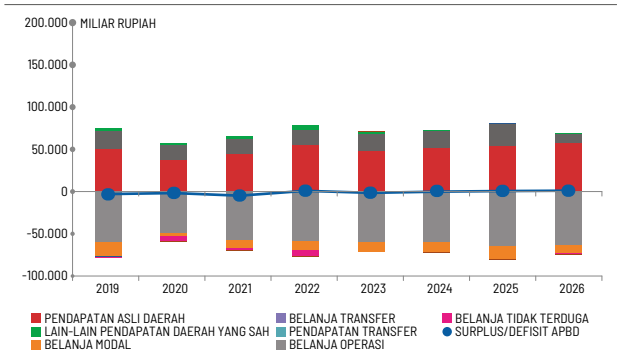

Sumber: BPKD DKI Jakarta

Grafik 6.2 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2026

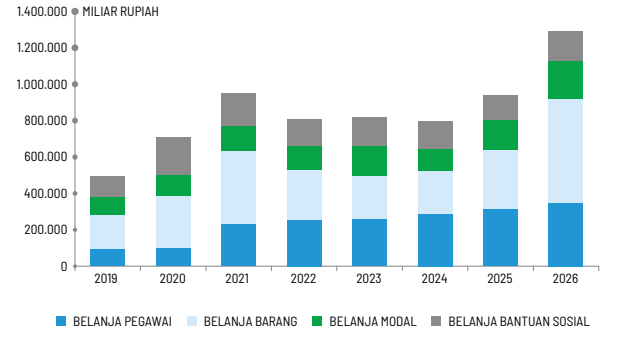

Sumber: DJPB Provinsi DKI Jakarta

Grafik 6.3 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2026

Prospek Inflasi Jakarta

Pada 2026, inflasi Jakarta diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% (yoy) (Grafik 6. 4). Secara umum, kondisi ini ditopang oleh berlanjutnya berbagai kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Selain itu, konsistensi koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah turut menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ekspektasi inflasi masyarakat. Meski demikian, tekanan inflasi tetap perlu dicermati terutama bersumber dari perkembangan harga komoditas global, dinamika nilai tukar Rupiah, harga pangan, serta penyesuaian harga yang diatur Pemerintah. Di sisi pangan, tingginya ketergantungan Jakarta terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan perkembangan harga tetap sensitif terhadap gangguan produksi dan distribusi di daerah sentra.

Adapun risiko yang berpotensi mendorong inflasi DKI Jakarta pada 2026 antara lain:

1. **Ketegangan geopolitik** yang dapat meningkatkan volatilitas harga energi dan pangan global serta berdampak pada biaya distribusi dan komoditas pangan tertentu.
2. **Fragmentasi perdagangan** dan ketidakpastian kebijakan global (termasuk dinamika tarif) yang berpotensi memengaruhi harga impor, biaya input, serta sentimen pelaku usaha.
3. **Volatilitas nilai tukar Rupiah** yang dapat meningkatkan *imported inflation* melalui kenaikan harga komoditas impor, energi nonsubsidi, dan bahan baku industri.
4. **Gangguan produksi dan distribusi pangan akibat faktor cuaca** yang dapat memengaruhi pasokan dari daerah sentra, terutama untuk komoditas hortikultura dan pangan strategis.
5. **Tekanan biaya produksi pangan,** termasuk perkembangan harga gabah, pupuk, kemasan, dan biaya distribusi, yang dapat diteruskan ke harga konsumen.
6. **Tarif layanan publik dan komponen harga yang diatur** yang berpotensi menambah tekanan inflasi pada periode penyesuaian, termasuk harga energi nonsubsidi.
7. **Persistensi harga beras pada level tinggi** apabila perbaikan pasokan dari daerah sentra belum mampu mengimbangi tekanan biaya produksi dan kebutuhan konsumsi Jakarta.
8. **Peningkatan harga emas global** yang dapat mendorong inflasi kelompok komoditas logam mulia dan emas perhiasan.

Terkendalinya inflasi DKI Jakarta pada 2026 tetap membutuhkan penguatan peran TPID melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Implementasi kebijakan dapat terus diperkuat melalui operasi pasar/pasar murah dan program pangan bersubsidi bersama BUMD Pangan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan, penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi, serta *capacity building* TPID. Penguatan pasokan perlu diarahkan terutama pada komoditas pangan strategis yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap daerah sentra, disertai penguatan pemantauan harga dan distribusi untuk mempercepat respons terhadap potensi gangguan pasokan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan GPIPS perlu dilanjutkan secara konsisten melalui penguatan produksi (alsintan/saprodi), fasilitasi distribusi, hilirisasi dan diversifikasi pangan, penguatan infrastruktur dan digitalisasi informasi pangan, serta koordinasi intensif melalui *High Level Meeting* TPID, khususnya menjelang HBKN dan pada periode rawan gangguan pasokan.

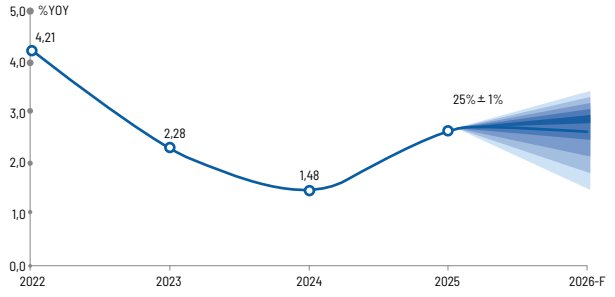

Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 6.4 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2026

Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko pada 2026 terutama bersumber dari ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang tetap lemah, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter global. Kondisi tersebut dapat ditransmisikan ke perekonomian Jakarta melalui kenaikan harga energi dan biaya logistik, volatilitas nilai tukar dan pasar keuangan, serta gangguan perdagangan dan rantai pasok. Dampaknya berpotensi meningkatkan biaya produksi dan pembiayaan, menahan ekspansi dunia usaha dan investasi, serta mendorong tekanan inflasi melalui kenaikan harga barang impor dan biaya distribusi.

Selain itu, risiko domestik juga perlu dicermati, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural tetap bersumber dari daya dukung Jakarta, seperti keterbatasan lahan, tekanan biaya (termasuk upah), ketersediaan air, serta isu perkotaan lain seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, risiko siklikal terutama berasal dari konsumsi rumah tangga yang semakin selektif, belum meratanya penguatan sektor swasta, serta risiko pelaksanaan belanja dan penyelesaian proyek yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Dari sisi harga, tingginya ketergantungan Jakarta terhadap pasokan pangan dari luar daerah juga menyebabkan inflasi tetap sensitif terhadap gangguan produksi, distribusi, dan kenaikan biaya input di daerah sentra.

Dengan perkembangan tersebut, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta berasal dari tertahannya daya beli, investasi swasta, dan aktivitas dunia usaha apabila tekanan eksternal berlangsung lebih lama. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi, pangan, dan biaya distribusi dapat meningkatkan tekanan inflasi. Namun, berlanjutnya proyek strategis, penguatan belanja Pemerintah pada akhir tahun, serta tetap tingginya aktivitas jasa perkotaan, MICE, dan *event* menjadi faktor yang dapat menahan dampak perlambatan lebih lanjut. Profil risiko sebelumnya juga menunjukkan bahwa situasi geopolitik, energi, nilai tukar, dan kehati-hatian pelaku usaha merupakan sumber tekanan utama, sementara aktivitas jasa perkotaan dan kelanjutan proyek menjadi penopang pertumbuhan.

Sehubungan dengan itu, untuk memperkuat daya tahan perekonomian Jakarta sekaligus menjaga daya saing sebagai kota global, diperlukan penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain melalui:

1. Menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi dalam sasaran, khususnya dengan menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan ekspektasi inflasi.
2. Menjaga momentum konsumsi dan sektor jasa melalui penyelenggaraan MICE, *event*, pariwisata perkotaan, serta aktivitas ekonomi kreatif yang memiliki keterkaitan luas dengan perdagangan, transportasi, dan akomodasi-makan minum.
3. Menjaga kesinambungan investasi melalui percepatan proyek strategis, perbaikan iklim investasi, dan penguatan kepastian berusaha, sekaligus mendorong keterlibatan investasi swasta.
4. Mendorong sumber pertumbuhan baru pada sektor potensial, termasuk perdagangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, serta kesehatan.
5. Memperkuat koordinasi kawasan aglomerasi Jabodetabek, terutama terkait mobilitas, logistik, pasokan pangan, dan integrasi layanan publik.
6. Memperluas digitalisasi UMKM, sistem pembayaran, dan transaksi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi, inklusi ekonomi, serta produktivitas.

Tabel 6.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2026

JENIS RISIKO	JALUR TRANSMISI	PROBABILITAS	KETERANGAN
Ketidakpastian global, geopolitik, dan fragmentasi perdagangan	Menahan perdagangan, investasi, keyakinan dunia usaha, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan	Tinggi	Menahan pertumbuhan
Kenaikan harga energi dan volatilitas nilai tukar	Meningkatkan biaya produksi, logistik, barang impor, dan *imported inflation*	Tinggi	Menahan pertumbuhan dan meningkatkan inflasi
Konsumsi rumah tangga yang lebih selektif	Menahan permintaan domestik dan kinerja sektor perdagangan serta jasa terkait	Moderat	Menahan pertumbuhan
Keterlambatan realisasi belanja dan penyelesaian proyek	*Menahan konsumsi Pemerintah, investasi, dan aktivitas sektor konstruksi serta sektor terkait*	Moderat	Menahan pertumbuhan
Gangguan pasokan, distribusi, dan kenaikan biaya input pangan	Meningkatkan harga pangan strategis dan menekan daya beli	Tinggi	Meningkatkan inflasi dan dapat menahan konsumsi
Penyesuaian tarif layanan publik dan harga yang diatur Pemerintah	Meningkatkan inflasi kelompok *administered prices* dan biaya hidup masyarakat	Moderat	Meningkatkan inflasi

Tim Penyusun

PENGARAH
Iwan Setiawan

PENANGGUNG JAWAB
Bambang Arianto

KOORDINATOR PENYUSUN
Sakti Arif Wicaksono

EDITOR
Meily Ika Permata
Sudiro Pambudi
Reska Prasetya

TIM PENULIS
Muhammad Iqbal Baihaqi
Haris Fatori Aldila
Gia Amadea
Reza Kianendra
Dhia Atika Anggraini
Muhammad Zaydan Musyaffa
Harvia Mughni Vadwi
Hafidh Afif Ardhi
Nur Anisa Junus
Chendy Dea Andriany
Olivia Citra Octaviani
Benediktus Suprianggmaynanto Kuspratama

KONTRIBUTOR
Divisi Implementasi KEKDA Provinsi
Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran
Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta - 10410
No. Telp. 62-21-35110321

Halaman ini sengaja dikosongkan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42
Jakarta - 10410